

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Muhammad Fajri Saputra
Universitas Bung Hatta
e-mail: fajri_cold@yahoo.com

Dandes Rifa
Universitas Bung Hatta
e-mail: dandesrifaziohr@gmail.com

Novia Rahmawati
Universitas Bung Hatta
e-mail: noviarahma_titi@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the effect of corporate governance, profitability, and executive character to the activity of tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The elements of corporate governance consists of a proportion of the independent board, audit quality and audit committee as well as the elements of profitability is return on assets and the last variable is an executive character. The samples are property, real estate, and building construction companies are listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014. The samples obtained 38 companies were selected by using purposive sampling. Data analysis was performed by hypothesis testing is multiple regression. The results show that the elements of corporate governance, namely the proportion of independent board, audit quality and audit committee did not significantly effect on activity of tax avoidance. While the return on assets and executive character are significantly effect on activity of tax avoidance.

Keywords: corporate governance, the proportion of independent board, the quality audit, the audit committee, profitability, return on assets, executive character

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Elemen dari corporate governance berisi proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite, sedangkan profitabilitas berisi return on assets dan karakter eksekutif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel yang dibangun adalah 38 perusahaan yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan multiple regression untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite tidak signifikan mempengaruhi tax avoidance. Sementara itu, return on assets dan karakter eksekutif signifikan mempengaruhi tax avoidance.

Kata kunci: corporate governance, proporsi dewan independen, kualitas audit, komite audit, profitabilitas, return on asset, karakter eksekutif

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Dengan demi-

kian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan per-

pajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak masih sering kita dengar dewasa ini. Salah satu ketidapatuhan pajak yang dilakukan wajib pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dewi dan Jati 2014).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Mangoting 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan, karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan (Dewi dan Jati 2014).

Penelitian ini juga termotivasi oleh maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) yang beroperasi di Indonesia menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara asal maupun negara tujuan investasi (Dirjen Pajak 2014).

Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah kasus simulator SIM, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan (pajak.go.id).

Corporate governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam

perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa CG belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik Indonesia (Maharani dan Suardana 2014). Proksi dari CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisari independen, kualitas audit dan komite audit. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman dan Setioyono 2012). Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang

berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen 2006).

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh CG dilihat dari segi proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit, serta *return on assets* dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tax (Pajak)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo 2011).

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Hutagaol (2007) menyebutkan bahwa *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loopholes*).

Agency Theory

Menurut Jensen and Meckling (1976), *agency theory* merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi

antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya CG. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

Corporate Governance (CG)

CG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. CG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha yang kondusif (Annisa dan Kurniasih 2012). Menurut Desai (2005), CG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep CG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan 2009).

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih 2012).

Komite Audit

Winata (2014) menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan CG.

Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Return on Assets (ROA)

ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayarannya (Maharani dan Suardana 2014).

Karakter Eksekutif

Low (2009) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusa-

haan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan hutang (Lewellen 2006).

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance

Pada penelitian sebelumnya Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil yang sama dengan penelitian Prakosa (2014), komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Begitu juga Maharani dan Suardana (2014), keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam pencegahan penghindaran pajak. Dan juga Pranata (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyebutkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal itu disebabkan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya symbol semata.

H₁: *Corporate Governance* yang dilihat dari proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan sulit melakukan kebijakan pajak

agresif. Sejalan dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014), kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP non *The Big Four*, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian Pranata (2014), kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebab perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* belum tentu dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. H₂: *Corporate Governance* yang dilihat dari kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian Dewi dan Jati (2014) menyebutkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan CG di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Berbeda dengan penelitian Prakosa (2014), komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik.

H₃: *Corporate Governance* yang dilihat dari komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Return on Assets Terhadap Tax Avoidance

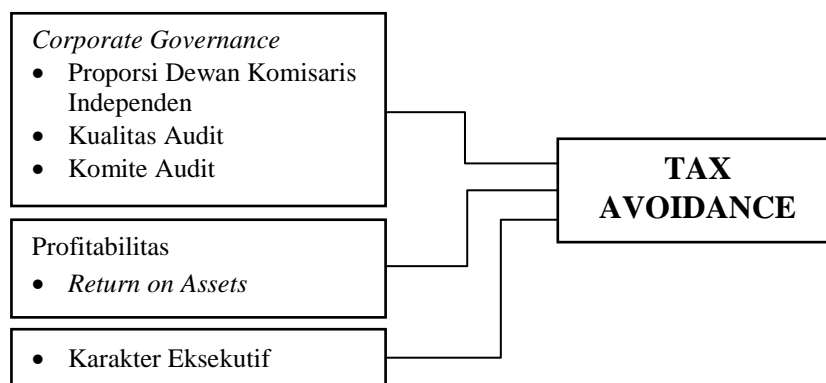
Dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Prakosa (2014) dalam penelitiannya juga menyebutkan jika ROA mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

H₄: *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) menyebutkan bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sependapat dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014), eksekutif yang semakin bersifat *risk taker* kemungkinan akan lebih besar melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat risiko perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko.

H₅: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1: Kerangka Penelitian

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang terdaftar dan menawarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah subset atau subkelompok populasi (Sekaran 2011). Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1) Perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun yaitu tahun 2012-2014 dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan. 2) Perusahaan memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember periode 2012-2014. 3) Perusahaan *property, real estate, dan building construction* yang tidak mengalami rugi pada laba sebelum pajak periode 2012-2014. 4) Perusahaan yang memiliki data mengenai komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit yang diperlukan untuk penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Sumber data diperoleh website resmi perusahaan dan website resmi Bursa Efek Indonesia.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Tax Avoidance

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* yaitu merupakan usaha pengurangan

bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara legal atau tidak melanggar undang-undang yang ada dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di suatu Negara. Seperti penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, variabel ini juga diproksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif Pajak Efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal.

Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang diproyeksikan mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel independen antara lain sebagai berikut:

Proporsi dewan komisaris independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan. Proporsi Dewan Komisaris Independen dilambangkan dengan PDKI.

Kualitas audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014). Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* ditandai dengan angka 1 dan yang diaudit oleh non *Big Four* ditandai dengan

angka 0. Variabel kualitas audit dilambangkan dengan KLT.

Komite audit

Pranata (2014) menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikali seratus persen (100%) sebagai alat ukur. Variabel komite audit dilambangkan dengan KMT.

Return on Assets (ROA)

ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. ROA dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Rugi Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Karakter Eksekutif

Low (2009) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut:

$$RISK = \frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset dari perusahaan.

Metode Analisa Data

Dalam melaksanakan pengujian statistik, maka penulis melakukan pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tahapan pengujian meliputi analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Selanjutnya analisa regresi linear berganda, kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji f statistik dan uji t statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *property, real estate, dan construction building* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Setelah seleksi sampel dilakukan berdasarkan kriteria maka didapat sampel sebanyak 38 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian.

Statistik Deskriptif

Variabel ETR mempunyai nilai mean sebesar 0,2186 atau sebesar 21,86%. Dari hal ini terlihat bahwa sebagian perusahaan *property, real estate dan construction building* yang terdaftar di BEI yang menjadi sampel penelitian ini telah menjalankan kewajiban perpajakan badannya sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Namun, apabila dilihat dari rentang nilai minimum dan nilai maksimum yaitu sebesar 0,04 sampai 0,75 terlihat bahwa masih ada perusahaan yang membayar pajak di bawah tariff yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Pada uji normalitas yang dilakukan pada semua variabel memiliki hasil nilai *asympt sig (2-tailed)* kecil dari alpha 0,05 yang berarti semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih belum berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 1.

Setelah itu dilakukan transform data pada uji normalitas dan didapatkan hasil nilai *asympt sig (2-tailed)* dari variabel *tax avoidance*, proporsi dewan komisaris, ROA dan karakter eksekutif besar dari alpha 0,05, dapat disimpulkan bahwa keempat berdistribusi normal. Tetapi variabel komite audit masih belum berdistribusi normal dan pada variabel kualitas audit tidak dilakukan transform data karena merupakan variabel *dummy*. Hasil pengujian normalitas setelah transform data dapat dilihat pada tabel 2.

Karena masih ada data yang tidak normal maka dilakukan pengujian normalitas dengan cara *unstandardized residual*. Setelah pengujian dilakukan dengan *unstandardized residual* maka didapat nilai *asympt sig (2-tailed)* sebesar 0,76 dan nilainya lebih besar dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan *unstandardized residual* berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas menggunakan *unstandardized residual* dapat dilihat dalam tabel 3.

Uji multikolinearitas

Dari tiap-tiap variabel independen yang digunakan telah memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap variabel independen yang digunakan pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.

Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari probabilitas pada hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada masing-masing variabel berada di atas alpha 0,05 yang berarti masing-masing variabel penelitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 1: Hasil Pengujian Normalitas (Sebelum Normal) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	ETR	PDKI	KLT	KMT	ROA	RISK
Kolmogorov-Smirnov Z	2,083	3,602	4,875	5,198	1,738	2,545
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 2: Hasil Pengujian Normalitas Setelah Transform Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Ln_ETR	Ln_PDKI	KLT	Ln_KMT	Ln_ROA	Ln_RISK
Kolmogorov-Smirnov Z	0,992	3,791	4,875	4,989	1,058	1,308
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,278	0,070	0,000	0,000	0,213	0,065

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 3: Hasil Pengujian Normalitas (Sesudah Normal) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	<i>unstandardized residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Z	0,992
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,278

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 4: Hasil Pengujian Multikolinearitas

	Ln_PDKI	KLT	Ln_KMT	Ln_ROA	Ln_RISK
Tolerance	0,875	0,919	0,990	0,457	0,440
VIF	1,143	1,088	1,010	2,188	2,273

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 5: Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

	Ln_PDKI	KLT	Ln_KMT	Ln_ROA	Ln_RISK
Sig.	0,091	0,052	0,322	0,987	0,844

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 6: Pengujian Autokorelasi

Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-watson
1	0,719 ^a	0,517	0,495	0,41574	1,961

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Tabel 7: Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Unstandardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-4,151	1,254		-3,310	0,001
Ln_PDKI	-2,72	0,171	-0,114	-1,589	0,115
KLT	0,70	0,091	0,054	0,769	0,444
Ln_KMT	-0,015	0,229	-0,004	-0,065	0,948
Ln_ROA	-0,736	0,078	-0,928	9,380	0,000
Ln_RISK	-0,356	0,098	0,365	3,618	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Ujia utokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah sebesar 1,961. Hasil yang diperoleh pada pengolahan data menunjukkan hasil $1,792 < 1,961 < 2,208$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang akan dibentuk tidak terdeteksi gejala autokorelasi sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi yaitu suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2013).

Model yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari dua persamaan regresi yang akan

digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen dan masing-masing variabel dependen. Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 7. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$ETR = -4,151 - 0,272 PDKI + 0,070 KLT - 0,015 KMT - 0,735 ROA + 0,356 RISK + e$$

Keterangan:

ETR = *Tax Avoidance*

β_0 = Konstanta

$\beta_1-\beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris

KLT = Kualitas Audit

KMT = Komite Audit

ROA = *Return on Assets*

RISK = Karakter Eksekutif

e = *error*

Pengujian Hipotesis

Tabel 8: Tabel Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-4,151	1,254		-3,310	0,001
Ln_PDKI	-0,272	0,171	-0,114	-1,589	0,115
KLT	0,070	0,091	0,054	0,769	0,444
Ln_KMT	-0,015	0,229	-0,004	-0,065	0,948
Ln_ROA	-0,736	0,078	-0,928	-9,380	0,000
Ln_RISK	0,356	0,098	0,365	3,618	0,000
R Square				0,517	
Adjusted R Square				0,495	
F				23,145	
Sig.				0,000 ^a	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan dari tabel 8, besarnya pengaruh proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,495. Artinya variabel proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 49,5% sisanya sebesar 50,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji F Statistik

Nilai f Statistik pada pengujian ini adalah sebesar 23,145 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi, kerangka penelitian atau model penelitian dapat diterima (Fit).

Uji t Statistik

Hasil uji t statistic dapat dilihat pada tabel pengujian hipotesis di atas. Berikut hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien negatif dengan nilai -1,589 dan nilai probabilitas 0,115 (lebih besar dari 0,05). Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $0,115 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien regresi

positif dengan nilai 0,769 dan nilai probabilitas adalah 0,444 (lebih besar dari 0,05). Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $0,444 > \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa komite audit memiliki nilai koefisien regresi negatif dengan nilai -0,065 dan nilai probabilitas adalah 0,948 (lebih besar dari 0,05). Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,948 > \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel ROA memiliki nilai koefisien regresi negatif dengan nilai -9,380 dan nilai probabilitas adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $0,000 < \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel karakter eksekutif memiliki nilai koefisien regresi positif dengan nilai 3,618 dan nilai probabilitas adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang merupakan pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal itu disebabkan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer. 2) Ditemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. 3) Ditemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik. 4) Ditemukan bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak. 5) Ditemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih banyak memiliki kekurangan atau kelemahan, kondisi tersebut dikarenakan adanya sejumlah keterbatasan yang peneliti miliki. Secara umum keterbatasan tersebut adalah: 1) Penelitian ini hanya menggunakan data dengan jangka waktu pengamatan selama 3 tahun. Disarankan agar penelitian selanjutnya menambah jangka waktu pengamatan agar hasil yang didapatkan bias lebih akurat dan lebih efisien. 2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga

proksi dari CG dan satu dari profitabilitas serta satu dari risiko perusahaannya karakter eksekutif. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan ataupun menambah proksi-proksi lain dari CG dan profitabilitas. 3) Penelitian ini hanya menggunakan sektor *property, real estate, dan building construction*. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perusahaan di sektor-sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8 (2): 95-189.
- Berpotensi Lakukan Penghindaran Pajak 40% Pengembang Real Estate Perlu Diperiksa* 2015. www.finance.detik.com (accessed April 27, 2015).
- Budiman, J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). Skripsi., Universitas Islam Sultan Agung.
- Desai, M. A, dan D. Dharmapala. 2005. Corporate tax avoidance and firm value. *Journal of Financial Economics* 91 (3): 537-546.
- Dewi, N.Y.K, dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (2): 249-260.
- Dirjen Pajak. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance> (diakses 27 Maret 2015).
- Dyreg, S. D., M. Hanlon, dan E.L. Maydew. 2010. The Effect of executive on corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 85 (14): 1163-1189.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* 21.

- Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Lewellen, K. 2006. Financing decisions when managers are risk averse. *Journal of Financial Economics* 82 (3): 551-89.
- Low, A. 2009. Managerial risk taking behavior and equity-based compensation. *Journal of Financial Economics* 92 (3): 470-90.
- Maharani, I. G. A., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (2): 525-539.
- Mangoting, Y. 1999. Tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (1): 43-53.
- Meilinda, M., dan N. Cahyonowati. 2013. Pengaruh corporate governance terhadap pajak. *Journal of Accounting* 2 (3): 559-571.
- Pohan, H. T. 2009. Analisis pengaruh kepemilikan institusi, ratio Tobin Q, akrual pilihan, tarif efektif pajak dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* 4 (2): 113-135
- Prakosa, K. B. 2014. *Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia*. SNA 17 Mataram, Lombok.
- Pranata, F. M. 2014. Pengaruh karakter eksekutif dan corporate governance terhadap tax avoidance. Skripsi., Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sekaran, U. 2011. *Research methods for bussines*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Winata, F. 2014. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Tax & Accounting Review* 4 (1): 1-11.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP NIAT PINDAH KERJA: PENGUJIAN EFEK MEDIASI INSTRUMEN PROMOSI DAN PRESTASI KERJA

Mentari Maghfirani Riyadi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

e-mail: mentari.maghfirani8@gmail.com

Mahmudi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

e-mail: mah_mudi2001@yahoo.com

Abstract

This paper examines the effect of distributive justice on turnover intention by introducing promotion instrumentality as mediating variable and job performance as moderating and mediating variable. This study is motivated by the increasing number of employees turnover, particularly in banking industries. We conducted on-line survey toward 139 employees in banking industries in Indonesia. Based on the result of regression analysis, this research found that (1) distributive justice has a positive association with promotion instrumentality, which, in turn promotion instrumentality has a negative influence on turnover intention, (2) The effect of promotion instrumentality on turnover intention is moderated by job performance, (3) distributive justice has a positive effect on job performance, and (4) job performance has a negative effect on turnover intention. However, based on path analysis the association of distributive justice on turnover intention tend to have direct effect which is not mediated by promotion instrumentality and job performance.

Keywords: *Distributive Justice, Promotion Instrumentality, Job Performance, Turnover Intention.*
<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art2>

Abstrak

Paper ini menguji pengaruh keadilan distributif terhadap niat pindah kerja dengan memasukkan instrumen promosi sebagai variabel mediasi dan prestasi kerja sebagai variabel moderasi dan mediasi. Penelitian ini dimotivasi oleh adanya tingkat perpindahan kerja karyawan yang semakin tinggi, khususnya di industri perbankan. Kami melakukan survey secara on-line terhadap 139 karyawan perusahaan perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian ini menemukan bukti bahwa (1) keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap instrumen promosi, selanjutnya instrumen promosi berpengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja, (2) prestasi kerja memoderasi pengaruh instrumen promosi terhadap niat pindah kerja, (3) keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja, dan (4) prestasi kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Namun, berdasarkan analisis jalur, pengaruh keadilan distributif terhadap niat pindah kerja cenderung berpengaruh langsung yang tidak dimediasi oleh instrumen promosi maupun prestasi kerja.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Instrumen Promosi, Prestasi Kerja, Niat Pindah Kerja.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh keadilan distributif terhadap niat pindah kerja karyawan. Dalam penelitian ini juga diinvestigasi apakah instrumen promosi

memediasi hubungan keadilan distributif terhadap niat pindah kerja. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji peran mediasi dan moderasi variabel kinerja dalam mekanisme perpindahan kerja. Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Parker,

Nouri, dan Hayes (2011) yang menemukan bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh positif terhadap instrumen promosi, dan instrumen promosi berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kinerja (*job performance*) memoderasi hubungan antara instrumen promosi dan niat pindah kerja. Parker, Nouri, dan Hayes (2011) tidak menguji pengaruh keadilan distributif terhadap prestasi kerja dan pengaruh prestasi kerja terhadap niat pindah kerja. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan Nasurdin dan Khuan (2007) yang meneliti karyawan industri komunikasi di Malaysia membuktikan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya berdasarkan penelitian Zimmerman dan Darnold (2007) ditemukan bahwa kinerja karyawan berpengaruh terhadap niat pindah kerja. Dalam penelitian ini diuji apakah variabel prestasi kinerja memediasi antara keadilan distributif terhadap niat pindah kerja. Penelitian ini juga ingin menguji peran prestasi kerja sebagai variabel moderasi antara instrumen promosi dan niat pindah kerja sebagaimana dilakukan Parker, Nouri, dan Hayes (2011).

Perpindahan kerja adalah salah satu perilaku karyawan yang seringkali menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Dengan tingginya tingkat perpindahan kerja pada perusahaan maka akan menimbulkan berbagai potensi biaya, antara lain biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang dikorbankan, maupun biaya rekrutmen dan pelatihan kembali (Toly 2001). Adakalanya perpindahan kerja memiliki dampak positif bagi perusahaan. Dampak positifnya perusahaan tidak berkewajiban memberikan biaya tambahan baik berupa pesangon, tunjangan hari tua, dan kenaikan gaji. Selain itu perusahaan merasa diuntungkan jika perpindahan kerja digunakan sebagai kesempatan promosi bagi karyawan yang lain dalam organisasi yang sama (Sidartha dan Margaretha 2011). Hasil survey yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2006-2007 oleh *Managing Consultant* PT. Watson Wyatt Indonesia menunjukkan tingkat perpindahan kerja untuk

posisi-posisi penting (level manajerial atas) di industri perbankan adalah sebesar 6,3% - 7,5%. Sedangkan tingkat perpindahan karyawan industri pada umumnya hanya berkisar 0,1% - 0,74% (Ridlo 2012).

Melihat bahwa tingkat perpindahan kerja yang tinggi lebih berpotensi menimbulkan dampak negatif, maka penting untuk diketahui faktor apa yang memengaruhi niat perpindahan kerja karyawan. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji beberapa faktor yang memengaruhi perpindahan kerja, antara lain mentoring (Scandura dan Viator 1994), tatanan kerja fleksibel (Almer dan Kaplan 2002), gender (Dalton, Hill, Ramsay 1997), konflik kerja-keluarga (Pasewark dan Viator 2006), karakteristik personalitas (Harrel dan Eickhoff 1988) tekanan dan kelelahan kerja (Fogarty, Singh, Rhoads, dan Moore 2000), keadilan organisasi dan instrumen promosi (Parker *et al.* 2011; Parker dan Kohlmeyer 2005).

Penelitian yang menguji pengaruh keadilan organisasi terhadap perpindahan kerja belum banyak dilakukan. Penelitian empiris yang menguji pengaruh keadilan organisasi terhadap perpindahan kerja pernah dilakukan antara lain oleh Alexander dan Ruderman (1987), Parker dan Kohlmeyer (2005) serta Parker *et al.* (2011). Penelitian survei yang dilakukan Alexander dan Ruderman (1987) terhadap 2.800 pegawai pemerintah federal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kepercayaan pada manajemen, niat pindah kerja, penilaian terhadap supervisor, konflik/harmoni, dan kepuasan kerja. Penelitian Parker dan Kohlmeyer (2005) menguji pengaruh keadilan organisasi terhadap perpindahan kerja di perusahaan Kantor Akuntan Publik di Amerika Serikat. Sementara itu, penelitian Parker *et al.* (2011) menambahkan variabel instrumen promosi yang memediasi hubungan antara keadilan organisasi terhadap perpindahan kerja. Penelitian Parker *et al.* (2011) juga menguji peran variabel kinerja sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara instrumen promosi terhadap perpindahan kerja. Penelitian mereka

dilakukan di perusahaan Kantor Akuntan Publik di Amerika Serikat. Penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan Parker *et al.* (2011) dengan menguji peran variabel kinerja sebagai variabel mediasi-moderasi dalam model penelitian Parker *et al.* (2011) yang belum diuji. Responden penelitian diambil dari karyawan yang bekerja di perusahaan perbankan di Indonesia.

Peneliti ini menggunakan keadilan distributif untuk memprediksi niat pindah kerja karyawan. Keadilan distributif adalah persepsi karyawan atas keadilan dalam perusahaan atas dasar hasil (misal: gaji, bonus, promosi, dan jabatan) yang mereka terima (Greenberg 1990; Holtz dan Harold 2009). Dalam penelitian ini diuji apakah keadilan distribusi memengaruhi instrumen promosi, selanjutnya apakah instrumen promosi memengaruhi niat pindah kerja. Selain itu juga diuji apakah keadilan distributif memengaruhi kinerja karyawan, selanjutnya apakah kinerja karyawan memengaruhi niat pindah kerja. Apakah kinerja karyawan memoderasi hubungan instrumen promosi terhadap niat pindah kerja. Berdasarkan hasil survei terhadap 139 karyawan bank di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap instrumen promosi. Instrumen promosi berpengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan selanjutnya kinerja karyawan berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja. Ditemukan bukti empiris bahwa kinerja karyawan memoderasi hubungan antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori keadilan organisasi dengan memberikan bukti empiris peran keadilan distributif dan instrumen promosi terhadap niat pindah kerja. Kontribusi praktis penelitian ini adalah penelitian ini memberikan informasi bagi manajemen perlunya perusahaan mengimplementasikan sistem insentif yang adil sebagai salah satu alat pengendalian mana-

jemen yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat perpindahan kerja karyawan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Keadilan Distributif dan Instrumen Promosi

Keadilan distributif dalam kinerja organisasi adalah “keyakinan akan keadilan hasil yang diterima oleh masing-masing karyawan dalam organisasi (Folger dan Cropanzano 1998). Rawls (2005) menyatakan bahwa berdasarkan teori keadilan (*justice theory*), karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang sama. Karyawan menggunakan usaha, kemampuan dan pengalaman untuk mendapatkan imbalan/penghargaan yang berupa gaji dan promosi. Leventhal (1976), menyatakan bahwa berdasarkan teori ekuitas (*equity theory*) setiap individu dalam organisasi (karyawan) harus mendapat penghargaan dari organisasi sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah mereka berikan pada organisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan keadilan distributif berhubungan dengan instrumen promosi (Dubinsky dan Levy 1989). Penelitian Parker *et al* (2011) memberikan bukti empiris terdapat pengaruh positif signifikan antara keadilan distributif dan instrumen promosi. Dubinsky dan Levy (1989) menemukan bukti bahwa jika karyawan merasa penghargaan organisasi dijalankan secara adil (keadilan distributif tinggi), karyawan akan meyakini bahwa organisasi tersebut memiliki instrumen promosi yang tinggi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian empiris tersebut, hipotesis 1 penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap instrumen promosi

Instrumen Promosi dan Niat Pindah Kerja

Dalam mempertahankan dan meningkatkan produktifitas karyawan, perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan karyawannya, baik kebutuhan materil maupun non materil. Wujud dari perhatian, usaha serta dorongan yang dapat diberikan perusahaan untuk mempertahankan karyawannya adalah dengan mem-

berikan promosi jabatan yang objektif dan adil serta penempatan yang tepat. Shun (2011) menyatakan bahwa faktor utama penyebab karyawan memiliki keinginan berpindah kerja adalah ketidakadilan perusahaan dalam gaji dan promosi. Mathis dan Jackson (2002) mengidentifikasi bahwa keluar-masuknya (*turnover*) karyawan berhubungan dengan ketidakadilan kerja (penerimaan gaji dan kesempatan promosi). Berdasarkan teori keadilan (*justice theory*) (Rawls 2005), setiap karyawan yang ada dalam perusahaan memiliki hak dan kesempatan yang sama besar untuk bisa mendapatkan promosi. Teori keadilan menyatakan bahwa hasrat alami manusia adalah untuk mencapai kepentingan pribadinya terlebih dahulu lalu mencapai kepentingan umum. Hasrat pencapaian kepentingan pribadi adalah suatu kebahagiaan yang merupakan ukuran pencapaian keadilan (Rawls 2005). Mendapatkan kesempatan promosi dari perusahaan merupakan suatu bentuk pencapaian yang baik untuk karyawan. Untuk itu, semakin tinggi kesempatan promosi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan menurunkan keinginan pindah kerja dan begitu sebaliknya (Parker *et al.* 2011). Penelitian Parker *et al.* (2011) memberikan bukti empiris bahwa instrumen promosi berpengaruh negatif terhadap keinginan pindah kerja. Hipotesis 2 penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Instrumen promosi berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja

Penelitian ini selain bertujuan untuk menguji pengaruh instrumen promosi terhadap niat pindah kerja (H₂), juga ingin menguji peran kinerja sebagai variabel yang memoderasi hubungan instrumen promosi terhadap niat pindah kerja karyawan. Apakah kinerja karyawan akan memperkuat atau memperlemah keinginan pindah kerja ketika terdapat instrumen promosi. Jika karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik namun hanya menerima instrumen promosi yang rendah, maka karyawan tersebut cenderung akan meninggalkan organisasi karena mereka merasa prestasi kerja yang baik tidak dihargai oleh

organisasi. Berdasarkan hal tersebut, mereka akan berusaha untuk mencari organisasi yang akan lebih menghargai kinerja mereka dengan sebuah promosi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki kinerja yang rendah (Parker *et al.* 2011). Teori keadilan menyatakan bahwa siapapun bisa mendapatkan instrumen promosi tersebut. Dengan demikian, karyawan merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan harapan karyawan akan memperoleh imbalan, salah satunya promosi jabatan yang telah disediakan oleh perusahaan (Vroom 1964). Jika karyawan memiliki kinerja yang tinggi dan perusahaan menyediakan instrumen promosi yang baik, maka keinginan pindah kerja akan turun. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis 3 penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Prestasi kerja karyawan memoderasi hubungan antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja. Hubungan terbalik antara instrumen promosi dan niat pindah kerja akan lebih kuat dengan prestasi kerja karyawan yang baik dibandingkan dengan prestasi kerja yang buruk.

Keadilan Distributif dan Kinerja

Keadilan distributif adalah penilaian karyawan mengenai keadilan atas hasil yang diterima karyawan dari organisasi (Greenberg 1990). Tujuan keadilan distribusi ini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya ekonomi atau keuntungan. Keadilan distribusi dalam organisasi dapat menimbulkan kepuasan yang berdampak pada peningkatan prestasi kerja karyawan (Deutsch 1975). Semakin baik keadilan distributif dijalankan, maka akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keadilan distributif memengaruhi kinerja (Cropanzano dan Greenberg 1997; Nasurdin dan Khuan 2007). Penelitian Rupp dan Cropanzano (2002) menunjukkan bahwa individu akan menampilkan tingkat kinerja dan tingkat komitmen yang lebih tinggi, peningkatan kepuasan, dan peningkatan tingkat kepercayaan ketika mereka merasa bahwa proses pengambilan keputusan adil, dan mereka diperlakukan dengan adil (Rupp dan

Cropanzano 2002). Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis 4 penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₄: Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap prestasi kerja (job performance)

Kinerja dan Niat Pindah Kerja

Prestasi kerja yang baik akan berdampak secara negatif terhadap *turnover intention*. Hal itu karena karyawan cenderung akan lebih merasa nyaman bekerja dalam perusahaan yang memotivasi karyawannya untuk menghasilkan kinerja atau prestasi kerja (Lee dan Mitchell 1994). Jika sebuah organisasi tidak dapat memotivasi karyawannya untuk meningkatkan kemampuan, maka pengetahuan dalam organisasi tidak akan dapat dipraktikkan secara maksimal (Vroom 1964). Lee dan Mitchell (1994) menyatakan bahwa perpindahan kerja terjadi karena karyawan menghadapi masalah dalam lingkungan kerja yang menyebabkan mereka untuk berfikir berhenti dari pekerjaan mereka. Masalah tersebut didasari atas penilaian kinerja yang buruk yang merupakan sebuah sinyal bahwa mereka tidak mungkin bisa mendapatkan penghargaan dari perusahaan dan keadaan ini bisa menghasilkan dampak langsung pada keinginan untuk berpindah. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara prestasi kerja terhadap niat pindah kerja karyawan. Lum *et al.* (1998) dan Tett dan Meyer (1993) menemukan semakin tinggi tingkat prestasi kerja seseorang,

maka semakin rendah keinginannya untuk meninggalkan pekerjaannya. Studi lainnya yang dikemukakan Kalbers dan Fogarty (1995) menunjukkan bahwa prestasi kerja dan niat pindah kerja mempunyai hubungan negatif. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 5 penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₅: Prestasi kerja (job performance) berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja

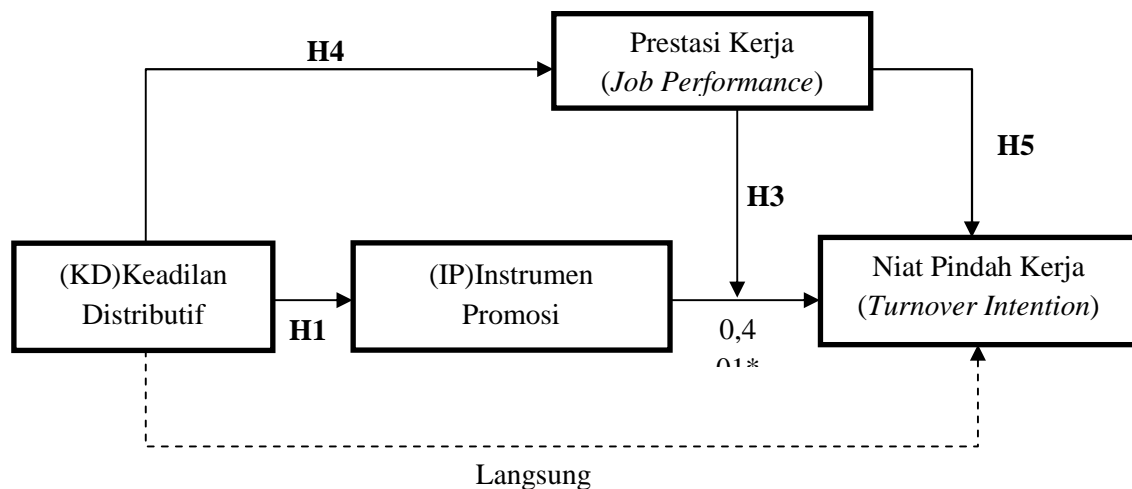
Model Penelitian

Dari penjelasan di atas model penelitian yang dibentuk tersaji pada gambar 1 di bawah.

METODA PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian ini adalah karyawan perusahaan perbankan di Indonesia. Perhitungan jumlah sampel yang digunakan adalah dari Roscoe (1975) yang menyebutkan bahwa ukuran sampel sebaiknya minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan maksimal sebesar 500. Pada penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 4 variabel, maka ukuran sampel minimal sebanyak $10 \times 4 = 40$ responden. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah melalui *snowballing sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat *group* di internet (Hartono 2004).



Gambar 1: Model Penelitian

Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online. Kuesioner dikirimkan ke responden melalui *email* dan lewat situs jaringan (*website*). Kuesioner tersebut ditempatkan dalam sebuah akun dalam *google*, yaitu *google form*. *Google form* merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk keperluan survey menggunakan kuisisioner secara *online*. Dari akun *google form* tersebut peneliti mendapatkan sebuah alamat *website* berupa *link* yang siap untuk disebar. Data diperoleh dengan membagikan *link* kuisisioner *online* tersebut melalui jaringan komunikasi pribadi atau melalui *email* kepada responden yang relevan dengan penelitian. Data hasil survey dari responden akan secara otomatis masuk ke dalam *Ms.excel* setelah responden selesai mengisi kuisisioner *online* tersebut.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Terdapat empat variabel dalam penelitian ini. Variabel dependen penelitian ini adalah niat pindah kerja (*turnover intention*), variabel independen penelitian adalah keadilan distributif, variabel intervening adalah instrumen promosi, dan variabel moderasi sekaligus mediasi adalah kinerja (*job performance*).

Keadilan Distributif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian karyawan mengenai keadilan atas hasil (*outcome*) yang diterima karyawan dari organisasi (Greenberg 1990). Keadilan distributif diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Colquitt (2001). Kuesioner untuk mengukur keadilan distributif berisi empat pertanyaan, seperti "Gaji saya mencerminkan kontribusi saya dalam organisasi." Responden dapat memilih menggunakan skala likert (1 = sangat tidak setuju sampai 7 = sangat setuju).

Instrumen Promosi didefinisikan sebagai adanya kesempatan promosi berupa kenaikan jabatan di dalam suatu organisasi yang melibatkan peningkatan upah, gaji maupun status. Instrumen promosi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan Colquitt (2001). Kuesioner untuk mengukur

instrumen promosi berisi tiga pertanyaan, seperti "Dalam perusahaan saya, jika saya meningkatkan kinerja saya, maka akan menaikkan kesempatan untuk promosi (kenaikan jabatan) bagi saya." Responden dapat menilai dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 7 (sangat setuju).

Kinerja (*Job Performance*) didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Variabel kinerja diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Day dan Silverman (1989). Kuesioner untuk mengukur kinerja berisi enam pertanyaan dengan skala likert yang berkisar antara 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Niat pindah kerja (*Turnover Intention*) didefinisikan sebagai keinginan karyawan untuk berpindah kerja, belum sampai pada tahap realisasi yaitu melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Variabel niat pindah kerja diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh London dan Howat (1978). Kuesioner niat pindah kerja berisi tiga pertanyaan, seperti "Kalau tidak karena situasi yang tak terduga, saya berniat untuk tetap tinggal dengan perusahaan saya saat ini." Skala likert untuk merespon memiliki tujuh skala likert (1 = sangat tidak setuju; 7 = sangat setuju).

Alat Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier untuk pengujian hipotesis 1, 2, 4, dan 5. Tujuan dari regresi ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen serta perbedaan tingkat pengaruhnya (Ghozali 2011). H3 diuji dengan metode MRA (*moderated regression analysis*). MRA merupakan bentuk regresi yang dirancang secara hirarki untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *link* kuisisioner yang disebar secara *online*, data yang masuk sebanyak 154

responden, namun tidak seluruhnya dapat dipakai untuk perhitungan statistik karena sebanyak 15 responden dinyatakan tidak sesuai dengan karakteristik sampel yang digunakan. Data yang dapat diolah secara statistik sejumlah 139 responden karyawan industri perbankan. Jumlah responden menurut jenis kelamin cukup berimbang, yaitu laki-laki sebanyak 71 dan perempuan 68. Usia mayoritas responden relatif masih muda, sebanyak 79,8% berusia di bawah 30 tahun. Sebagian besar responden memiliki masa kerja kurang dari lima tahun (82%). Sementara itu jika dilihat dari jabatan mereka dalam organisasi, responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki posisi sebagai staf (64,%). Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa penilaian responden terhadap keadilan distribusi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,6583 dengan deviasi standar sebesar 1,55955, termasuk dalam penilaian yang tinggi, karena di atas nilai tengah (4). Hasil penilaian responden terhadap instrumen promosi memiliki nilai rata-rata sebesar 5,3812 (deviasi standar 1,38468; median 4). Penilaian responden terhadap prestasi kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 3,9532 (deviasi standar 0,68398; median 3). Hasil penilaian responden terhadap niat pindah kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 3,9544 (deviasi standar 1,70526; median 4). Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan kesahihan suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan rumus *Product Moment Pearson*, yaitu mengkorelasikan skor butir pernyataan dalam angket dengan skor komposit/faktor butir-

butirnya. Suatu instrumen dapat dinyatakan valid jika koefisien korelasi > r tabel. Berpedoman pada sampel sebanyak 139 orang, pada level signifikan 5% dengan pengujian satu arah (*one tail*), diperoleh nilai r tabel sebesar 0,139. Hasil pengujian validitas menunjukkan koefisien korelasi instrumen berkisar dari 0,784 – 0,971. Koefisien korelasi semua butir dengan skor total nilainya lebih besar dari nilai r tabel (0.139) sehingga semua butir instrumen pertanyaan dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 1: Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	71	51%
- Perempuan	68	49%
Usia		
- < 25	63	45,3%
- 25 – 30	48	34,5%
- > 30	28	20,1%
Lama Kerja:		
- < 3 th	76	54,7%
- 3 – 5 th	38	27,3%
- > 5 th	25	18,0%
Jabatan:		
- Direktur	1	0,7%
- Assistant Manager	1	0,7%
- Internal Auditor	5	3,6%
- Customer Service	10	7,2%
- HRD	2	1,4%
- Collection	4	2,9%
- Manager	5	3,6%
- Administration	3	2,2%
- Programmer	3	2,2%
- Marketing	1	0,7%
- Secretary	2	1,4%
- Staff	90	64,7%
- Supervisor	10	7,2%
- Teller	2	1,4%

Tabel 2: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
Keadilan Distributif	139	1,00	7,00	4,6583	1,55955
Instrumen Promosi	139	1,67	7,00	5,3812	1,38468
Prestasi Kerja	139	1,17	5,00	3,9532	0,68398
Niat Pindah Kerja	139	1,00	7,00	3,9544	1,70526
Valid N (listwise)	139				

Uji reliabilitas atas instrumen penelitian menunjukkan Cronbach Alpha masing-masing variabel adalah keadilan distributif 0,947, instrumen promosi 0,891, kinerja 0,924, dan niat pindah kerja 0,953. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah memadai.

Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian untuk menguji hipotesis 3 yaitu terkait pengujian pengaruh efek mediasi dari variabel instrumen promosi dan kinerja yang menghubungkan keadilan distributif terhadap niat pindah kerja digunakan analisis jalur. Tabel 3 dan 4 adalah hasil analisis regresi atas variabel penelitian.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap instrumen promosi. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana, koefisien variabel keadilan distributif sebesar 0,516 ($t = 8,369$; $p < 0,01$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif maka instrumen promosi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis pertama didukung.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa instrumen promosi berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja. Berdasarkan hasil uji

regresi diketahui bahwa variabel instrumen promosi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Variabel instrumen promosi memiliki koefisien regresi sebesar -0,401 ($t = -4,031$; $p < 0,01$). Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kesempatan promosi yang semakin tinggi akan menurunkan niat pindah kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian didukung.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa prestasi kerja memoderasi hubungan antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja. Hubungan terbalik antara instrumen promosi dan niat pindah kerja akan lebih kuat apabila karyawan memiliki prestasi kerja yang baik dibandingkan dengan prestasi kerja yang buruk. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa interaksi antara instrumen promosi dengan kinerja mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Hal itu ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,082 ($t = -2,083$; $p < 0,05$). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa hubungan negatif antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja lebih kuat pada karyawan yang memiliki kinerja tinggi dibandingkan karyawan dengan kinerja rendah. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

Tabel 3: Hasil Pengujian Regresi Sederhana

Variabel	Koefisien	t	p
Keadilan Distributif terhadap Instrumen Promosi	0,516	8,369	0,000
Instrumen Promosi terhadap Niat Pindah Kerja	-0,401	-4,031	0,000
Keadilan Distributif terhadap Prestasi Kerja	0,131	3,666	0,000
Prestasi Kerja terhadap Niat Pindah Kerja	-0,874	-4,380	0,000
Keadilan Distributif terhadap Niat Pindah Kerja	-0,398	-4,580	0,000

Tabel 4: Hasil Pengujian Regresi Moderasi

Variabel Dependen: Niat Pindah Kerja	Koefisien	t	p
Konstanta	7,765	6,897	0,000
Instrumen Promosi	-0,073	-0,427	0,670
Prestasi Kinerja	-0,421	-1,560	0,121
Instrumen Promosi x Prestasi Kinerja	-0,082	-2,083	0,039
$R^2 = 0,240$; $p < 0,001$			

Hipotesis keempat menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Hasil uji regresi menunjukkan variabel keadilan distributif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,131 ($t = 3,666$; $p < 0,01$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif maka prestasi kerja karyawan akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis keempat didukung.

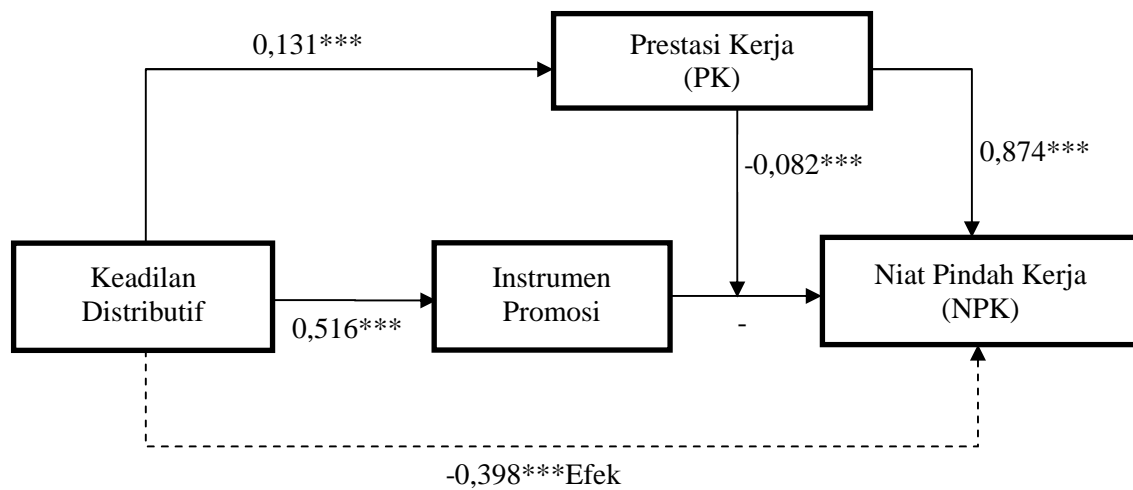
Hipotesis kelima menyatakan bahwa prestasi kerja berpengaruh negatif terhadap niat pindah kerja. Hasil uji regresi menunjukkan variabel prestasi kerja mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Hal itu ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,874$ ($t = -4,380$; $p < 0,01$). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi prestasi kerja karyawan maka

keinginan pindah kerja semakin menurun, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis kelima dapat didukung.

Analisis Jalur

Hasil perhitungan pengaruh langsung (*direct effect*) dan tidak langsung (*indirect effect*) keadilan distributif terhadap niat pindah kerja melalui instrumen promosi dapat ditunjukkan sebagaimana tampak pada gambar 2.

Berdasarkan hasil analisis jalur 1 ditemukan bahwa pengaruh langsung keadilan distributif terhadap niat pindah kerja sebesar $-0,364$ sedangkan pengaruh tidak langsung keadilan distributif melalui instrumen promosi sebesar $-0,190$. Dengan demikian pengaruh langsung lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen promosi tidak memediasi hubungan antara keadilan distributif terhadap niat pindah kerja.



** = $p < 0,05$; *** = $p < 0,001$

Gambar 2: Analisis Jalur

Efek Langsung

Keadilan Distributif → Instrumen Promosi	=	0,582
Instrumen Promosi → Niat Pindah Kerja	=	-0,326
Keadilan Distributif → Niat Pindah Kerja	=	-0,364

Efek Tidak Langsung

Jalur 1: KD → IP → NPK	0,582 x -0,326	=	-0,190
Jalur 2: KD → PK → NPK	0,299 x -0,350	=	-0,105
Efek Tidak Langsung			-0,295
Efek Langsung			-0,364
Efek Total			-0,659

Berdasarkan hasil analisis jalur 2 diketahui bahwa pengaruh tidak langsung keadilan distributif terhadap niat pindah kerja melalui prestasi kerja adalah sebesar -0,105, sedangkan pengaruh langsungnya adalah -0,364. Dengan demikian pengaruh langsung lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, sehingga dapat dinyatakan bahwa prestasi kerja tidak memediasi hubungan antara keadilan distributif terhadap niat pindah kerja. Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel instrumen promosi dan prestasi kerja bukan sebagai variabel pemediasi, karena pengaruh langsung antara keadilan distributif terhadap niat pindah kerja lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya.

Penelitian ini menemukan bahwa keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap niat pindah kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instrumen promosi dan prestasi kerja sebagai variabel mediasi. Berdasarkan analisis pengaruh tidak langsung, variabel prestasi kerja dan instrumen promosi memediasi hubungan antara keadilan distributif terhadap niat pindah kerja. Untuk variabel prestasi kerja, selain berperan memediasi hubungan keadilan distributif terhadap niat pindah kerja, variabel prestasi kerja juga memoderasi hubungan antara instrumen promosi dengan niat pindah kerja. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh keadilan distributif dan instrumen promosi terhadap niat pindah kerja tergantung pada prestasi kerja karyawan. Karyawan yang prestasi kerjanya tinggi namun perusahaan tidak memberikan keadilan distributif serta tidak memiliki instrumen promosi yang baik maka kondisi tersebut akan meningkatkan kecenderungan karyawan meninggalkan perusahaan. Sementara itu bagi karyawan yang prestasi kerjanya rendah, mereka cenderung untuk tidak keluar dari perusahaan karena dengan kinerjanya yang rendah mereka sulit untuk mendapatkan promosi dan tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Karyawan yang meyakini bahwa perusahaan memberikan keadilan distributif juga mempersepsikan per-

usaha tersebut juga akan memberikan instrumen promosi yang adil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif signifikan antara keadilan distributif terhadap instrumen promosi. Adanya pengaruh negatif signifikan antara instrumen promosi dengan niat pindah kerja memberikan arti bahwa semakin tinggi peluang karyawan mendapatkan kesempatan promosi (kenaikan pangkat/jabatan), maka akan mengurangi keinginan keluar dari perusahaan.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa karyawan yang berprestasi tinggi akan melihat apakah perusahaan telah memberikan keadilan distributif dan menyediakan instrumen promosi sebagai pertimbangan mereka tetap bertahan atau akan keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan sangat penting membangun sistem pengendalian manajemen yang menjamin adanya keadilan distributif dan instrumen promosi yang baik untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tidak keluar dari perusahaan. Perusahaan perlu fokus pada usaha mempertahankan karyawan berprestasi tinggi sebab biaya mempertahankan karyawan berprestasi lebih rendah dibandingkan biaya merekrut, melatih, dan mendidik karyawan baru. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Parker *et al* (2011), Zimmerman dan Darnold (2007), serta Kalbers dan Fogarty (1995).

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap instrumen promosi, selanjutnya instrumen promosi berpengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Pengaruh instrumen promosi terhadap niat pindah kerja tergantung pada prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan akan memperkuat pengaruh antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja. Hubungan negatif antara instrumen promosi terhadap niat pindah kerja akan semakin kuat jika prestasi karyawan tinggi dibandingkan jika karyawan memiliki prestasi kerja rendah. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa keadilan distributif

berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja, selanjutnya prestasi kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap niat pindah kerja. Namun berdasarkan hasil analisis jalur, pengaruh keadilan distributif terhadap niat pindah kerja cenderung bersifat langsung tidak dimediasi oleh variabel instrumen promosi dan prestasi kerja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini melibatkan sampel penelitian dalam jumlah terbatas yang diambil dari perusahaan perbankan. Penggunaan sampel pada industri yang berbeda mungkin akan memberikan hasil yang berbeda. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas sampel penelitian. Selain itu perlu diuji pengaruh variabel lain selain keadilan distributif, misalnya keadilan prosedural, keadilan interaksional, dan keadilan informasional.

DAFTAR REFERENSI

- Alexander, S. dan Rudeman, M. 1987. The role of procedural and distributive justice in organizational behavior. *Social Justice Research* 1 (2): 177-198.
- Almer, E., dan S. Kaplan. 2002. The effects of flexible work arrangements on stressors, burnout, and behavioral job outcomes in public accounting. *Behavioral Research in Accounting* 14 (1): 1–34.
- Colquitt, J. 2001. On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology* 86 (3): 386–400.
- Cropanzano, R., dan J. Greenberg. 1997. Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. *International Review of Industrial and Organizational Psychology* 12: 617-372.
- Dalton, D., J. Hill, dan R. Ramsay. 1997. Women as managers and partners: Context specific predictors of turnover in international public accounting firms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 16 (1): 29–50.
- Day, D., dan S. Silverman. 1989. Personality and job performance: Evidence of incremental validity. *Personnel Psychology* 42 (1): 25–36.
- Deutsch, M. 1975. Equity, equality and need: What determine which value will be used as the basis for distributive justice?. *Journal of Social Issue* 31 (3): 137-149.
- Dubinsky, A., dan M. Levy. 1989. Influences of organizational fairness on work outcomes of retail salespeople. *Journal of Retailing* 65 (2): 221–252.
- Fogarty, T., J. Singh, G. Rhoads, dan R. Moore. 2000. Antecedents and consequences of burnout in accounting: Beyond the role stress model. *Behavioral Research in Accounting* 12: 31–67.
- Folger, R., dan R. Cropanzano. 1998. *Organizational justice and human resource management*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi kelima Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenberg, J. 1990. Organizational Justice: Yesterday, today, and tomorrow. *Journal of Management* 16 (2): 399-432.
- Harrell, A., dan R. Eickhoff. 1988. Auditors' influence-orientation and their affective responses to "big eight" work environment. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 7: 105–118.
- Hartono, J. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Holtz, B. C., dan C. M. Harold. 2009. Fair today, fair tomorrow? A Longitudinal investigation of overall justice perceptions. *Journal of Applied Psychology* 94 (5): 1185–1199.
- Kalbers, L., dan T. J. Fogarty. 1995. Professionalism and its consequences: A Study of internal auditors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 14 (1): 65-86.

- Lee, T.W., dan T. R. Mitchell. 1994. An alternative approach: The unfolding model of voluntary employee turnover. *Academy of Management Review* 19 (1): 51-89.
- Leventhal, G. 1976. The Distribution of Rewards and Resources in Groups and Organizations. In *Advances in Experimental Social Psychology* 9: 91-131.
- London, M., dan G. Howat. 1978. The Relationship between commitment and conflict resolution behavior. *Journal of Vocational Behavior* 13 (1): 1-14.
- Lum, L., J. Kervin, K. Clark, F. Reid, dan W. Sirola. 1998. Explaining nursing turnover intent: Job satisfaction, pay satisfaction, or organizational commitment. *Journal of Organizational Behavior* 19 (3): 305- 320.
- Mathis, R. L., dan J. H. Jackson. 2002. (*Human Resource Management*) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasurdin, A. M., dan S. L. Khuan. 2007. Organizational justice as an antecedent of job performance. *Gadjah Mada International Journal of Business* 9 (3): 335-353.
- Parker, R., and J. Kohlmeyer. 2005. Organizational justice and turnover in public accounting firms: A research note. *Accounting, Organizations and Society* 30 (4): 357-369.
- Parker, R. J., H. Nouri, dan A. F. Hayes. 2011. Distributive justice, promotion instrumentality, and turnover intention in public accounting firm. *Behavioral Research in Accounting* 23 (2): 169-186.
- Pasewark, W., dan R. Viator. 2006. Sources of work-family conflict in the accounting profession. *Behavioral Research in Accounting* 18 (1): 147-165.
- Rawls, J. 2005. *A Theory of justice*. Cambridge: Belknap Press.
- Ridlo, I. A. 2012. *Turnover karyawan: Kajian literatur*. Surabaya: PHMovement Publication.
- Rupp, D. E., dan Cropanzano, R. 2002. Multi justice and social exchange relationship. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 89: 925-946.
- Roscoe, J. T. 1975. *Fundamental research statistic for the behavior sciencess*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Scandura, T., dan R. Viator. 1994. Mentoring in public accounting firms: An analysis of mentor-protege relationships, mentorship functions, and protege turnover intentions. *Accounting, Organizations and Society* 19 (8): 717-734.
- Shun, K. 2011. The turnover intentions for construction engineers. *Journal of Marine Science and Technology* 19 (5): 550-556.
- Sidharta, N., dan M. Margaretha. 2011. Dampak komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention; Studi empiris pada karyawan bagian operator di salah satu perusahaan garment di Cimahi. *Jurnal Manajemen* 2 (10): 129-142.
- Tett, R. P., dan J. P. Meyer. 1993. Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings. *Personnel Psychology* 46 (2): 259-293.
- Toly, A. R. 2001. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention pada staf akuntan publik. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3 (2): 102-125.
- Vroom, V. 1964. *Work and motivation*. New York: John Wiley & Sons.
- Zimmerman, R. D., dan C. T. Darnold. 2007. The impact of job performance on employee turnover intentions and the voluntary turnover process. *International Journal of Business and Society* 38 (2): 142-158.

PERILAKU DISFUNGSIONAL PADA SIKLUS PENGANGGARAN PEMERINTAH: TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN

Indrawati Yuhertiana

e-mail: yuhertiana@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Jawa Timur

Soeparlan Pranoto

e-mail: pranoto@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Jawa Timur

Hero Priono

e-mail: heropriono@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is mapping out the dysfunctional behavior that occurs in government budgeting cycle particularly at the stage of budget planning. The study was conducted on 18 proceedings of the Indonesia National Accounting Symposium (SNA), exploring 1,569 articles and focused in 30 selected public sector accounting articles. Content analysis used to identify psychological, sociological and political aspects related dysfunctional behaviors at the planning stage and ratification. It is found that all of aspects explored coincide in the budget planning stage. Pseudo participation found as a formality involvement in budgeting process. It causes the tendency of moral hazard.

Keywords: *dysfunctional behaviour, government budget, content analysis*
<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perilaku disfungsi yang terjadi pada siklus penganggaran pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Penelitian dilakukan pada artikel yang dipublikasikan pada 18 prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Penelitian dilakukan dengan studi literatur pada 1.569 artikel dengan 30 artikel terpilih. Dilakukan analisis konten untuk memetakan dan mengidentifikasi aspek psikologis, sosiologis dan politik terkait perilaku disfungsi pada tahap perencanaan dan ratifikasi. Aspek psikologi, sosiologi, politik dan perilaku disfungsi berhimpitan dalam tahap perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran yang melibatkan masyarakat banyak ditemukan sebagai formalitas semu menyebabkan adanya kecenderungan moral hazard.

Kata kunci: perilaku disfungsi, pemerintah, analisis konten

PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran adalah tahap awal dan paling penting dalam siklus anggaran pemerintah yang terdiri dari tahap perencanaan, ratifikasi, implementasi dan pengawasan. Perencanaan bahkan sudah menjadi kajian menarik di ranah administrasi publik (Dwiputrianti 2012; Helmuth 2011; Sriwigati dan Fitrianto 2012) maupun di ranah akuntansi sektor publik (Arniati dan Kartikaningdyah

2010; Yuhertiana 2005). Perencanaan anggaran pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama, melibatkan banyak pihak atau stakeholder. Penelitian pada tahap ini biasanya menginvestigasi proses penganggaran, partisipatif atau sentralistik.

Belakangan karena perubahan sistem penganggaran era *new public management*. (Bissessar 2010) arah penelitian menuju evaluasi atas jenis penganggaran kinerja (McGill 2001). Hal ini untuk memastikan bahwa

proses penganggaran tidak lagi dilakukan secara inkremental saja tetapi juga sudah memprediksi *outcome* atas input yang direncanakan.

Anggaran juga tidak lepas dari akuntabilitas (Goddard 2004; Rashid dan Goddard 2015). Pada tataran praktik terdapat fenomena yang memprihatinkan karena pada empat siklus penganggaran pemerintah bermunculan perilaku disfungsional misalnya berbagai kasus penyelewengan anggaran (Fakhry dan Said 2014; Sualang dan Utomo 2012) dan keuangan negara. Oportunis dalam proses formulasi anggaran sering juga dijumpai (Abdullah 2012; Abdullah dan Asmara 2006; Sujaie dan Wibawa 2013). Perilaku disfungsional bahkan muncul pada tiap tahap dari empat tahap penganggaran pemerintah. Sejalan dengan itu, Abdullah (2012) memandang bahwa pada setiap tahapan penyusunan anggaran terdapat ruang terjadinya praktik korupsi. Tahap perencanaan terdapat penyimpangan etika karena adanya kecenderungan *mark-up* anggaran/*budgetary slack* agar kinerjanya dianggap baik Yuhertiana (2005). Tahap ratifikasi muncul adanya kolusi antara eksekutif dan legislatif atas program program tertentu untuk kepentingan tertentu, bahkan mafia anggaran akan muncul pada proses ini (Amri dan Priatmojo 2012).

Tahap implementasi anggaran adalah tahap anggaran dilaksanakan. Perilaku disfungsional terjadi juga saat reses (Hendriyanto dan Setiyono 2014). Penyelewengan anggaran pada tahap ini terjadi dengan adanya kolusi antara eksekutif dan pihak swasta khususnya kasus-kasus yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (Aprilia 2013; Kenawas 2013; Rosadi 2013; Situngkir dan Maulana 2013). Tahap pemeriksaan, muncul perilaku disfungsional yang melibatkan pemeriksa internal (Puspasari dan Dewi 2015) dan pemeriksa eksternal (Sudjana dan Sawarjuwono 2006).

Sangat penting untuk memahami penyebab kerugian negara ini dari aspek disfungsional behavior supaya dapat diperoleh penjelasan humanisme untuk menekan kerugian negara. Memahami faktor psikis, alasan

pribadi, and budaya turut mempengaruhi keputusan seseorang dalam keterlibatannya dalam proses penganggaran. Oleh karena itu penelitian ini memiliki target khusus untuk mengembangkan model antisipasi perilaku disfungsional dalam siklus penganggaran pemerintah dalam konteks ilmu akuntansi keperilakuan di sektor publik. Dengan demikian diharapkan bermanfaat untuk mengeksplorasi benih-benih timbulnya perilaku disfungsional yang terjadi pada tahap perencanaan karena adanya indikasi bahwa penyelewengan anggaran (korupsi) bahkan dimulai pada saat perencanaan. Selama ini penelitian untuk menggali perilaku disfungsional khusus pada tahap perencanaan, sebagai tahap persiapan anggaran, khususnya di sektor pemerintahan belum banyak dilakukan.

Penelitian ini mengeksplorasi 18 prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) mulai tahun 1997 sampai dengan 2015. SNA, kegiatan tahunan yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPD) adalah ajang simposium *prestise*, dengan seleksi ketat, dilakukan *blind review* atas seluruh hasil penelitian Perguruan Tinggi di Indonesia. Ketatnya proses review SNA menghasilkan penelitian yang berkualitas sehingga menjadikan SNA sebagai barometer kemajuan penelitian akuntansi di Indonesia. Total artikel adalah 1.587 buah, setelah melalui tiga kali saringan, maka dilakukan eksplorasi mendetil pada 30 artikel terpilih.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Banyaknya permasalahan terkait *white collar criminal* (kejahatan kerah putih) diduga terkait dengan angka, uang, transaksi. Disinilah kemudian ada akuntansi dan perilaku (Balsmeier dan Kelly 1996). Dengan demikian perkembangan akuntansi saat ini tidak lagi berfokus hanya sebagai bahasa bisnis yang hanya berbicara tentang angka melainkan terkait juga dengan faktor kepribadian seseorang, kondisi psikologis, faktor budaya, sampai dengan faktor sosiologi–kemasyarakatan.

Namun demikian sampai saat ini akuntansi keperilakuan masih sering diperdebatkan, benarkah merupakan bagian dalam ilmu akuntansi? Hal ini dapat dimaklumi karena akuntansi masih sering dianggap sebagai ilmu ekonomi yang berada pada ranah sosial positif, bukan ilmu sosial normatif seperti psikologi atau sosiologi. Sehingga masih banyak yang memperdebatkan keberadaan akuntansi keperilakuan sebagai ilmu. Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi ketiga setelah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sisi lain, terdapat anggapan bahwa akuntansi keperilakuan sebagai ilmu namun akuntansi keperilakuan adalah suatu pendekatan yang mengaplikasikan aspek keperilakuan dalam akuntansi baik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen maupun bidang akuntansi lainnya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, minat melakukan penelitian bidang ini makin meningkat dari hari ke hari. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan di realitas menunjukkan dominannya aspek keperilakuan dalam implementasi akuntansi. Hal ini dapat dipahami karena kemajuan perekonomian meningkatkan permintaan berbagai fungsi akuntansi di dalamnya. Siegel dan Marconi (1989) juga mengatakan bahwa *behavioral accounting goes beyond the traditional accounting role of collecting, recording, reporting financial information*.

Dimensi akuntansi keperilakuan terkait dengan aspek perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien. Oleh karena akuntansi keperilakuan merefleksikan dimensi sosial akibat penerapan teknik, sistem akuntansi dimana pada hakekatnya informasi akuntansi dibutuhkan manajemen untuk melakukan pengendalian baik pengendalian manajemen, administratif maupun pengendalian akuntansi. Dengan demikian jelas bahwa wilayah akuntansi keperilakuan meliputi: *1.The effect of human behav.on the design, construction and use of the acc.system, 2.The effect of the acc.system on human behavior, 3.Methods to predict and*

strategies to change human behavior. Dengan demikian, di dalam akuntansi keperilakuan peran ilmu psikologi, sosiologi dan sosial psikologi sangatlah kuat.

Teori Keperilakuan

Teori dasar dalam perilaku, yang terdiri dari bidang sosiologi, sosial-psikologi dan psikologi, sangat mempengaruhi juga dalam perkembangan penelitian dalam membangun akuntansi keperilakuan (Lubis 2010). Perilaku terkait dengan manusia, sehingga ilmu yang terkait dengan manusia ini dibagi dalam mempelajari manusia itu sendiri (psikologi), hubungan manusia dengan manusia lainnya (sosial-psikologi) dan hubungan manusia dengan masalah kemasyarakatan (sosiologi).

Penelitian akuntansi keperilakuan didominasi pada dua landasan konseptual yaitu teori keperilakuan khususnya perilaku organisasi serta teori agensi (*agency theory*) yang mendasarkan pada ilmu ekonomi (Shields dan Young 1993).

Akuntansi Keperilakuan di Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dulu dikenal sebagai akuntansi pemerintahan berkembang pesat pada tahun 2000 sejalan dengan Bergeraknya roda reformasi sektor publik di Indonesia. Tuntutan rakyat akan terlaksananya *good government governance* dan penegakan demokrasi turut memaksa birokrasi untuk mere-inventing kembali organisasinya agar menjadi organisasi yang efisien, efektif dalam memampukan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, penelitian akuntansi keperilakuan pada organisasi publik masih sangat jarang dilakukan namun beberapa mulai bermunculan. Kebanyakan penelitian masih terinspirasi oleh penelitian serupa di organisasi bisnis, misalnya penelitian tentang sistem pengendalian akuntansi yang dihubungkan dengan kinerja dan fenomena *budgetary slack*.

Organisasi sektor publik terdiri dari instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Pada organisasi pemerintahan aspek akuntansi keperilakuan terjadi pada setiap siklus

anggaran. Siklus anggaran pemerintahan terdiri dari tahap perencanaan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan/per-tanggungjawaban (Mardiasmo 2000).

Keperilakuan di Siklus Perencanaan Anggaran

Fase ini merupakan tahap awal bagian dari persiapan anggaran dari keseluruhan siklus anggaran. Perencanaan merupakan tugas utama dari eksekutif sebagai bagian dari tanggungjawab utamanya dalam mengelola negara. Di Indonesia, perencanaan negara diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan. Dalam perencanaan dikenal perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan jangka panjang berjangka waktu 20 tahun dan perencanaan jangka menengah berjangka waktu lima tahun. Pada institusi pemerintahan, badan perencana baik pusat maupun daerah memiliki fungsi strategis karena bertanggungjawab penuh sebagai pemilik tugas pokok dan fungsi. Adapun perencanaan tahunan yang sifatnya jangka pendek memiliki arti lebih strategi lagi karena pada perencanaan tahunan inilah tindakan riil akan direalisasikan atau dieksekusi.

Saat ini terjadi reformasi penganggaran yang mengakibatkan perubahan perilaku di sektor publik. Pada paradigma lama pengelolaan keuangan negara didasarkan *fundamental distrust*, kontrol terhadap input relatif sangat ketat. Hal ini tercermin dari anggaran berdasarkan *line item*, kontrol terhadap komitmen, verifikasi yang ketat terhadap dokumen pembayaran, dan kontrol akuntansi.

Banyak faktor yang mempengaruhi *budgetary slack* termasuk salah satunya adalah faktor budaya. Budaya paternal cukup kuat berpengaruh dalam meningkatkan *budgetary slack*. Berbagai permasalahan di lapangan membuktikan hal itu. Contoh timbulnya polemik atas surat edaran KPK untuk tidak menganggarkan THR dari APBN maupun APBD (Times Indonesia 2015). Dapat dipahami upaya KPK untuk memberantas korupsi melalui himbauan ini. Namun kali ini

tampaknya KPK akan berhadapan dengan budaya yang sudah sangat mengakar. Dalam masyarakat Indonesia momentum hari raya tidak saja sekedar semangat merayakan dengan berbagai hidangan istimewa tetapi ada semangat berbagi di dalamnya. THR yang diperoleh juga digunakan untuk men-THR-i lagi, THR bagi pembantu rumah tangga, loper koran atau juga berbagi angpao saat mudik ke desa. Bahkan bagi seorang pegawai rendah sekalipun turut menyisihkan sejumlah seribuan atau limaribuan bagi sanak saudara. Lebih baik tidak mudik kalau tidak memiliki sesuatu untuk “ninggali”.

Di sisi lain himbauan KPK agar pemberian THR tidak menggunakan dana APBD sebetulnya sama artinya bahwa PNS tidak diperbolehkan menerima THR. Dan kalau ini terjadi maka terdapat perlakuan diskriminasi terhadap tenaga kerja karena pemberian THR juga berlaku di sektor swasta sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Walaupun dalam suratnya dinyatakan bahwa hadiah lebaran dapat diberikan dengan dana yang berasal dari iuran pejabatnya. Hal ini sangat sulit untuk direalisasikan karena gaji maupun tunjangan pejabat PNS masih rendah. Apakah tidak sebaliknya, himbauan ini justru akan mendorong pejabat untuk menerima pemberian dari pihak lain?

Menyikapi perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini terutama pengungkapan kasus korupsi, terdapat indikasi yang kuat bahwa korupsi telah mulai ada bahkan sejak pada proses penyusunan anggaran. Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menyatakan bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat, seperti pernyataannya sebagai berikut: “*Saat ini, menurutnya praktik mafia anggaran antara eksekutif dan oknum-oknum anggota DPR RI yang di-`backing` para pengusaha (dengan imbalan `fee`) sudah sangat memuakkan*”.

Ia berpendapat bahwa praktik mafia anggaran di DPR RI harus segera dihentikan agar tidak semakin merusak tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta proses demokratisasi yang sehat, bermartabat dan beradab.

Isu perilaku dalam aspek ratifikasi anggaran sangat kental dengan nuansa politis. Tarik ulur kepentingan eksekutif dan legislatif sering terjadi, tahapan yang alot sehingga menyebabkan mundurnya jadwal pengesahan APBD. Banyak APBD pemerintah daerah di Indonesia yang mengalami keterlambatan pengesahan. Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri, pada tahun 2008, dari 33 propinsi hanya 22 propinsi yang menyelesaikan APBD tepat pada waktunya. Tentu saja keterlambatan pengesahan ini menyebabkan terganggunya proses penganggaran berikutnya yang lebih krusial, yaitu realisasi mewujudkan berbagai program pembangunan untuk kepentingan rakyat.

Kutipan Waspada online, 14 Januari 2006 memperkuat dugaan terjadinya aspek politis terjadi pada tahap ratifikasi: “Ada beberapa sebab yang membuat RAPBD 2006 menjadi problem politik. Pertama ialah rentetan kepergian Gubsu Tengku Rizal Nurdin karena tragedi Mandala di Padang Bulan. Pengajuan RAPBD 2006 akan mengungkit batang terendam ijazahgate Wagubsu yang sudah hampir tiga tahun berjalan.

Kutipan di atas mengindikasikan keberadaan akuntansi keperiakuan yang menginspirasi beberapa penelitian untuk mengeksplorasinya antara lain yang dilakukan oleh Abdulah dan Asmara (2006) dalam penelitiannya tentang perilaku oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Temuan penting dalam penelitiannya menunjukkan bahwa (1) legislatif berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD, (2) besaran PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif, dan (3) APBD merupakan media bagi terjadinya *political corruption*.

Perilaku Disfungsional

Perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perilaku menyimpang. Dalam konteks psikologi perilaku disfungsional disebut sebagai abnormalitas. Abnormalitas (atau perilaku disfungsional) adalah sesuatu yang menyimpang dari normal atau berbeda dari yang khas, adalah perilaku karakteristik yang ditentukan secara subyektif, diberikan untuk mereka yang

memiliki kondisi langka atau disfungsional (Whitbourne dan Halgin 2014). Beberapa kriteria konvensional abnormalitas: Distress, seseorang yang menampilkan banyak depresi, kecemasan, ketidakbahagiaan akan dianggap sebagai menunjukkan perilaku abnormal karena perilaku mereka muncul karena kesusahannya mereka sendiri. Moralitas, melanggar etika dan melanggar standar masyarakat.

Dalam penelitian akuntansi perilaku disfungsional banyak diteliti pada auditor khususnya akuntan public (Fatimah 2012; Sudjana dan Sawarjuwono 2006; Wilopo 2006). Eksternal auditor adalah salah satu aktor yang terlibat pada tahap keempat siklus penganggaran pemerintah yaitu siklus pemeriksaan keuangan. Banyak aktor terlibat dalam proses penganggaran pemerintah, yaitu eksekutif dalam hal ini pejabat pemerintah, legislatif yaitu anggota parlemen dan pemeriksa. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan perilaku disfungsional pada tahap perencanaan anggaran. Tidak banyak peneliti yang mengeksplor hal ini. Arah riset terkait perilaku disfungsional pada tahap perencanaan lebih mengarah pada fenomena *budgetary slack* dan *oportunistic behaviour*.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan aspek keperiakuan sektor publik khususnya di siklus penganggaran pemerintah sehingga digunakan metode kualitatif meta analysis. Penelitian berbasis teks ini menggunakan analisis konten dengan bantuan software kualitatif Nvivo dan Mind Mapping-Mindjet untuk lebih memudahkan pemetaan komprehensif dengan mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan secara eksploratif memetakan berbagai aspek psikologi, sosiologi, perilaku disfungsional dan aspek politik dalam siklus penganggaran pemerintah.

Sampel penelitian adalah seluruh artikel penelitian yang terbit tahun 1998–2015 di Prosiding Simposium Nasional Akuntansi yang bertopik Akuntansi Sektor Publik. Proses pemilihan sampel disarikan pada tabel 2.

Tabel 1: Jumlah Artikel SNA 1997 – 2015

SNA ke	Tahun	Lokai SNA	Jumlah artikel
1	1997	Yogyakarta	30
2	1999	Malang	34
3	2000	Jakarta	41
4	2001	Bandung	52
5	2002	Semarang	60
6	2003	Surabaya	91
7	2004	Bali	76
8	2005	Surakarta	69
9	2006	Padang	91
10	2007	Makasar	80
11	2008	Pontianak	78
12	2009	Palembang	64
13	2010	Purwokerto	108
14	2011	Banda Aceh	83
15	2012	Banjarmasin	122
16	2013	Manado	225
17	2014	Mataram	172
18	2015	Medan	188

Tabel 2: Proses Pemilihan Sampel

	Jumlah	%	Keterangan
Total artikel dalam SNA I – XVIII	1.589	100%	Artikel
Artikel dengan topik ASP	222	14%	Semua topik ASP
Artikel di wilayah perencanaan	16	1%	Fenomena yang terjadi di perencanaan anggaran, dengan adanya bahasan keperilakuan
Artikel di wilayah ratifikasi	14	0,8%	Fenomena yang terjadi di ratifikasi anggaran, dengan adanya bahasan keperilakuan
Sampel final	30	1,8%	Artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Artikel Akuntansi Sektor Publik kurun waktu 1997–2015

SNA terlahir pada era awal perkembangan penelitian dan pendidikan akuntansi di Indonesia. Pada era 1990an, beberapa dosen dikirim ke luar negeri dalam rangka peningkatan pendidikan akuntansi di Indonesia baik pada jenjang S2 maupun S3 Lulusan dari program belajar inilah yang memotori terselenggaranya kegiatan Simposium Nasional Akuntansi. Pendidikan Akuntansi pada awalnya hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran tentang praktik akuntansi dan sedikit sekali penelitian di bidang akuntansi. Hasil studi beberapa dosen di luar negeri, memberikan pembelajaran tentang pentingnya penelitian di bidang akuntansi untuk mendukung per-

kembangan praktik dan pendidikan akuntansi. Timbullah ide dan keinginan untuk menggalakkan penelitian akuntansi di Indonesia. Kegiatan *conference*/simposium merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan penelitian akuntansi, karena dalam kegiatan tersebut akan dipresentasikan penelitian-penelitian dibidang akuntansi.

Dipelopori oleh Ketua IAI KAPd Bapak Zaki Baridwan dan beberapa dosen akuntansi diselenggarakanlah SNA I di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1997. Sejak tahun tersebut secara rutin SNA diselenggarakan tiap tahun tanpa henti sampai sekarang. Tuan rumah SNA selalu berganti, sehingga kegiatan SNA juga ikut mengenalkan keragaman budaya dan keindahan alam di seluruh tanah air.

Sopannah 2015). Konsep *bottom up budget* memang mengharuskan partisipasi dari masyarakat ketika anggaran pemerintah disusun. Dalam konteks demokrasi, anggaran adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam penganggaran pemerintah di Indonesia keterlibatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Perencanaan Nasional. Pendapat dan keinginan masyarakat Indonesia diwadahi secara formal dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Keikutsertaan masyarakat menjadi perhatian peneliti dikarenakan dua hal. Pertama, adalah isu utama pada konteks penyelenggaraan negara dalam ilmu administrasi negara. Kedua, partisipasi menjadi isu yang dibawa dalam fenomena penelitian keperilakuan anggaran di perusahaan (sektor swasta). Argyris (1974) pertama kali menyatakan bahwa anggaran tidak lagi terkait dengan angka tetapi anggaran juga dapat berdampak terhadap perilaku karyawan. Anggaran yang dibuat pimpinan secara sentralistik membuat karyawan menjadi demotivasi tetapi ketika karyawan dilibatkan maka kinerja perusahaan menjadi semakin baik karena karyawan bersemangat dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Pengaruh *trend* riset keperilakuan di sektor swasta inilah yang banyak dicoba dibuktikan di organisasi pemerintahan oleh para peneliti (Yuhertiana 2005).

Partisipasi adalah bagian dari psikologi. Dikuatkan oleh partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama (Sopannah, 2015).

Faktor Psikologi dalam Perencanaan Anggaran

Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu sendiri, apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Psikologi juga mempelajari bagaimana manu-

sia berinteraksi antar individu atau dalam kelompok-kelompok. Perilaku terkait masalah keuangan dapat dijelaskan melalui teori psikologi. Teori psikologi digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam penelitian akuntansi dan keuangan (Koonce dan Mercer 2005). Psikologi tidak hanya muncul pada perilaku keuangan pada perusahaan swasta, namun psikologi muncul di semua jenis organisasi. di ranah keuangan publik atau keuangan negara, psikologi juga mampu menjelaskan perilaku pembayar pajak, penyelenggara negara maupun legislatif. (McCaffery dan Slemrod 2006).

Penggunaan psikologi dalam ranah penelitian akuntansi dikaitkan oleh motif penggunaannya, kebanyakan terkait dengan penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan dari pemakai akuntansi. Menurut (Koonce dan Mercer 2005) dalam ranah akuntansi teori psikologi yang digunakan biasanya terkait dengan *cognitive psychology* dikarenakan *judgement* dan *decision making* sangat terkait dengan bagaimana seseorang harus mengambil keputusan pada kondisi ketidakpastian dan bagaimana seseorang bersikap atas keputusan yang diambilnya. Pada perkembangannya *cognitive psychology* digantikan oleh *social psychology* karena mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia berperilaku dalam penilaian atau pengambilan keputusan ketika ada pengaruh dari orang lain. *Social psychology* menggunakan teori-teori antara lain *correspondent inference theory*, *covariance theory*, *persuasion theory* dan *biased information theory* (Koonce dan Mercer 2005).

Terkait dengan perencanaan anggaran pemerintahan, keterlibatan masyarakat dalam partisipasi dalam bentuk menyampaikan ide dan keinginan merupakan penjabaran dari proses *bottom-up budgeting*. Sebagai stakeholder utama negara, maka pemerintah wajib mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat. Dalam konteks penganggaran di Indonesia dikenal proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Partisipasi semu ditemukan oleh peneliti parti-

sipasi anggaran (Sopannah 2012; Yuhertiana 2005). Partisipasi semu terjadi karena pemerintah hanya melakukan musrenbang secara seremonial (Sopannah 2015), hanya sebagai pelaksanaan tupoksi tanpa sungguh-sungguh menjadi proses demokrasi yang baik. Secara psikologis, penyebab partisipasi semu disebabkan rasa pesimis akibat seringnya ajuan anggaran tidak diakomodir oleh eksekutif. Masyarakat yang apatis cenderung pesimis dan pasrah menyerahkan proses pembangunan kepada pihak eksekutif. Perilaku-perilaku destruktif ini kalau tidak diantisipasi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi.

Perilaku Disfungsional di Siklus Perencanaan Anggaran

Menurut Garamfalvi (1997), korupsi dapat terjadi pada semua level dalam penganggaran, sejak perencanaan sampai pada pembayaran dana-dana publik. Korupsi secara politis (*political corruption*) terjadi pada fase penyusunan anggaran di saat mana keputusan politik sangat dominan, dengan cara mengalihkan alokasi sumberdaya publik. Sementara korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran disebut korupsi administratif (*administrative corruption*) karena keputusan administrasi lebih dominan. Pada akhirnya korupsi politik akan menyebabkan korupsi administratif. Oportunistik menjadi fokus penelitian terkait perilaku disfungsional pada saat proses perencanaan anggaran (Abdullah 2012).

Oportunis didefinisikan sebagai sebuah aktivitas dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi. Proses penganggaran memberikan peluang terjadinya perilaku oportunistik kepada legislatif karena di dalam proses tersebut, ada interaksi antara legislatif dan eksekutif untuk membahas dan meratifikasi usulan anggaran dari eksekutif. Pada tahap inilah, legislatif memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam anggaran, termasuk *political interest*-nya. Hal inilah yang disebut perilaku oportunistik legislatif (Pariury dan Adi 2015).

Oportunisme dalam hubungan keagenan pada proses penganggaran pemerintah

dijelaskan juga dengan *self-interest* model. Proses penganggaran memberikan peluang terjadinya perilaku oportunistik kepada legislatif karena di dalam proses tersebut, ada interaksi antara legislatif dan eksekutif untuk membahas dan meratifikasi usulan anggaran dari eksekutif. Pada tahap inilah, legislatif memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam anggaran, termasuk *political interest*-nya. Hal inilah yang disebut perilaku oportunistik legislatif

Oportunistik dikaitkan dengan *discretionary power*. Penelitian mengenai perilaku oportunistik legislatif ini sudah pernah dilakukan oleh Abdullah (2006). Dari penelitiannya, diperoleh hasil bahwa legislatif melakukan *political corruption* melalui *discretionary power* yang dimilikinya dalam penganggaran (Pariury dan Adi 2015).

Modus perilaku oportunistik antara lain: berbagai modus perilaku oportunis sering terjadi seperti menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi kembali, sehingga mengarah pada tercapainya anggaran. Titik kepentingan politik masing-masing untuk memenuhi kepentingan diri mereka, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang sangat menguntungkan salah satu pihak ke dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi *fee project* yang cukup besar. Banyak lagi perilaku oportunis yang dilakukan oleh anggota eksekutif serta anggota dewan dalam bentuk yang terselubung seperti melalui proses kompromi yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Jumaidi 2014).

Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. Faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah kekuatan (*power*) dan kemampuan (*ability*). Perilaku oportunistik mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang).

Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat meng-

akibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Proporsi PAD yang rata-rata hanya 10% dari total penerimaan daerah memiliki kecenderungan bertambah saat perubahan anggaran. Hal ini membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Fathony dan Rohman 2011). Berbagai modus perilaku oportunistik sering terjadi seperti menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi kembali, sehingga mengarah pada tercapainya titik kepentingan politik masing-masing untuk memenuhi kepentingan diri mereka, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang sangat menguntungkan salah satu pihak ke dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi *fee project* yang cukup besar. Banyak lagi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh anggota eksekutif serta anggota dewan dalam bentuk yang terselubung seperti melalui proses kompromi yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perilaku oportunistik penyusunan anggaran dapat dikurangi dengan memperbaiki sistem perencanaan, yakni dengan melaksanakan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga perencanaan anggaran lebih transparan dan aspiratif. 2) perilaku oportunistik penyusunan anggaran terjadi karena adanya peluang atau sebagai reaksi terhadap regulasi yang lemah, oleh karena itu perlu disusun regulasi yang lebih tegas dan jelas, misalnya dengan mempublikasikan RAPBD dan APBD secara aspek sosiologi.

Budgetary slack ketika dianggap sebagai sebuah faktor yang tidak beretika

Penelitian untuk mengembangkan model antisipasi perilaku disfungsional pada siklus penganggaran pemerintah ini diawali oleh Yuhertiana (2005) yang menggali fenomena *budgetary slack* pada proses perencanaan anggaran pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada organisasi sektor publik, kentalnya birokrasi, tingginya ketidakpastian, faktor politik

yang dominan mendorong pejabat publik untuk melakukan *budgetary slack*. Penelitian tentang *budgetary slack* di organisasi sektor publik semakin banyak dilakukan akhir-akhir ini. Moore *et al.* (2000) dalam penelitian eksploratorinya menjelaskan bahwa tingkat kesulitan anggaran mempengaruhi kecenderungan untuk menciptakan *slack* (senjangan). Alasan responden menciptakan senjangan berdasarkan wawancara adalah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian akibat karakteristik penganggaran publik, misalnya karena *tightness of budget*, anggaran disusun berdasarkan undang-undang, revisi hanya dimungkinkan setelah adanya proses legalisasi Peraturan Daerah (Perda) yang melibatkan peran legislatif. Proses ini memakan waktu dan sangat birokratis sehingga untuk bisa mengatasi kegiatan yang tidak diprogramkan atau tidak dapat diprogramkan misalnya dana untuk karyawan yang sakit, tunjangan hari raya, bencana alam, responden akan mengajukan anggaran lebih.

Dalam penelitian *budgetary slack*, agency theory banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi. Dalam konteks perilaku disfungsional yang melibatkan antara agent dan principal, ada hubungan kedekatan antara keduanya. "Hasil penelitian ini mendukung anggaran bahwa terdapat masalah keagenan dalam penganggaran daerah, yang terlihat ketika pengusul anggaran dan pemberi persetujuan atas usulan anggaran tersebut memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang kemudian diakomodir dalam anggaran (moral hazard)" (Abdullah dan Junita 2015). Pseudo Budgeting disebut juga *ceremonial budgeting* atau *formalitas budgeting* ditemukan dalam beberapa penelitian. Dalam realitas ini, Wildavsky dan Caiden (2004) mengemukakan bahwa sepiantas tampak bahwa anggaran berpihak pada rakyat, padahal sesungguhnya anggaran tersebut adalah sebuah realitas semu.

Aspek Sosiologi dalam Perencanaan Anggaran

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan menghasilkan orga-

nisasi sosial. Dalam penelitian akuntansi sosiologi terkait dengan akuntansi manajemen (Macintosh dan Quattrone 2010). Jumaidi (2014) mengatakan bahwa perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat, sehingga peningkatan kinerja pengawasan terhadap APBD akan dicapai oleh setiap anggota DPRD jika di dalam dirinya terbentuk suatu nilai budaya, yaitu budaya kesadaran memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena dengan kesadaran tersebut, anggota DPRD akan bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya politik dapat mempengaruhi kinerja anggota dewan. (Jumaidi 2014)

Aspek Politik

Text Query Nvivo terhadap 30 jurnal sampel menemukan kata politik pada 12 artikel. Terbanyak terdapat pada artikel Nuritomo pada SNA 17, Lombok tentang politik dinasti dengan pendekatan kuantitatif. Politik dinasti dapat diartikan secara sederhana sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi kekuasaan atas jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka (Nuritomo dan Rossietta 2014). Data dari Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia. Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya.

Riharjo, Sudarma, Irianto, dan Rosidi (2015) Menjelaskan peran aspek politik secara lebih mendalam dalam hubungan eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan ratifikasi anggaran berdasarkan teori Bourdieu. Ditemukannya bahwa anggaran yang telah ditetapkan melalui proses politik, dihasilkan melalui sistem yang telah didominasi oleh struktur kekuasaan. Dominasi eksekutif didukung oleh keunggulan yang dimiliki, terutama dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan penguasaan terhadap seluruh fungsi peme-

rintahan. Dengan habitus dan modal yang dimiliki, eksekutif memiliki kemampuan untuk mendominasi ranah pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran. Sedangkan peran legislatif dalam politik anggaran, diwujudkan melalui konsensus bersama eksekutif, yang ditentukan oleh kekuatan politik yang mendominasi (Manginte, Sukoharsono, dan Saraswati 2015) mempersandingkan budaya dan politik dalam sebuah pengertian, budaya politik adalah nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam bentuk-norma-norma perilaku yang dimanifestasikan dalam kehidupan berpolitik. (Winarna dan Murni 2007) Latar belakang politik turut menjadi perhatian dan dihubungkan dengan peran anggota dewan dalam fungsi pengawasannya. Ternyata tidak ditemukan pengaruh.

SIMPULAN

Penelitian akuntansi keperilakuan di sektor publik tidak terlepas dari partisipasi. Partisipasi anggaran tetap menjadi perhatian peneliti dalam delapan belas tahun keberadaan SNA, namun terjadi pergeseran paradigma penelitian. Pendekatan kualitatif dengan berbagai metode digunakan untuk mengupas lebih mendalam bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat dalam budaya yang berbeda. Penyebab partisipasi semu tidak disebabkan dominasi eksekutif sendiri dalam hal pengalaman dan pengetahuan tentang “sense berkeperintahan” namun pada beberapa daerah budaya “patuh, manut” menjadi relevan. Partisipasi anggaran menjadi sangat penting karena keterlibatan masyarakat menjadi embrio, mencerminkan sebuah perhatian terhadap “masalah” kemana negara akan dibawa. Lemahnya partisipasi baik dalam partisipasi semu, monolog, formalitas akan memberi peluang timbulnya moral hazard memanfaatkan “kesempatan”. Perilaku oportunistik dalam nuansa budaya politik yang “salah” menyebabkan para aktor dalam penyusunan anggaran, eksekutif dan legislatif menggunakan “*discretionary power*” nya untuk memanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Perilaku ini dapat mendorong terjadinya fraud atau korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Amri, A.B., D. Priatmojo. 2012. *Pengusaha was-was garap proyek pemerintah*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/336748-pengusaha-waswas-garap-proyek-pemerintah> (diakses 14 Maret 2014).
- Aprilia, F. 2013. Pencitraan partai demokrat di harian kompas dan jawa pos dalam pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh komisi pemberantas korupsi (KPK). *Jurnal e-komunikasi* 1 (3): 198-209.
- Argyris, C. 1974. *Behind the front page: Organizational self-renewal in a metropolitan newspaper*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Arniati, I., dan E. Kartikaningdyah. 2010. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen kua-ppas di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang. *Simposium Nasional Akuntansi 13*.
- Balsmeier P., dan J. Kelly. 1996. The Ethic of sentencing white-collar criminals. *Journal of Business Ethics* 15 (2): 143-152.
- Bissessar, A. M. 2010. An institutional review of planning budgeting and monitoring in the Caribbean: Challenges of transformation. *International Journal of Public Sector Management* 23 (1), 22-37.
- Dwiputrianti, S. 2012. *Forging Indonesian public administration through reforming policy in performance auditing for good governance*. Paper presented at the Asia- America-Africa- Australia Public Finance Management Conference "Public Reform For Good Government Governance", Post Graduate Building, UPN "Veteran " Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
- Fakhry, S., dan D. Said. 2014. Budget process pemerintahan daerah: Menelisik nilai kemandaran atas perilaku aktor anggaran. *Jurnal Analisis* 3 (2): 189-194.
- Fatimah, A. 2012. Karakteristik personal auditor sebagai anteseden perilaku disfungsional auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1 (1): 1-12.
- Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11 September. http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/garamfalvi/garamfalvi.html
- Goddard, A. 2004. Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 17 (4): 543-577.
- Helmuth, U. 2011. *The impact of performance budgeting on public management*. Doctor Oeconomiae, University of St. Gallen.
- Hendriyanto, R., dan B. Setiyono. 2014. Analisis akuntabilitas politik reses, Studi tentang kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies* 3 (3): 266-275.
- Jumaidi, L. T. 2014. Perilaku legislatif dalam praktik penganggaran dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal (nilai budaya sasak). *Simposium Nasioanal Akuntansi 17 Mataram*.
- Kenawas, Y. C. 2013. *Reconnecting the missing link: SBY and the democratic*

- party. Nanyang Technological University, Singapore.
- Koonce, L., dan M. Mercer. 2005. Using psychology theories in archival financial accounting research. *McVomb Research Paper Series No ACC-01-05*.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Macintosh, N. B., dan P. Quattrone. 2010. *Management accounting and control systems: An organizational and sociological approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Manginte, S. Y., E. G. Sukoharsono, dan E. Saraswati. 2015. Pengetahuan anggaran serta peran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan budaya politik terhadap pengawasan keuangan anggota DPRD (studi kasus di jayapura). *Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- McCaffery, E. J., dan J. Slemrod. 2006. *Behavioral public finance*. Russell Sage Foundation.
- McGill, R. 2001. Performance budgeting. *International Journal of Public Sector Management* 14 (5): 376-390.
- Moore, W. B., P. J. Poznanski, R. Kelsey. 2000. A path analytic model of municipal budgetary slack behavior. *Proceedings of The American Business and Behavioral Sciences* 7 (1): 29-43.
- Pariury, G. I. O., dan P. H. Adi. 2015. *Political interest legislatif dalam pengalokasian anggaran daerah pada sektor pekerjaan umum (studi pada pemerintah provinsi Maluku)* Paper presented at the International Public Sector Conference, Surabaya.
- Puspasari, N., dan M. K. Dewi. 2015. Pengaruh penalaran moral aparat pengawas internal pemerintah (apip) dan tekanan situasional terhadap kecenderungan melakukan fraud saat mengaudit: Sebuah studi eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Rashid, F., dan A. Goddard. 2015. The development of balanced scorecards in the public sector of Brunei Darussalam: A Grounded theory. *Paper presented at the Comparative International Government Accounting Research, University of Malta, Valeta*.
- Riharjo, I. B., M. Sudarma, G. Irianto, dan Rosidi. 2015. Penganggaran daerah: Konsensus, kekuasaan dan politik anggaran. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Rosadi, D. 2013. Representasi karier politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat pada sampul detik online dan gatra online. Universitas Padjadjaran.
- Shields, M. D., dan S. M. Young. 1993. Antecedents and consequences of participative budgeting: Evidence on the effects of asymmetrical information. *Journal of Management Accounting Research* 5: 265 – 280.
- Siegel, G., dan H. R. Marconi. 1989. *Behaviour accounting*. Chicago: South-Westem Publishing Co.
- Situngkir, H., dan A. Maulana. 2013. Dynamics of the corruption eradication in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Sopannah. 2012. Ceremonial budgeting dalam perencanaan penganggaran daerah: Sebuah keindahan yang menipu. *Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*.
- Sopannah, dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*.
- Sopannah, A. 2015. Dibalik ceremonial budgeting: "Rembug Desa Tengger" partisipasi nyata dalam pembangunan. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.

- Sriwigati, dan A. R. Fitrianto. 2012. *Could new order administration policies in women development and empowerment programs be used as role model for recent programs in Indonesia? (A good practices of women empowerment in Indonesia new order era)*. Paper presented at the Asia- America- Africa- Australia Public Finance Management Conference "Public Reform For Good Government Governance", Post Graduate Building, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
- Sualang, A. N. R., dan W. Utomo. 2012. Inkonsistensi perencanaan dan anggaran (Studi kasus perencanaan dan anggaran di Kabupaten Minahasa Tenggara). Universitas Gadjah Mada.
- Sudjana, E., dan T. Sawarjuwono. 2006. Perilaku disfungsional auditor: Perilaku yang tidak mungkin dihentikan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 8 (3): 247-259.
- Sujaie, A. F., dan S. Wibawa. 2013. *Oportunisme perumus kebijakan anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013: Fenomena dalam pelaksanaan belanja hibah*. Universitas Gadjah Mada.
- Times Indonesia. 2015. *KPK: PNS dilarang minta jatah THR*. <http://www.timesindonesia.co.id/baca/101993/20150707/163559/kpk-pns-dilarang-minta-jatah-thr/> (diakses 14 Juli 2015).
- Whitbourne, S. K., dan R. P. Halgin. 2014. *Abnormal psychology: Clinical perspectives psychological disorders*. 7th Edition. New York: McGraw Hill.
- Wilopo. 2006. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor: Studi pada kantor akuntan publik di Jawa Timur. *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 5 (2).
- Wildavsky, A. B. dan N. Caiden 2004. *The new politics of the budgetary process*. New York: Pearson.
- Winarna, J., dan S. Murni. 2007. Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006). *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Yuhertiana, I. 2005. Kapasitas individu dalam dimensi budaya, keberadaan tekanan sosial dan keterkaitannya dengan budgetary slack (Kajian perilaku eksekutif dalam proses perencanaan anggaran di Jawa Timur). *Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi, Denpasar*.

INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE: SUATU ANALISIS DENGAN FOUR WAY NUMERICAL CODING SYSTEM

Ihyaul Ulum

University of Muhammadiyah Malang

e-mail: ihyaul.ulum5@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the Intellectual Capital Disclosure (ICD) practice of Indonesian banking companies. IC framework used in this study is a modification of IFAC (1998) and Guthrie et al. (1999) with Bapepam-LK regulation number: Kep-431 / BL / 2012. Data were drawn from Indonesian banking companies listed on Indonesia Stock Exchange for three years, 2006, 2009, and 2012. The samples consist of 64 banks. Data analysis was performed through content analysis with weighting/scoring between 0-3, referred to the 'four way numerical coding system'. Overall, the number of ICD in the annual report increased from 2006, 2009, and 2012 except for the components of relational capital (RC) which fluctuated. Viewed from the weight of the disclosure are analyzed with numerical coding system four way, it appears that the majority of IC information disclosed are in the form of a narrative.

Keywords: Intellectual capital disclosure, four way numerical coding system, Indonesian banking companies

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art4>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) praktik perusahaan perbankan di Indonesia. Kerangka IC yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari IFAC (1998) dan Guthrie et al. (1999) dengan nomor Peraturan Bapepam-LK: Kep-431 / BL/2012. Data diambil dari perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun, 2006, 2009, dan 2012. Sampel terdiri dari 64 bank. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan pembobotan/*scoring* antara 0-3, mengacu pada '*four way numerical coding system*'. Secara keseluruhan, jumlah ICD dalam laporan tahunan meningkat dari tahun 2006, 2009, dan 2012 kecuali untuk komponen modal relasional (RC) yang mengalami fluktuasi. Dilihat dari bobot pengungkapan yang dianalisis dengan '*four way numerical coding system*', tampak bahwa sebagian besar informasi IC diungkapkan dalam bentuk narasi.

Kata Kunci: Pengungkapan Modal Intelektual, four way numerical coding system, Perusahaan Perbankan Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000, para akademisi dan praktisi mulai fokus pada persoalan pengungkapan IC (*intellectual capital disclosure* - ICD) perusahaan di dalam laporan tahunannya (lihat misalnya: Guthrie *et al.* 1999; Guthrie dan Petty 2000; Goh dan Lim 2004). Definisi ICD telah diperdebatkan diantara para ahli dalam berbagai literatur (Ulum 2015a).

Guthrie dan Petty (2000) tidak menawarkan definisi ICD secara eksplisit, namun mereka menyinggung adanya fakta bahwa saat ini ICD

memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibanding di masa lalu. Terutama bagi sektor yang mempunyai karakteristik industri dominan yang kemudian mengalami perubahan, seperti dari sektor manufaktur berubah menjadi *high technology*, finansial dan jasa asuransi.

Bukh *et al.* (2001), Petty dan Guthrie (2000), dan Mourtisen *et al.* (2005) mengidentifikasi bahwa literatur IC dalam akuntansi terutama membahas pelaporan eksternal. Hal ini dapat dipahami karena memang pasar modal menginginkan lebih banyak informasi

yang dapat diandalkan terkait dengan sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan, dan pengungkapan IC akan mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian diantara pihak-pihak terkait (Tayles *et al.* 2007). Lebih lanjut, Bukh (2003) menyatakan bahwa pengungkapan perusahaan tentang IC menjadi bagian dari kerangka proses penciptaan nilai (*value creation*) dalam perusahaan.

Kebanyakan literatur mengenai IC di berbagai negara, berfokus pada pengungkapan IC dalam laporan tahunan perusahaan (Guthrie dan Petty 2000; Goh dan Lim 2004). Beberapa studi mengenai upaya untuk menjelaskan perbedaan tingkat pengungkapan IC dalam laporan tahunan (Brennan 2001; April *et al.* 2003; Ulum 2011), namun tidak banyak yang menggunakan uji statistik (Williams 2001; Bontis 2002, Bozzolan *et al.* 2003). Tingkat pengungkapan IC umumnya dinilai menggunakan *content analysis* atas laporan tahunan dari sejumlah kecil sampel (perusahaan).

Mouritsen *et al.* (2001) menyatakan bahwa ICD dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu (kohesif) serta "*true and fair*". Mereka merujuk pada laporan IC yang menunjukkan bahwa banyak dari literatur pengungkapan IC berdasar pada analisis tekstual atas laporan keuangan. Sangat sedikit perusahaan yang membuat laporan IC secara terpisah.

Lebih lanjut, Mouritsen *et al.* (2001) menyatakan bahwa ICD dikomunikasikan untuk *stakeholder* internal dan eksternal yaitu dengan mengkombinasikan laporan berbentuk angka, visualisasi dan naratif yang bertujuan sebagai penciptaan nilai. Bukh *et al.* (2001) juga menegaskan hal senada, bahwa laporan IC dalam prakteknya, mengandung informasi finansial dan non-finansial yang beragam seperti perputaran karyawan, kepuasan kerja, *in-service training*, kepuasan pelanggan, ketepatan pasokan, dan sebagainya.

Pengungkapan IC telah menjadi suatu bentuk komunikasi baru yang mengendalikan "kontrak" antara manajemen dan pekerja. Hal tersebut, memungkinkan manajer untuk mem-

buat strategi-strategi untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* seperti investor, dan untuk meyakinkan *stakeholder* atas keunggulan atau manfaat kebijakan perusahaan (Ulum 2009).

Artikel ini berusaha mengembangkan suatu kerangka kerja ICD yang dibangun dengan cara memodifikasi skema yang dibangun oleh Guthrie *et al.* (1999), yang merupakan pengembangan dari definisi IC yang ditawarkan oleh Sveiby (1997), yang juga digunakan oleh Brennan (2001). Modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa item yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*)

Signaling theory pada dasarnya concern dengan penurunan asimetri informasi di antara dua pihak (Spence 2002). Teori pensinyalan berkaitan dengan bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari asimetri informasi dalam seting sosial. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi jika pihak yang memiliki informasi dapat mengirim sinyal kepada pihak terkait. Sebuah sinyal dapat menjadi suatu tindakan yang dapat diamati, atau struktur yang diamati, yang digunakan untuk menunjukkan karakteristik tersembunyi (atau kualitas) dari signaler tersebut. Pengiriman sinyal biasanya didasarkan pada asumsi bahwa itu harus menguntungkan bagi *signaler* (misalnya menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dari produk dibandingkan dengan pesaingnya) (An *et al.* 2011).

Teori pensinyalan menyatakan bahwa perusahaan berkualitas tinggi akan cenderung memberikan sinyal keunggulan mereka kepada pasar. Pada satu sisi, sinyal akan membuat investor dan pemangku kepentingan yang lain menaikkan nilai perusahaan, dan kemudian membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan (Whiting dan Miller 2008). Sebaliknya, perusahaan-perusahaan dengan kapasitas tidak terlalu bagus akan

cenderung untuk mengungkapkan informasi yang sifatnya memang *mandatory*.

Pengungkapan sukarela informasi IC akan menjadi media yang sangat efektif bagi perusahaan untuk menyampaikan sinyal kualitas superior yang mereka miliki terkait kepemilikan IC yang signifikan untuk penciptaan kesejahteraan di masa yang akan datang (Guthrie dan Petty 2000, Whiting dan Miller 2008). Khususnya bagi mereka yang memiliki basis IC yang kuat, pengungkapan sukarela IC akan membedakan mereka dari perusahaan-perusahaan dengan kualitas yang lebih rendah. Seringkali diyakini bahwa pemberian sinyal tentang atribut IC, misalnya pengungkapan melalui laporan tahunan, akan menghasilkan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Misalnya meningkatnya *image* perusahaan, menarik investor potensial, mengurangi biaya modal, menurunkan volatilitas saham, menciptakan pemahaman tentang produk atau jasa, dan yang lebih penting adalah meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan (Vergauwen dan Alem 2005, Singh dan Van-der-Zahn 2008).

Intellectual Capital

Penelitian tentang IC telah dimulai sejak 1990an (Choong 2008). *Human capital* adalah

fokus utama penelitian tentang IC pada masa itu, dan para peneliti menguji peran ‘*knowledge*’ dalam IC (Santoso 2011). Bahkan, studi tentang *intangible assets* telah dilakukan sejak tahun 1940an, dimulai oleh Davis *et al.* (1940) yang meneliti tentang peran *intangible assets*, seperti *goodwill*, yang merupakan nilai bagi organisasi. Belakangan, Itami dan Roehl (1987) memperkenalkan konsep tentang *intangible assets* sebagai *invisible assets*. *Invisible assets* meliputi sumber daya berbasis informasi seperti *technological knowledge*, *customer knowledge*, dan *market knowledge* (Hall 1992).

IC merupakan salah satu bidang kajian Akuntansi. Hal ini misalnya ditegaskan secara sangat jelas oleh Guthrie *et al.* (2012) yang menggunakan istilah *Intellectual Capital Accounting* (ICA) ketika mereviu 2662 artikel dari 10 jurnal internasional di bidang Akuntansi. Mereka menemukan bahwa 423 dari jumlah artikel tersebut mengkaji tentang ICA (lihat Tabel 2.1). Penegasan yang sama juga dinyatakan oleh Dumay (2014) ketika menghitung jumlah sitasi artikel-artikel IC di *Journal of Intellectual Capital* (JIC) dibandingkan dengan jumlah sitasi artikel yang dimuat pada 19 jurnal internasional lainnya.

Tabel 1: Artikel ICA pada Jurnal Internasional (2000-2009)

Nama Jurnal	Kode Jurnal	Artikel ICA	Total Artikel	% Artikel ICA
Jurnal ‘Specialist’				
Journal of Intellectual Capital	JIC	297	313	94,9%
Journal of Human Resource Costing and Accounting	JHRCA	48	84	57,1%
Total artikel ICA articles pada jurnal ‘specialist’		345	397	86,9%
Jurnal ‘Generalist’				
Accounting Auditing and Accountability Journal	AAAJ	22	337	6,5%
European Accounting Review	EAR	17	288	5,9 %
Accounting Organizations and Society	AOS	11	345	3,2%
Australian Accounting Review	AAR	8	261	3,1%
Management Accounting Research	MAR	5	210	2,4%
Accounting Forum	AF	5	212	2,4%
British Accounting Review	BAR	3	177	1,7%
Critical Perspectives on Accounting	CPA	7	435	1,6%
Total ICA articles in generalist Journals		78	2265	3,4%
Total ICA articles in all Journals		423	2662	15,9%

Sumber: Guthrie *et al.* (2012)

Roos *et al.* (1997) menyatakan bahwa IC meliputi seluruh proses dan aset yang tidak secara normal nampak di neraca dan semua *intangible assets* (*trademarks, patent* dan *brands*) yang menjadi perhatian metode akuntansi modern. Sedangkan Bontis (1998) mengakui bahwa IC adalah *elusive*, namun ketika IC dapat ditemukan dan ‘dieksploitasi’, maka ia akan menjadi sumber daya baru bagi organisasi untuk dapat memenangkan persaingan.

IFAC (1998) mengklasifikasikan IC dalam tiga kategori, yaitu: (1) *Organizational Capital*, (2) *Relational Capital*, dan (3) *Human Capital*. *Organizational Capital* meliputi a) *intellectual property* dan b) *infrastructure assets*

Bontis *et al.* (2000) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: *human capital (HC)*, *structural capital (SC)*, dan *customer capital (CC)*. Menurut Bontis *et al.* (2000), secara sederhana HC merepresen-

tasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi dari *genetic inheritance; education; experience, and attitude* tentang kehidupan dan bisnis.

SC meliputi seluruh *non-human storehouses of knowledge* dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah *database, organizational charts, process manuals, strategies, routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Sedangkan tema utama dari CC adalah pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* dimana suatu organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis (Bontis *et al.* 2000). Sejumlah kajian telah dilakukan untuk menginvestigasi metode penilaian dan pengukuran IC. Tabel 2 merangkum nama-nama metode yang ‘dianggap’ sebagai metode untuk menilai dan mengukur IC.

Tabel 2: Metode Penilaian dan Pengukuran IC

No.	Nama Metode	Penemu/Pengusul	Tahun
1.	Balanced Scorecard	Robert S. Kaplan dan David P. Norton	1992
2.	Calculated Intangible Value	Thomas A. Stewart	1997
		David H. Luthy	1998
3.	Citation-Weighted Patent	Bronwyn H. Hall, Adam B. Jaffe, dan Manuel Trajtenberg	2001
4.	Holistic Value Approach	Göran Roos, J. Roos, Nicola C. Dragonetti, dan Leif Edvinsson	1997
5.	Intellectual Capital Audit	Annie Brooking	1996
6.	Intellectual Capital-Index	Göran Roos	1997
7.	Inclusive Value Methodology	Philip K. M'Pherson dan Stephan Pike	2001
8.	Intangible Asset Monitor	Karl Erik Sveiby	1997
9.	Intangibles Scoreboard	Baruch Lev	1999
10.	Intellectual Capital Benchmarking System	José Maria Viedma	1999, 2001
11.	Intellectual Capital Dynamic Value	Ahmed Bounfour	2002
12.	Intellectual Capital Statements	Jan Mouritsen	2001
13.	iValuing Factor	Ken Standfield	2001
14.	Market-To-Book Ratio	Thomas A. Stewart	1997
15.	Skandia Navigator	Leif Edvinsson dan Michael S. Malone	1997
16.	Sullivan's Work	Patrick H. Sullivan	1998, 2000
17.	Value-Added Intellectual Coefficient (VAIC)	Ante Pulic	1998
18.	Value Chain Scoreboard/ <i>Value Chain Blueprint</i>	Baruch Lev	2001, 2003
19.	Extended VAIC	Jamal A. Nazari dan Irene M. Herremans	2007
20.	iB-VAIC	Ihyaul Ulum	2013

Sumber: Ulum (2015a)

METODA PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan publik sektor perbankan di Indonesia. Industri perbankan dipilih dengan pertimbangan bahwa sektor industri ini sangat ketat regulasinya sehingga cenderung untuk lebih banyak menyajikan informasi ke publik. Selain itu, menurut Firer dan Williams (2003), sektor perbankan merupakan sektor industri yang memiliki insentif IC tinggi. perusahaan terdaftar dan sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tahun pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2006, 2009, dan 2012. Tahun pengamatan tidak berurutan dengan pertimbangan bahwa biasanya informasi dalam laporan tahunan akan relatif tidak banyak berbeda dalam dua tahun yang berdekatan.

Tahun 2006 dipilih karena di tahun 2006 keluar Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 yang mengatur tentang kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan tahunannya. Adanya peraturan ini tentu menjadi motivasi bagi perusahaan publik untuk menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan secara lebih baik, lebih komprehensif, dan lebih informatif daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2009 dipilih sebagai ‘tahun aman’ setelah pada tahun 2008 krisis keuangan melanda beberapa negara di Eropa. Meskipun diyakini bahwa krisis tersebut tidak merambah ke Indonesia, pemilihan tahun 2009 untuk memastikan bahwa pada tahun tersebut pasar modal Indonesia benar-benar ‘sehat’ sehingga harga saham yang terjadi merupakan refleksi dari aktivitas ekonomi. Sementara tahun 2012 dipilih dengan pertimbangan visibilitas data mutakhir yang bisa diakses.

Analisis isi (*content analysis*) dipilih sebaca cara untuk mengidentifikasi ICD di dalam laporan tahunan. Langkah yang dilakukan pada analisis isi dalam penelitian ini menggunakan *interactive model* dari Miles dan Huberman (1994). Model ini mengandung 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan atau reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan dan pengujian atau verifikasi simpulan. *Content analysis* merupakan cara yang paling

tepat untuk menginvestigasi praktik pengungkapan IC oleh perusahaan (Guthrie *et al.* 2004). Pendekatan ini telah digunakan oleh para peneliti untuk mengidentifikasi hal yang sama dengan penelitian ini (lihat misalnya: Guthrie dan Petty 2000, Brennan 2001; Williams 2001; Bozzolan *et al.* 2003, White *et al.* 2007).

Proses identifikasi ICD dilakukan dengan 4 cara sistem kode numerik (*four-way numerical coding system*) yang dikembangkan oleh Guthrie *et al.* (1999). Metode ini tidak hanya mengidentifikasi luas pengungkapan IC dari aspek kuantitas, namun juga kualitas pengungkapannya. Pengungkapan informasi IC dalam laporan tahunan diberi bobot sesuai dengan proyeksinya. Kode numerik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan;
- 1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi;
- 2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik;
- 3 = item diungkapkan dengan nilai moneter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ICD In (*Intellectual Capital Disclosure Indonesia*)

Intellectual Capital Disclosure Indonesia adalah jumlah pengungkapan informasi tentang IC yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. *Intellectual Capital Disclosure Indonesia* adalah hasil modifikasi skema yang dibangun oleh Guthrie *et al.* (1999), yang merupakan pengembangan dari definisi IC yang ditawarkan oleh Sveiby (1997), yang juga digunakan oleh Brennan (2001). Modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa item yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam skema ini, IC dikelompokkan dalam 3 kategori yang terdiri dari 36 item yaitu 3 kategori dan 36 item yang dimaksud adalah sebagai berikut: kategori *human capital* 8 item; *structural capital* 15 item; dan *relational capital* 13 item, 15 diantaranya adalah item modifikasi, diberi kode (M).

Modifikasi ini dilakukan karena beberapa item dalam *IFAC (1998)* dan *Guthrie et al. (1999)* cenderung merupakan pengulangan dan atau penekanan lebih lanjut dari item yang lain. Misalnya, pada komponen *human capital (employee competence)* terdapat item tentang *work-related knowledge* dan *work-related competences* yang sesungguhnya merupakan bagian lebih lanjut dari item ‘pengetahuan karyawan’. Keputusan Ketua Bapepam dan

LK Nomor: Kep-431/BL/2012 yang dijadikan dasar dalam melakukan modifikasi merupakan dasar bagi emiten dalam menyusun laporan tahunan, sehingga modifikasi ini sesungguhnya merupakan penyesuaian ICD dengan versi Indonesia.

Tabel 3 menyajikan daftar komponen IC dalam *framework* ICD-In yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3: Komponen ICD 36 Item, Skala, dan Skor Kumulatif

Kategori	Item Pengungkapan	Skala	Skor Kumulatif
<i>Human Capital</i>	Jumlah karyawan (M)	0–2	2
	Level Pendidikan	0–2	4
	Kualifikasi karyawan	0–2	6
	Pengetahuan karyawan	0–1	7
	Kompetensi karyawan	0–1	8
	Pendidikan & pelatihan (M)	0–2	10
	Jenis pelatihan terkait (M)	0–2	12
	<i>Turnover</i> karyawan (M)	0–2	14
<i>Structural Capital</i>	Visi misi (M)	0–1	15
	Kode etik (M)	0–1	16
	Hak paten	0–2	18
	Hak cipta	0–2	20
	<i>Trademarks</i>	0–2	22
	Filosofi manajemen	0–1	23
	Budaya organisasi	0–1	24
	Proses manajemen	0–1	25
	Sistem informasi	0–2	27
	Sistem jaringan	0–2	29
	<i>Corporate governance</i> (M)	0–3	32
	Sistem pelaporan pelanggaran (M)	0–1	33
	Analisis kinerja keuangan komprehensif (M)	0–3	36
	Kemampuan membayar utang (M)	0–3	39
	Struktur permodalan (M)	0–3	42
<i>Relational Capital</i>	<i>Brand</i>	0–1	43
	Pelanggan	0–2	45
	Loyalitas pelanggan	0–1	46
	Nama perusahaan	0–1	47
	Jaringan distribusi	0–2	49
	Kolaborasi bisnis	0–1	50
	Perjanjian lisensi	0–3	53
	Kontrak-kontrak yang menguntungkan	0–3	56
	Perjanjian Franchise	0–2	58
	Penghargaan (M)	0–2	60
Sertifikasi (M)	0–1	61	
Strategi pemasaran (M)	0–1	62	
Pangsa pasar (M)	0–2	64	

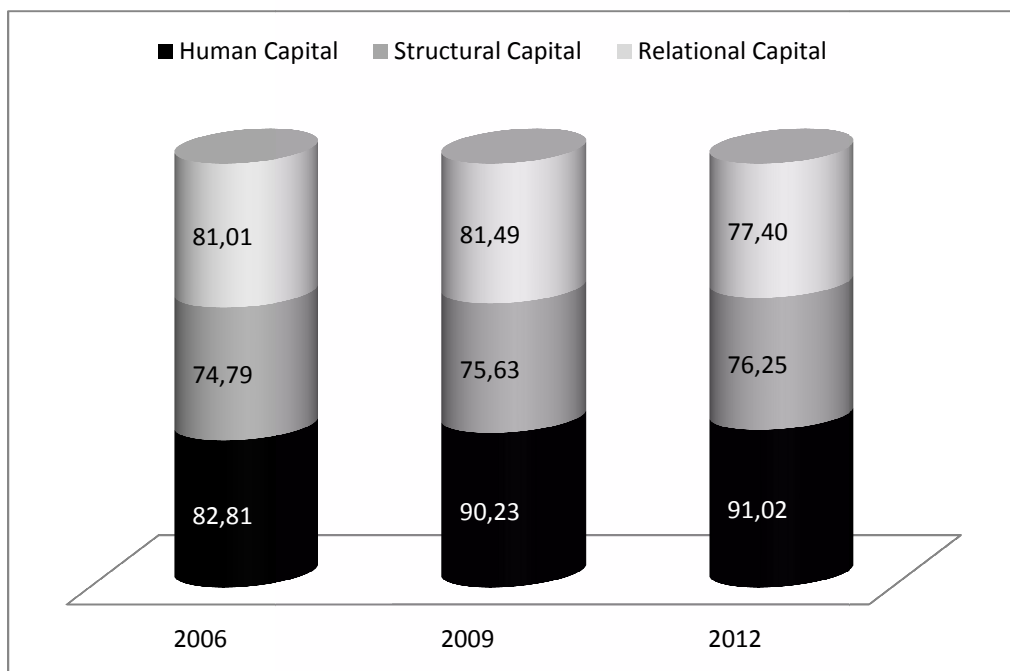
Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi pengungkapan modal intelektual (ICD) di dalam laporan tahunan perusahaan. *Intellectual Capital Disclosure* adalah jumlah pengungkapan informasi tentang IC yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Kategori/komponen IC yang diadopsi dalam penelitian ini adalah modifikasi skema yang dibangun oleh Guthrie *et al.* (1999), yang merupakan pengembangan dari definisi IC yang ditawarkan oleh Sveiby (1997).

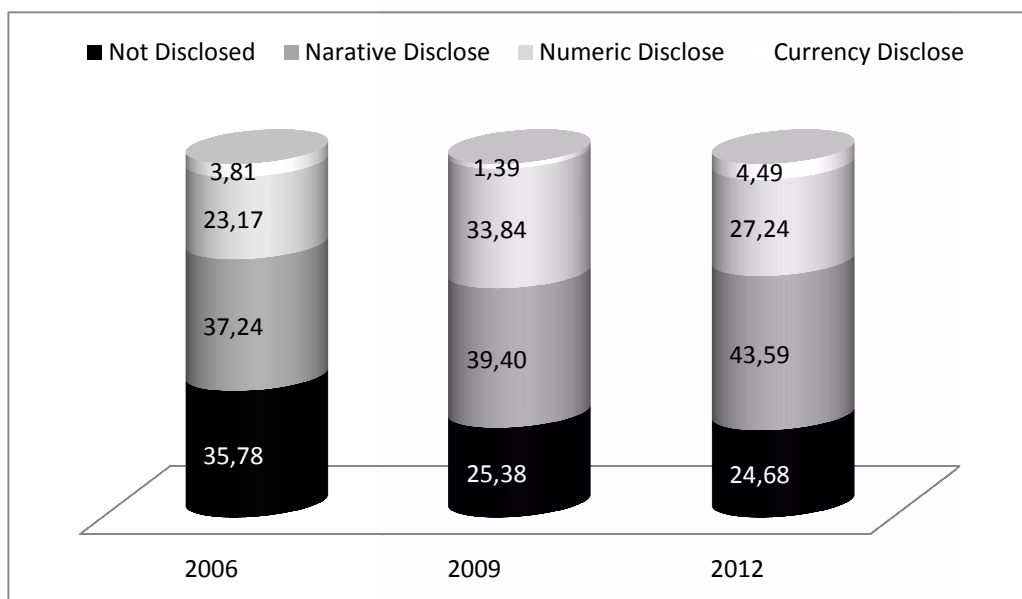
Modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa item yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam skema ini, IC dikelompokkan dalam 3 kategori yang terdiri dari 36 item, 15 diantaranya adalah item modifikasi, diberi kode (M). Secara umum, jumlah pengungkapan informasi IC di dalam laporan tahunan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2006, 2009, dan 2012 kecuali untuk komponen *relational capital* (RC) yang fluktuatif. Di tahun 2012, terdapat tiga item IC yang

tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan yaitu ‘hak cipta’, ‘*trademark*’, dan ‘penghargaan’. Sebaliknya, terdapat 14 item yang diungkapkan oleh seluruh perusahaan, antara lain informasi tentang *human capital* (5 item), informasi tentang *structural capital* (2 item), dan informasi tentang *relational capital* (7 item).

Khusus untuk tahun 2012, naiknya jumlah pengungkapan topik *structural capital* (SC) dan *relational capital* (RC) dapat dipahami sebagai dampak dari keluarnya regulasi dari Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dimana hampir 50% komponen SC dan 30% komponen RC yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari regulasi tersebut. Namun, untuk komponen *human capital* (HC) pada tahun 2012 justru mengalami penurunan jumlah informasi yang disajikan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa regulasi tentang penyampaian laporan tahunan tidak banyak berdampak terhadap kepatuhan emiten untuk menyajikan informasi sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.



Gambar 1: Persentase Pengungkapan Informasi IC 2006, 2009, 2012



Gambar 2: Pengungkapan IC Berdasarkan Bobot

Jika dilihat dari bobot pengungkapan yang dianalisis dengan *four way numerical coding system*, tampak bahwa sebagian besar informasi IC diungkapkan dalam bentuk naratif. Gambar 2 menyajikan data tentang pengungkapan IC dalam laporan tahunan berdasarkan bobot selama tiga tahun pengamatan.

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa pada tahun 2006, terdapat 35,78% informasi yang tidak diungkapkan (skor=0). Jumlah ini kemudian konsisten menurun menjadi tinggal 25,38% pada tahun 2009 dan 24,68% pada tahun 2012. Sebaliknya, informasi yang diungkapkan dalam bentuk narasi (skor=1) mengalami peningkatan selama tiga tahun pengamatan. Jika pada tahun 2006 jumlahnya hanya 37,24%, maka pada tahun 2009 naik menjadi 39,40%, dan mencapai 43,59% pada tahun 2012.

Pengungkapan informasi IC dalam bentuk angka (skor=2) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2012 berada pada angka 27,24%, turun dari posisi tahun 2009 di angka 33,84%. Namun posisi tahun 2009 lebih besar daripada tahun 2006 yang hanya 23,17%. Tren yang sama juga tampak pada jenis pengungkapan dalam bentuk mata uang (skor=3). Tahun 2006, pengungkapan informasi IC dalam bentuk *currency* ini berada pada posisi 3,81%, kemudian turun ke 1,39%

pada tahun 2009, dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 4,49%.

Secara keseluruhan, informasi IC yang diungkapkan dalam bentuk narasi mendominasi jenis pengungkapan, yakni pada kisaran 37,24% hingga 43,59%. Angka ini berada di atas persentase yang seharusnya, yaitu 36,11%. Sementara informasi IC yang diungkapkan dalam bentuk numerik ada pada kisaran 23,17% hingga 33,84% dari seharusnya yang mencapai 50%. Sedangkan informasi IC yang disajikan dalam bentuk *currency* berada cukup jauh dari yang seharusnya (13,89%), yakni antara 1,39% hingga 4,49%.

Persentase informasi IC yang tidak diungkapkan (skor=0) cukup tinggi, yaitu antara 24,68% hingga 35,78%. Menariknya, dari sejumlah item yang tidak diungkapkan oleh cukup banyak sampel penelitian ini adalah item-item yang sifatnya adalah *mandatory* dari Bapepam-LK (sekarang OJK). Misalnya, informasi tentang ‘sertifikasi’ (item ke 34) hanya diungkapkan oleh 6 dari 25 bank di tahun 2012. Informasi tentang ‘kemampuan membayar utang’ (item ke 22) hanya diungkapkan oleh 5 dari 21 bank di tahun 2009. Demikian juga informasi tentang ‘turnover karyawan’ (item ke 8) yang hanya diungkapkan oleh 3 dari 18 bank di tahun 2006.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan

perbankan di Indonesia untuk menyajikan informasi seputar IC-nya secara ala kadarnya saja, tidak maksimal. Kebanyakan mereka merasa tidak terlalu penting melakukan upaya lain untuk memengaruhi pasar (*stakeholders*) melalui *disclosure* di dalam laporan tahunan. Mereka seolah menganggap bahwa pengungkapan informasi IC di dalam laporan tahunan justru akan menjadi *competitive disadvantages*, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Jika ditelisik dari perspektif bahwa perusahaan perbankan merupakan perusahaan jasa yang sangat sensitif terhadap informasi, maka dapat dipahami ketika mereka cenderung tertutup terhadap informasi yang mereka miliki. Informasi, apalagi terkait dengan hal-hal penting bagi perusahaan, merupakan aset berharga bagi organisasi. Informasi tentang karyawan, apalagi tentang kualifikasi dan skill yang mereka miliki, cukup riskan untuk dibagi kepada publik. Demikian juga informasi tentang jaringan pelanggan (nasabah) yang telah berhasil dibangun.

Dalam perspektif *resources based theory* (Wernerfelt, 1995; Barney, 1999, 2001), kekayaan IC merupakan salah satu *resources* penting yang dimiliki organisasi. Pengungkapan informasi tentang IC yang terlalu detil mungkin akan membahayakan keunggulan yang dimiliki organisasi. Dengan kata lain, meminimalisir informasi IC sebagai upaya manajemen untuk menjaga keunggulan kompetitif yang telah dimiliki agar tidak ditiru oleh kompetitor. Terlebih dalam konteks perusahaan perbankan yang merupakan industri jasa. Informasi-informasi tertentu bisa jadi merupakan rahasia dari keunggulan perusahaan.

SIMPULAN

Sejauh ini, regulasi tentang bagaimana pengukuran, pengakuan, hingga pelaporan modal intelektual (IC) masih belum konklusif. Standar akuntansi yang berlaku baru sebatas mengatur tentang hal ikhwal seputar *goodwill* saja, yang merupakan salah satu jenis dari IC. PSAK 19 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012) tentang aset tak berwujud maupun IAS 38

(IASB, 2004) juga tidak secara spesifik membahas tentang IC. Oleh karena itu, maka model ‘pelaporan’ informasi IC melalui laporan tahunan menjadi salah satu alternatif sebelum ide tentang pembuatan *intellectual capital statement* (ICS) dapat terealisasi (Ulum, 2015b).

Kerangka kerja pengungkapan IC (ICD) yang ditawarkan dan digunakan dalam penelitian ini setidaknya memberikan tambahan pilihan untuk ‘melaporkan’ informasi seputar IC. Meskipun penelitian ini hanya memilih sektor perbankan sebagai sampel, namun kerangka kerja ICD ini dapat diterapkan untuk kajian-kajian di industri yang lain. Oleh karena itu maka penelitian-penelitian mendatang dapat mempertimbangkan untuk menganalisis pengungkapan IC dalam laporan tahunan dengan menggunakan kerangka kerja yang ditawarkan dalam paper ini.

Merujuk pada hasil penelitian ini, menarik untuk dikaji dalam penelitian mendatang tentang pengaruh faktor karakteristik organisasi dan faktor lainnya (misalnya kinerja keuangan) terhadap luas pengungkapan informasi IC di dalam laporan tahunan. Menarik juga untuk dikaji dengan media yang lain, misalnya tentang pengungkapan IC melalui *websites* resmi perusahaan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (1994) dan Neuendorf (2002). Salah satu keterbatasan dan atau kelemahan yang melekat secara *given* dalam *content analysis* adalah potensi adanya subjektivitas. Oleh karena itu maka harus dilakukan upaya untuk meminimalisir subjektivitas tersebut.

Untuk meminimalisir unsur subjektivitas, analisis isi dilakukan lebih dari satu orang. Selain peneliti, proses analisis isi dibantu oleh 4 orang enumerator, yaitu dua orang sarjana akuntansi dan 2 orang mahasiswa S2 Akuntansi. Masing-masing melakukan analisis isi terhadap seluruh data dengan mencantumkan nomor halaman laporan tahunan dari masing-masing item IC yang diungkapkan. Setelah itu, peneliti melakukan konfirmasi data hasil analisis isi dari masing-

masing enumerator. Jika terdapat temuan yang berbeda diantara ketiganya, maka dilakukan analisis ulang terhadap item yang berbeda tersebut secara bersama-sama sehingga diperoleh kesepahaman atas item yang dimaksud.

DAFTAR REFERENSI

- An, Y., H. Davey, dan I. R. C. Eggleton. 2011. Towards a comprehensive theoretical framework for voluntary IC disclosure. *Journal of Intellectual Capital* 12 (4): 571-585.
- April, K. A., P. Bosma, dan D. A. Deglon. 2003. IC measurement and reporting: establishing a practice in SA mining. *Journal of Intellectual Capital* 4 (2): 165-180.
- Barney, J. B. 1999. How a firms capabilities effect boundary decisions. *Sloan Management Review* 40 (3): 137-145.
- . 2001. Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Yes". *Academy of Management Review* 26 (1): 41-56.
- Bontis, N. 1998. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. *Management Decision* 36 (2): 63-76.
- . 2002. Intellectual capital disclosure in Canadian corporations. *Unpublished Paper*. McMaster University, Canada.
- Bontis, N., W. C. C. Keow, dan S. Richardson. 2000. Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of Intellectual Capital* 1 (1): 85-100.
- Bozzolan, S., F. Favotto, dan F. Ricceri. 2003. Italian annual intellectual capital disclosure: An empirical analysis. *Journal of Intellectual Capital* 4 (4): 543-558.
- Brennan, N. 2001. Reporting and managing intellectual capital: evidence from Ireland. Artikel dipresentasikan pada *International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects*, June, di Amsterdam.
- Bukh, P. N. 2003. Commentary, the relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 16 (1): 49-56.
- Bukh, P. N., M. R. Johansen, dan J. Mouritsen. 2001. Constructing intellectual capital statements. *Scandinavian Journal of Management* 17: 87-108.
- Choong, K. 2008. Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. *Journal of Intellectual Capital* 9 (4): 609-638.
- Davis, F. H., T. R. Cloake, A. S. Fedde, dan H. A. Horne. 1940. Intangible assets. *New York Certified Public Accountant* 1 (1): 33.
- Dumay, J. C. 2014. 15 years of the journal of intellectual capital and counting: a manifesto for transformational IC research. *Journal of Intellectual Capital* 15 (1): 2-37.
- Firer, S., dan S. M. Williams. 2003. Intellectual capital and traditional measures of corporate performance. *Journal of Intellectual Capital* 4 (3): 348-360.
- Goh, P. C., dan K. P. Lim. 2004. Disclosing intellectual capital in company annual reports; Evidence from Malaysia. *Journal of Intellectual Capital* 5 (3): 500-510.
- Guthrie, J., dan R. Petty. 2000. Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital* 1 (3): 241-251.
- Guthrie, J., R. Petty, F. Ferrier, dan R. Wells. 1999. There is no accounting for intellectual capital in Australia: review of annual reporting practices and the internal measurement of intangibles within Australian organisations.

- Artikel dipresentasikan pada *International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects*, 9-11 June, di Amserdam.
- Guthrie, J., R. Petty, K. Yongvanich, dan F. Ricceri. 2004. Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. *Journal of Intellectual Capital* 5 (2): 282-293.
- Guthrie, J., F. Ricceri, dan J. Dumay. 2012. Reflections and projections: a decade of intellectual capital accounting research. *British Accounting Review* 44 (2): 68-82.
- Hall, R. 1992. The strategic analysis of intangible resources. *Strategic Management Journal* 13 (2): 135.
- IASB. 2004. Summary of IAS 38 www.iasplus.com. [diakses pada 22 November 2006].
- IFAC. 1998. The Measurement and management of intellectual capital www.ifac.org. [diakses pada 23 November 2007].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Itami, H., dan T. W. Roehl. 1987. *Mobilizing invisible assets*. Cambridge: Harvard University Press.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. 1994. *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications.
- Mouritsen, J., H. T. Larsen, dan P. N. Bukh. 2001. Intellectual capital and the 'capable firm': narrating, visualising and numbering for managing knowledge. *Accounting, Organizations and Society* 26: 735-762.
- Mouritsen, J., P. N. Bukh, dan B. Marr. 2005. *A Reporting perspective on intellectual capital. Pada perspectives on intellectual capital*, diedit oleh B. Marr. Jordan Hill, Oxford, UK: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Neuendorf, K. A. 2002. *The content analysis guide book*. London: Sage Publications.
- Petty, R., dan J. Guthrie. 2000. Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. *Journal of Intellectual Capital* 1 (2): 155-176.
- Roos, J., G. Roos, N. C. Dragonetti, dan L. Edvinsson. 1997. *Intellectual capital: Navigating in the new business landscape*. Houndsmills: Macmillan Business.
- Santoso, E. 2011. Intellectual capital in Indonesia: The Influence on financial performance of banking industry. Doctor of Management, University of Phoenix.
- Singh, I., dan J. L. W. M. Van-der-Zahn. 2008. Determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings. *Accounting and Business Research* 38 (5): 409-431.
- Spence, M. 2002. Signaling in retrospect and the informational structure of markets. *American Economic Review* 92 (3): 434-459.
- Sveiby, K. E. 1997. *The New organizational wealth: Managing & measuring knowledge-based assets*. Sydney: Berret-Koehler Publishers.
- Tayles, M., R. H. Pike, dan S. Sofian. 2007. Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 20 (4): 522-548.
- Ulum, I. 2009. *Intellectual capital; Konsep dan kajian empiris*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- . 2011. "Analisis praktek pengungkapan informasi intellectual capital dalam laporan tahunan perusahaan telekomunikasi di

- Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK)* 1 (1): 49-56.
- . 2013. iB-VAIC: Model pengukuran kinerja intellectual capital perbankan syariah di Indonesia. *Inferensi (Terakreditasi Dikti)* 7 (1): 183-204.
- . 2015a. *Intellectual capital: Model pengukuran, framework pengungkapan, dan kinerja organisasi*. Malang: UMM Press.
- . 2015b. Peran pengungkapan modal intelektual dan profitabilitas dalam hubungan antara kinerja modal intelektual dengan kapitalisasi pasar. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Vergauwen, P., dan F. Alem. 2005. Annual reports IC disclosures in The Netherlands, France and Germany. *Journal of Intellectual Capital* 6 (1): 89-104.
- Wernerfelt, B. 1995. The Resource-based view of the firm: Ten years after. *Strategic Management Journal* 16 (3): 171-174.
- White, G., A. Lee, dan G. Tower. 2007. Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Intellectual Capital* 8 (3): 517-537.
- Whiting, R. H., dan J. C. Miller. 2008. Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the 'hidden value'. *Journal of Human Resource Costing & Accounting* 12 (1): 26-50.
- Williams, S. M. 2001. Is a company's intellectual capital performance and intellectual capital disclosure practices related?: Evidence from publicly listed companies from the FTSE 100. *Journal of Intellectual Capital* 2 (3): 192-203.

FINANCIAL REPORTING COMPLIANCE IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS: MIMETIC PRESSURE DOMINATES

Johan Arifin

Universitas Islam Indonesia
e-mail: arf.johan@gmail.com

Greg Tower

Curtin University
e-mail: Greg.Tower@cbs.curtin.edu.au

Stacey Porter

Curtin University
e-mail: Stacey.Porter@cbs.curtin.edu.au

Abstract

This study empirically examines the level of mandatory disclosure within financial statements of local governments in Indonesia by using institutional theory. Indonesia is the world's largest muslim country that has recently undergone comprehensive public sector reform. There is a moderate level of compliance with key mandatory disclosures (49.9%). The highest level of communication is on issues relating to Fiscal Policy (81.2%) whereas the lowest level is for Macro-Economic issues (33.6%). Regression analysis shows that the mimetic isomorphism variable, measured by jurisdiction is positive and significant predictors of the extent of mandatory disclosure. Local governments that are located in Java disclose more than non-Java, and older local governments also have higher mandatory disclosures.

Keywords: Mandatory disclosure, financial statements, local governments.

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art6>

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori institusional. Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim terbanyak di dunia yang barusaja melakukan reformasi sektor publik secara komprehensif. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan sebesar 49,9%, dimana pengungkapan tertinggi adalah pos kebijakan fiskal (81,2%), sedangkan pengungkapan terendah adalah informasi mengenai ekonomi makro (33,6%). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel 'mimetic isomorphism' yang diukur dengan menggunakan proxi lokasi daerah (jurisdiksi) merupakan variabel prediktor yang secara positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Selain itu, umur pemerintah daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci: Mandatory disclosure, financial statements, local governments

INTRODUCTION

Indonesia is a developing country in Asia that has recently undergone major state financial

reform. The Government of Indonesia has implemented several of policies and regulations on local government financial management aimed

at promoting improved systems and greater accountability over public resources managed by local governments. Of particular significance in the area of budgetary and financial management for local governments is the recent introduction of two regulations, Government Regulation No.24 of 2005 (PP No.24 of 2005), introducing new government accounting standards, and Minister of Internal Affairs Decree No.13 of 2006 (Permendagri No.13 of 2006), bringing in new performance-based budgeting standards and guidelines for financial management of local government. Since 2010, the PP No.24 of 2005 was replaced by PP No.71 of 2010, which has implemented a full accrual accounting. These regulations play an increasingly prominent role in supporting government policy on decentralization in accordance with the Law (UU. No.32 of 2004).

Decentralization highlights the increasing need for accountability in local government (Mardiasmo 2002). In 2003, UU No.17 of 2004 was issued requiring government agencies including local government to provide an annual financial statement based on government accounting standards. Although the regulation has been in force for more than seven years, the Ministry of Finance has questioned the level of compliance (Mulyani 2010).

There is a clear need to research local government compliance, for example, the Supreme Audit Institution (Badan Pemeriksa Keuangan) in 2009 claims that the financial statements of local governments in Indonesia have not met the expected target. They state many Indonesian local governments have not fully prepared financial statement in accordance with standards and regulations. The Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia is the highest (supreme) audit institution in the land is responsible for the auditing of the state finance, i.e. the budget implementations of the central government and local government, the state-owned enterprises, and those enterprises owned by the local governments in short, the entire wealth of the State. They have issued a series of

reports with highlight problems with compliance in Indonesia local government.

Martani and Lestari (2010) argue that to obtain an unqualified opinion for Indonesian local government entities, there are four criteria that need to be considered including: compliance with accounting standards, the effectiveness of internal control, compliance with laws and regulations and the adequacy of disclosure (full disclosure).

Full disclosure in financial statements is very important to help avoid misconceptions in understanding financial statements (Marston and Shrivess 1991). Studies on the level of mandatory or voluntary disclosure in the financial statements have been undertaken in various settings. Lennox (1999) reveals that audit quality affects the level of mandatory disclosure. According to Hackston and Milne (1996), industry type affects voluntary disclosures. In addition, Eng and Mak (2003) and Cheng and Courtenay (2006) argue that government ownership influences the voluntary disclosure of partially-owned governmental bodies. These studies show that there are many factors that may affect the level of disclosure in the financial statements.

Copley (1991) investigates the influence of audit quality on the financial disclosure of local governments. The result provides evidence that there is positive relationship between audit quality and disclosure. Research in the private sector has found similar results where audit quality can induce the financial statement quality by improving the disclosure to reduce asymmetry information. Ingram and DeJong (1988) concludes that the coalition of voters, administrative powers, and management incentives significantly helps explain variations in the disclosure level on governmental financial statements. Robbins and Austin (1986) also note that administrative power and management incentives are associated with the disclosure quality. Cheng (1992) develops a political economic model based on the theoretical and empirical work in public choice and political science to

help explain state government accounting disclosure choice. The model posits that state government accounting disclosure choice is influenced by its political environment and institutional forces.

This study examines key variables that are expected to influence the level of mandatory disclosure of financial statements in local governments in Indonesia. There are three important aspects to this study. First, this research uses institutional theory approach to examine the level of mandatory disclosure of financial statements and the informativeness of the statements of local governments in Indonesia.

Second, the research is conducted in Indonesia, a developing country that has recently undergone major state financial reform and has a unique governmental structure¹. Third, the findings of this study can be applied to develop and improve public sector governance applications. In particular, these finding can serve as an input for public policy making in better calibrating the implementation of Governemnt Regulation (PP) No. 71 of 2010, to best obtain full implementation in all Indonesian government institutions by 2015.

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Studies on mandatory disclosure have adopted a variety of theories. These include agency theory (Mahoney 1995), legitimacy theory (Mobus 2005), capital market theory (Schon 2006), and institutional theory (Yoshikawa, Tsui and McGuire 2007). Among these theories, agency theory and institutional theory are the most widely used by mandatory disclosure researchers (Mucciarone 2008). Recently, some researchers have employed institutional theory in the public sector area specifically on mandatory disclosure (e.g. Buhr and Freedman 2001). Seijaaka (2004) posits that this theory potentially provides greater insights of mandatory disclosure practices. Accordingly, this study adopts institutional theory as the underlying theoretical

framework explaining mandatory disclosure practices in Indonesia.

Institutional theory explains that organizations are faced with institutional pressures and due to these pressures those organizations tend to become very similar in their form and practices (Perera 2007; Deegan 2006). Institutional theory is concerned with how organizations structure themselves to gain acceptance and legitimacy which may be at the expense of efficiency. Legitimacy is the acceptance of an organization by certain social actors in society as not all parties have the standing to confer legitimacy. Pressures to conform arise from a variety of factors including uncertainty and task requirements, professional norms and standards, and a broader normative environment (Dacin 1977).

Institutional theory has two main dimensions: isomorphism and decoupling (Deegan 2006). Isomorphism, as used in this study, refers to particular practices by an organization because of institutional pressures (DiMaggio and Powell 1983) while decoupling refers to a situation in which the apparent practice of an organization is different from the actual practice (Meyer and Rowan 1977). In the context of this study, it can be said that isomorphism is the process by which mandatory disclosure practice in a local government is influenced by institutional pressures. Whereas decoupling is a situation in which mandatory disclosure practice is used by an organization to create an image which is different from that organization's circumstances or activities. In accordance with the purpose of this research which relates to the factors that influence the level of mandatory disclosure in local governments, this study solely utilises the isomorphic institutional dimension as the underlying theoretical framework.

DiMaggio and Powell (1983, p.149) label the process by which organizations tend to adopt the same structures and practices as 'isomorphism', which they describe as a homogenization of organizations. Tolbert and Zucker (1983, p.17) state when describing municipality

reform “...the rapid institutionalization of the reform rested on the assumed isomorphism between it and the ideal rational bureaucratic form”. Several studies (Perrow 1985; Covaleski and Dirsmith 1988; and Tagesson 2008) are based on institutional isomorphism in accordance with the concepts put forward by DiMaggio and Powell (1983).

As proposed by institutional theorists, by becoming ‘isomorphic’, organizations may achieve legitimacy (DiMaggio and Powell 1983). Kostova and Zaheer (1999) note that institutional theory supporters such as DiMaggio and Powell (1983) and Meyer and Rowan (1977) have identified some of the determinants of organizational legitimacy and the characteristics of the legitimating process. They cite three sets of factors that shape organizational legitimacy: (1) the environment’s institutional characteristics, (2) the organization’s characteristics, and (3) the legitimating process by which the environment builds its perception of organizations. Furthermore, Kostova and Zaheer (1999, p.77) in their study on multinational enterprises, claim” given the multiplicity and variety of institutional environments and the cross country differences between these environments, achieving isomorphism becomes difficult”. Carpenter and Ehsan (2001) and Ashworth, Boyne and Delbridge (2007) suggest that isomorphic pressures differ based on organizational characteristics. In a consistent theme, this study examines isomorphic variables such as size of local government, jurisdiction, and political influence, and their potential relationship with the level of mandatory disclosure.

Scott (1987) reviews four sociological formulations all claiming an institutional focus due to variations in definition on the concepts of institution and institutionalization. Scott (1987, p.499) describes institutionalization conceptions as “a process of instilling value; a process of creating reality; institutional systems as a class of elements and institutions as distinct societal spheres”. This study considers several areas within institutional theory, including that de-

scribing institutional systems as a class of elements. According to Scott (1987, p.497), “institutionalized belief systems constitute a distinctive class of elements that can account for the existence and/or elaboration of organizational structure”. Furthermore, he states that:

Since the concept of institutionalization is not definitionally linked to a distinctive process that might cause an organization to change its structure in ways that make it conform to-become isomorphic with - an institutional pattern. The best known-classification is of this type is developed by DiMaggio and Powell (1983) who distinguished among coercive, mimetic and normative processes leading to conformity.

Joseph (2010) reveals that the most noticeable type of institutional force is coercive isomorphism. According to DiMaggio and Powell (1983, p.149), “coercive isomorphism results from both formal and informal pressures exerted by other organizations on which an organization may be dependent, as well as cultural expectation in which the organizations operate”. The formal pressure they refer to is a regulative process where regulators have the capacity to set up rules and procedures, monitor compliance and, when necessary, apply sanctions.

DiMaggio and Powell (1983, p.150) then explain “mimetic isomorphism is where organizations tend to model themselves and imitate the practices and policies of those organizations perceived to be legitimate and successful”. Mimetic isomorphism is often referred to as a response to uncertainty. Furthermore, Baker and Rennie (2006, p.88) states that “while these organizations may not be certain about what they should do when facing challenges by adopting structures and processes used by similar organizations, they are, at the very least being seen to be doing something”.

Ryan and Purcell (2004, p.10) explain that “normative influences refer to shared norms of organizational members, that is, those values

that may be unspoken, or expectations that have gained acceptance within organizations". The element of pressure is normally developed by professional and occupational groups (Rahaman *et al.* 2004). DiMaggio and Powell (1983) argue that the more highly professionalized a workforce becomes in terms of academic qualifications and participation in professional and trade associations, the greater the extent to which the organization becomes similar to other organizations in the fields. In addition, Baker and Rennie (2006, p.87) also cite another source of normative isomorphism, being expertise as a possible important resource in "the implementation of reform and help in identifying shortcomings in a practice". This study advances hypotheses using coercive, mimetic and normative isomorphic tenets.

Coercive Isomorphism Related Hypothesis

This study examines the independent variable size of local government within the framework of coercive isomorphism. Size of government organization has been examined previously in public sector accounting research as one of the stronger determinants of for example, choice of accounting standard or internet financial reporting. With regard to public sector accounting research, size of an organization has been found to have a positive relationship with the extent of disclosure in annual reports of state government (Taylor and Rosair 2000). Several studies use size of local parliament² as a measurement of local government size (see Hix 2004). In line with coercive isomorphism of institutional theory, the local parliamentarians have the power to pressure local government executive to align with the society's aspirations. Accordingly this study uses the number of local representatives in Indonesian local parliament to measure size as a predictor of the level of mandatory disclosure in financial statements.

Indonesian local parliaments have a varying number of members, depending on the size and influence of the local government. As

stated in Indonesian Act (UU No.10 of 2008), a member of local parliament is a political mediator of the people within a local government. The greater number of local parliament members, means the greater local community representatives who will hold a legislative function to influence local government executives in performing their duties (Sotiropoulos 2008). Therefore, there is potential greater pressure from those local members representing local community as a coercive influence of local government executives to make disclosures on their operational activities. To capture this potential coercive pressure the following hypothesis is proposed:

H1: There is a positive association between number of local parliamentarians and the extent of mandatory disclosure in the local government financial statements.

Mimetic Isomorphism Related Hypothesis

Within the framework of mimetic isomorphism, a hypothesis is developed to test the impact of jurisdiction. State or local government's jurisdiction is arguably a mimetic pressure in relation to institutional theory. DiMaggio and Powell (1983) suggest that mimetic behavior occurs as a reaction to uncertainty. When organizations face situations where there is no clear cut course of action, they may limit the selection of structures or practices to those that are being used by other organizations that are viewed as being successful in the institutional environment. Furthermore, Palmer and Dunford (1993) state that organizations tend to model themselves after similar organizations in their field that are perceived to be more legitimate or successful. Thus, mimetic isomorphism is a response to organizational uncertainty in identifying the best course of action.

Jakarta is the capital of Indonesia and is located on the massively populated island of Java. The capital's Java location influences the surrounding area to get better life facilities. Potentially the amenities in every local government located in Java may be better than in non-

Java. In addition, the government of Indonesia through the Ministry of Communications and Information (Kemkominfo) admit to having a gap in terms of construction and development of telecommunications facilities on the islands between Java and non-Java (Republika 2011). Ball (2001) and Leuz (2011) feel that the quality of telecommunication infrastructure will affect the quality of an entity's financial reporting. With a better communication system, an organization can more easily monitor its development, all matters relating to the operations can be shared to all stakeholders more quickly to support the advancement of the organization. In addition, Java has better educational facilities than non-Java. Most of leading universities are located in Java. Hoect (2006) argues that the quality of human resources will affect the quality of disclosures in the accountability report. Human resources have a dual role, as an object but also as subjects of development. As the object of development, human resource development is a goal to be sought after, and as the subject of human resource development actors act as the crucial progress. Moran *et al.* (2008) argues that human resource is an important factor related to the quality of accountability. An entity which has better human resource tends to have better financial accountability reports. In this regard, local governments which are located in Java potentially have better financial statements and disclosure practices than non-Java. Based on these ideas, the following hypothesis is proposed:

H2: There is a positive association between local governments that are located on the island of Java and the extent of mandatory disclosure in the local government financial statements compared to non-Java entity.

Normative Isomorphism Related Hypothesis

Under *normative isomorphism*, a hypothesis is developed to test the impact of a possibly explanatory variable namely political influence. In the governance structure of public sector, local

parliament is an institution that has an important check and balance function to ensure that the local government executives execute their job well in the interests of all stakeholders (Lyngstad 2010). Grigorescu (2008) interprets this function as horizontal accountability. This function can be used as an argument to support normative isomorphism pressure on local government executives to run the professional activities to meet the public interest. Ying and Zhengfei (2006) states that a decline in the quality of supervision of the executive would result in decreased quality of disclosure on the executive accountability report, including disclosures on its financial statements.

Silva (2009) argues that the composition of members of local parliament could be used as benchmarks to see the power of pressure exerted by the local parliament to the executive government. If the proportion of local parliament member is dominated by the majority party, and the chairman of local government is from the same party or a coalition, then the quality of supervision conducted on the performance of the executive may decline. Based on these ideas, the following hypothesis is proposed:

H3: There is a positive association between the proportion of local parliament members who are independent of the executive and the extent of mandatory disclosure in the local government financial statements.

RESEARCH METHOD

From a total population of 496 local governments in Indonesia, stratified random sample³ of 80 financial statements are collected from the Supreme Audit Board of Indonesia (BPK) database for the period ending December 31, 2010. This data set is used to empirically test the three institutional theory hypotheses. The sample consists of 40 local governments in Java and 40 local governments outside Java. Both local governments' types are divided into district and municipality groupings.

Measurement Techniques

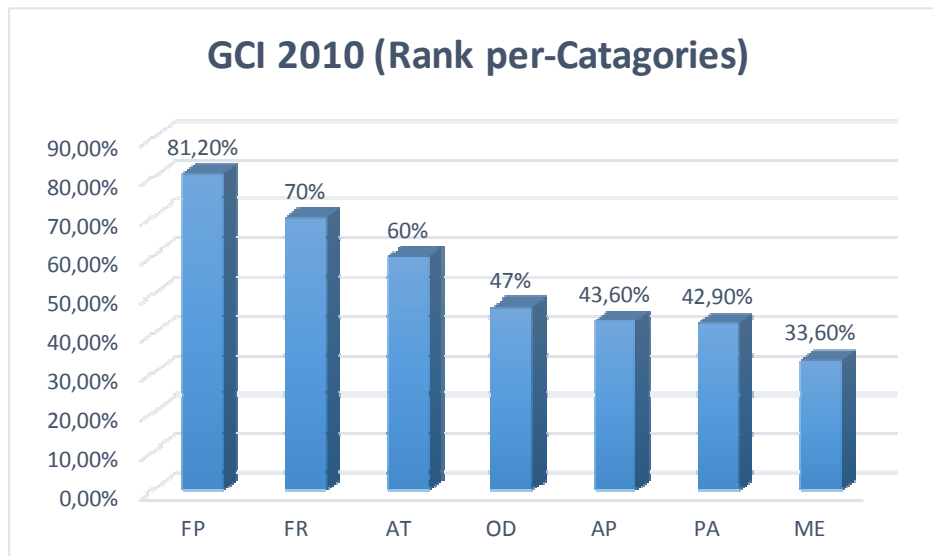
Dependent variable

Informativeness of financial statements can be seen from the extent to which an entity provides an explanation (disclosure) on financial its financial statements (Ingram and DeJong 1988). In Indonesia, disclosure of local government statement is mandatory in accordance with the government regulation (PP No.24 of 2005) regarding Indonesian Government Accounting Standards. To examine the informativeness of financial statements in local governments in Indonesia, a Government Compliance Index (GCI) is created.

A disclosure index can be classified into weighted or unweighted index (see Cooke 1991). In a weighted disclosure index, particular disclosure items are given a higher score (when those items are disclosed) than the other disclosure items based on the perceived importance of those particular items (Cooke 1991). Whereas, in an unweighted index, each disclosure item is deemed equally important and therefore each item is awarded the same score when it is dis-

closed (Meek, Roberts, and Gray 1995). Most prior studies use an unweighted disclosure index to measure the level of disclosure as this technique is considered far less subjective than a weighted index and is more relevant to all entities (Craig and Diga 1998). Accordingly, this study adopts an unweighted technique for scoring each disclosure item.

In a disclosure index, the contents of each annual report are compared to the items listed on a checklist and coded as 1 or 0, depending upon whether or not the content conforms to the items listed on the checklist (Coy, Tower, and Dixon 1993). A disclosure index for every local government is then calculated as the ratio of total score awarded to the local government divided by the maximum number of items that are applicable for the entity. Such a measurement approach is suitable for measuring the level of disclosure in developing nations whose set of economic, politic and social conditions differ from those of developed nations (see Nurhayati, Brown, and Tower 2006).



*The average overall GCI score is 49.9%.

Legend: FP = information of Fiscal Policy; FR = Principals of Financial Reporting; AT = Information of Local Budget; OD = Other Disclosures; AP = Accounting Policy; PA = Performance Achievement; ME = Macro Economy

Figure 1: Government Compliance Index 2010 (by Categories)

Figure 1 shows Government Compliance Index (GCI) categories. There are seven categories of GCI. Key explanatory factors highlighted from Figure 1 are:

- The average overall GCI score during 2009 is 49.9%.
- There are seven categories of GCI in which Information on Fiscal Policy is the highest level of communication (81.20%). This indicates that Indonesian local governments are very concerned about fiscal information which occurs in their area such as changes in financial position, revenue increases, expenditure efficiency, and others.
- The second most disclosed GCI category is Principles of the Financial Report (70%). This indicates that the principles of financial statements are reasonable well communicated by Indonesian local government.
- The other categories are less well disclosed including Information of the Achievements of Local Budget Targets (60%), followed by Oth-

er Disclosure (47.0%), Disclosure of Accounting Policy (43.6%), and Presentation of Summary of Performance Achievement (42.9%).

- Information of Macro Economics is the lowest category communication (33.6%). This indicates that the information relating to macroeconomic issues got less attention by Indonesian local governments.

Independent and Control Variables

The measurement techniques for the independent and control variables are based on prior studies (Sotiropoulos, 2008; Hix, 2004; Huther and Shh , 1998; Sloan, 2011; Usman, 2001; Lev and Schwartz, 1971; Martani and Lestari, 2005; Stalebrink, 2007; Alicias *et al.*, 2007). These are summarized in Table 1. The possible influence of these variables on mandatory disclosures practices are tested by multiple regressions.

Table 1: Measurement Technique of the Independent and Control Variables

	Independent Variables	Control Variables	Measurement	Type of Data
Coercive isomorphism	Size of local government		Total number of local government parliamentarians	Continuous
Mimetic isomorphism	Jurisdiction (Java and non-Java)		It is measured by dichotomous coding: 1 = if it is located in Java 0 = if it is not located in Java	Categorical
Normative isomorphism	Political Influence		Proportion of non controlling parties in the local parliament	Continuous
		Type of local government	1 = Municipality 0 = District	Categorical
		Age of entity	Number of years from inception	Continuous
		Audit Finding	Number of audit finding recommendations	Continuous
		Surplus/deficit of Local Government	1 = if deficit (revenue < expenditure) 0 = if surplus (revenue > expenditure)	Categorical
		Financial independence	Ratio of Local Government Financial Independence (RLGFI).	Continuous

RESULTS AND DISCUSSION

Descriptive Results and GCI Analysis

Results of descriptive statistics for the dependent, independent and control variables are summarized in Table 2. Table 2 shows that the mean of Government Compliance Index (GCI) level for the 80 strong samples of Indonesian local government is 49.9%. This finding suggests that overall mandatory disclosure practices of Indonesian local governments are only moderately complied with the number of local parliament members in the 80 local governments' ranges from 20 to 50 people with the mean of 39 persons. This is in accordance with the regulation of Indonesian Electoral Commission No.17 of 2008 that the number of local parliament members shall be at least 20 seats and at most 50 seats. The proportion of minority par-

ties in each local parliament is also quite varied with the lowest proportion being Cilegon (Java-municipality) with 28.6%, while the highest is Cimahi (Java-municipality) with 96.0%. In addition, local governments in Indonesia have a very wide range of ages. The newest local government is Bengkulu Tengah (non-Java district), while Palembang (non-Java municipality) is the oldest as it has been in existence for 1327 years. The local government having the lowest audit finding is Sleman (Java district) with 8 findings, whereas the largest number of audit finding is Cianjur (Java-district) with 47 findings; the average is 23. Finally, the minimum value of financial independence⁴ variable is 1.0% (Bengkulu Tengah, non-Java district), and the highest is 30.0% (Surabaya, Java municipality), with the average value is 9.6%.

Table 2: Descriptive Statistics of the Dependent, Independent and Control Variables

Panel A: Continuous Variables

Variable	n	Min	Max	Median	Mean	Std Dev
<i>Government Compliance Index (%)</i>	80	26.3	84.2	50.9	49.9	10.5
<i>Number of Parliamentarians (#)</i>	80	20	50	42	39	9.5
<i>Non-Supporting Parties (%)</i>	80	28.6	96	66.7	67	13.8
<i>Age of Local Government (#)</i>	80	3	1327	158	278	333
<i>Audit Finding (#)</i>	80	8	47	22.5	23	7.6
<i>Financial Independence (%)</i>	80	1	30	8	9.6	5.9

Panel B: Categorical Variables

Variable	Frequency	Percentage
<i>Java and Non Java</i>		
<i>Java</i>	40	50
<i>Non-Java</i>	40	50
<i>Type of Local Government</i>		
<i>Municipality</i>	40	50
<i>District</i>	40	50
<i>Surplus/Deficit of LG</i>		
<i>Deficit</i>	14	17.5
<i>Surplus</i>	66	82.5

Legend: Panel A shows the descriptive statistics of the dependent variable (GCI) and continuous independent variables. Panel B shows the descriptive statistics of categorical variables including independent and control variables.

Table 3: Univariate Analysis Results of Independent Variables by Java-Non Java, District-Municipality, and Surplus-Deficit

<i>Variable</i>	<i>Java/Non-Java</i>	<i>District-Municipality</i>	<i>Surplus-Deficit</i>
<i>Number of Parliamentarians</i>	.001*	.428	.579
<i>Non-Supporting Parties</i>	.585	.794	.988
<i>Age of Local Government</i>	.021**	.288	.524
<i>Audit Finding</i>	.003*	.377	.012**
<i>Financial Independence</i>	.001*	.000*	.023**

*highly significant at 1% level, **significant at 5% level, ***moderately significant at 10% level.

Table 3 shows significant differences for several predictor variables including Number of Parliamentarians, Non-Supporting Parties, Age of Local Government, Audit Finding, and Financial Independence between Java and Non-Java local governments, District-Municipality, and Surplus/Deficit of local governments. There are three variables that high significantly different between Java and Non-Java local governments such as Number of Parliamentarians (p-value = 0.001), Financial Independence (p-value = 0.001) and Audit Finding (p-value = 0.003). In addition, Age of Local Government is significant at 0.05 level. There is only one variable that is not significantly different between Java and non-Java local governments, that variable is Non-Supporting Parties.

Furthermore, the variable of Financial Independence between Indonesian municipality and districts have highly statistically significant difference (p-value = 0.000). This indicates that this variable is likely strongly influenced by the geographic position of local governments and by type (municipality or district).

The table also highlights the results of univariate tests associated with all predictor variables on local government budget surpluses and deficits. The statistical analysis shows that audit finding and financial independence between budget surplus and deficit local governments have significant differences (p-value = 0.012 and 0.023). These indicate that both variables are influenced by the condition of local government budget.

Table 4: ANOVA Analysis: By Category

Variable	Age (#)	NumPar (#)	Audfind (#)	Indepty (#)	Nonsup (%)
Java District	368	46	20	8.9	67.5
Non-Java District	109	33	23	4.0	67.9
Java Municipality	359	36	20	14.8	68.8
Non-Java Municipality	277	38	27	10.8	65.0
Average	278	38	22	9.6	67.3
Min	3.0	20	8	1.0	28.6
Max	1327	50	47	30.0	96.0
Sig	.047**	0.000*	0.010*	0.000*	0.850
F	2.777	9.015	4.012	19.926	0.265

*highly significant at 1% level, **significant at 5% level, ***moderately significant at 10% level.

Legend: Age=Age of local government; Numpar=Number of parliamentarians; Audfind=Audit finding; Indepty=Financial Independence; Nonsup=Non-supporting parties

Table 4 shows quite interesting information regarding the predictor variables associated with the condition of local government jurisdiction in Indonesia. Key variables have highly significant differences by the types of their jurisdiction, namely Java District, Non-Java District, Java Municipality, and Non-Java Municipality. These variables include the number of elected official in the local area (p-value = 0.000), financial independence of the local government (p-value = 0.000) and number of critical audit finding (p-value = 0.010). Moreover, it can be seen that age of local government also has significantly different (p-value = 0.047). While only the non-supporting parties variable is not significantly different (p-value = 0.850).

Regression Analysis

To empirically test the three hypotheses, a series of backward regression are performed⁵. In such a regression, all predictor variables are entered into a model and sequentially removed until only significant variables remain with the maximum explanatory power (Cooper and Schindler 2006). Table 5 shows that the adjusted R-square value is explaining 20.9% of the variables. Java/non-Java (the mimetic construct) influences the Indonesia Government Compliance Index (GCI). This variable is highly statistically significant (p-value 0.004). Age of local government is also statistically significant (p-value = 0.045). The coefficient of the two variables are positive, supporting the mimetic argument presented in prior section which posits that there are positive associations between mandatory disclosure practices and the jurisdiction as

represented by the presence of Java/non-Java (Hypothesis 2) and age of local government (control variable). Other hypotheses variables (number of parliamentarians (Hypothesis 1) and non-supporting parties (Hypothesis 3)) and control variables (audit finding, financial independence, municipality-district, and surplus-deficit) are not statistically significant and therefore they are considered unable to explain the variation of mandatory disclosure practices in Indonesian local governments. The results generate evidence that local governments that are located in Java have higher mandatory disclosure practices than non-Java local governments. This implies that the more complete facilities and education located on the large and more prosperous island of Java can positively influence the level of mandatory disclosure practices. This finding therefore supports the statement of Hoecht (2006) that disclosure of financial statements will be better in jurisdictions with such positive characteristics, therefore local governments with less facilities can mimic the communication of mandatory disclosure of local governments with more complete facilities.

CONCLUSIONS

The research presented in this paper focuses on an empirical analysis of the veracity of isomorphic institutional theory to predict the level of mandatory disclosure practices in Indonesia local governments. Indonesian government compliance index (GCI) checklist is created with key predictor variables (size of local parliament, Java/non-Java, and non-supporting parties) tested to explain the extent of such communication in 2010.

Table 5: Results of Backward Regression

Variables	Predicted Sign	Coefficient	P-Value
(Constant)		-.156	.584
Java and non-Java	+	.064	.004*
Age of local Government (control variable)	+	.052	.045**
Adjusted R ²		.209	
F-Stat		11.443	
Sig.		.000	

*highly significant at 1% level, **significant at 5% level, ***moderately significant at 10% level.

In summary, from the three isomorphic components including coercive, mimetic and normative, only the mimetic component has a significant effect on the extent of mandatory disclosure (Java/non-Java). The mimetic variable provides evidence that mimic behavior leads to better quality human resources, location, and facilities for local governments in Indonesia. Local governments that are located in Java disclose more than non-Java. This finding supports the statement from Ball (2001) and Taylor (2010) that areas with good infrastructure and facilities have better financial statement and disclosure. Finally, age of local government is also influence on the extent of mandatory disclosure in Indonesian local governments. This finding supports Lev and Schwartz (1971) statement that the older the age of the entity likelihood of better quality because there has already been a long learning process. In contrast coercive and normative factors do not influence Indonesian local government reporting compliance levels.

A key finding in this research is that the Indonesian overall level of communication as measured by the GCI score is 49.9%. There is a clear opportunity for improving the level of transparency. Several items are communicated very well by Indonesian local governments (above 80% even up to 100%). While numerous other items are opaque (below 20% and one of them has never been communicated at all by local governments). This variance indicates that there is a room for improvement. Indonesian governmental entities should put more energy into increasing their financial statement transparency. Transparency can be improved when there are clarity of tasks and authority, availability of information to public, open budgeting process, and guarantees of integrity regarding fiscal forecasts, information, with sufficient related detail (Campo and Tomasi 1999).

REFERENCES

- Alicias, D., M. Djadijono, and T.A. Legowo. 2007. *Decentralization Interrupted: Studies from Cambodia, Indonesia, Philippines and Thailand*, Institute for Popular Democracy for Learning Initiative on Citizen Participation and Local Governance, Quezon City, Philippines.
- Ashworth, R., G. Boyne, and R. Delbridge. 2007. Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory* 19 (1): 165-187.
- Austin, K.R., and W.A. Robbins. 1986. Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. *Journal of Accounting Research* 24 (2): 412-421. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/2491145?origin=JSTOR-pdf> (accessed May 26, 2014).
- Baker, R., and M. D. Rennie. 2006. Forces leading to the adoption of accrual accounting by the Canadian Federal Government: An institutional perspective. *Canadian Accounting Perspectives* 5 (1): 83-112.
- Ball, R. 2001. Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosure. *Brookings-Wharton Papers on Financial Services*.127-169.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2010. *Kompas*, April 29. p. 3.
- Buhr, N. and M. Freedman. 2001. Culture, institutional factors and differences in environmental disclosure between Canada and United States. *Critical Perspectives on Accounting* 12 (1): 293-322. IDEAL.<http://www.idealibrary.com>.
- Campo, S., and D. Tomasi. 1999, *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila.

- Carpenter L., and F. Ehsan. 2001. Institutional theory and accounting Rule choice: an analysis of four US state government' decisions to adopt generally accepted accounting principles. *Accounting Organizations and Society* 26 (1): 565-596.
- Cheng, R.H. 1992. An Empirical analysis of theories on factors influencing state government accounting disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* 11 (1): 1-42.
- Cheng, E.C.M., and S. M. Courtenay. 2006. Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure, *The International Journal of Accounting* 41 (3): 262-289.
- Cook D., and D.M. Hawkins. 1990. Unmasking multivariate outliers and leverage points. *Journal of the American Statistical Association* 85 (411): 640-644.
- Cooke, T.E. 1991. An assessment of voluntary disclosure in annual reports of Japanese corporations. *The International Journal of Accounting* 26 (3): 147-189.
- Cooper, D.R., and P.S. Schindler. 2006. *Business Research Methods*. 9 ed. New York: McGraw-Hill.
- Copley, P. A. 1991. The association between municipality disclosure practices and audit quality. *Journal of Accounting and Public Policy*. 10 (4): 245-266.
- Covaleski, M.A., and M.W. Dirsmith. 1988. An institutional perspective on the rise, social transformation, and fall of a university budget category. *Administrative Science Quarterly* 33 (4): 562-587.
- Coy, D., G. Tower, and K. Dixon. 1993. Quantifying the quality of tertiary education of annual report. *Accounting and Finance*. 33 (2): 121-129.
- Craig, R., and J. Diga. 1998. Corporate accounting disclosure in ASEAN. *Journal of International Financial Management and Accounting* 9 (3): 246-274.
- Dacin, M.T. 1977. Isomorphism in context: The power and prescription of institutional norms. *Academy of Management Journal* 40 (1): 46-81.
- Deegan, C. 2006. *Financial Accounting Theory*, 2nd ed, Sydney: McGraw-Hill.
- DiMaggio, P. J., and W.W. Powell. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological* 48 (2): 146-160. JSTOR. <http://www.jstor.org> (accessed April 11, 2014).
- Eng, L.L., and Y.T. Mak. 2003. Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* 22 (4): 325-345. Science Direct. <http://www.sciencedirect.com>(accessed May 10, 2014).
- Grigorescu, A. 2008. Horizontal accountability in intergovernmental organizations. *Ethics in International Affairs* 22 (3): 285-308.
- Hackston, D., and M. J. Milne. 1996. Some determinant of social and environmental disclosure in New Zealand companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 9 (1): 77-108.
- Hair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, and W.C. Black. 1998. *Multivariate data analysis*. 5 ed. New Jersey: Prantice-Hall.
- Hix, S. 2004. Electoral institutions and legislative behavior: Explaining voting defection in the European Parliament World Politics, *World Politics* 56 (2): 194-223. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/25054255?origin=JSTOR-pdf> (accessed May 25, 2015).

- Hoecht, A. 2006. Quality assurance in UK higher education: Issues of trust, control, professional autonomy and accountability. *Higher Education* 51 (2): 541-563.
- Huther, J., and A. Shah. 1988. *Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization. Paper was presented at USAID Seminar on Democracy and Governance, ECLAC Seminar on Decentralization, Venezuela.*
- Ingram, R.W., and D.V. DeJong. 1988. *The effect of regulation on local government disclosure practices.* *Journal of Accounting and Public Policy* 6 (4): 245-270.
- Joseph, C. 2010. Sustainability reporting on Malaysian local authority websites, Unpublished Doctoral Study. Curtin University. Perth Australia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Kostova, T., and S. Zaheer. 1999. Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of multinational enterprise. *The Academy of Management Journal* 24 (1): 64-81.
- Lennox. C.S. 1999. Non-audit fees, disclosure and audit quality. *European Accounting Review* 8 (2): 239-252.
- Leuz, C. (2011). Different approaches to corporate reporting regulation: How jurisdictions differ and why. *Accounting and Business Research.* 40 (3): 229-256.
- Lev, B., and A. Schwartz. 1971. On the use of economic concept of human capital in financial statements. *The Accounting Review* 46 (1): 103-112. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/243891> (accessed May 26, 2014).
- Lyngstad, R., 2010. Reconsidering Rationales for Local Self-Government Impacts of Contemporary Changes in Local Decision Making. *Journal of Local Self-Government* 8 (1): 93-113.
- Mahoney, P. G. 1995. Mandatory disclosure as a solution to agency problems. *The University of Chicago Law Review* 62 (3): 1047-1112.
- Mardiasmo. 2002. Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik: telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 6 (1): 63-82.
- Marston, C. L and P. J. Shrivs. 1991. The use of disclosure indices in accounting research: A review article. *The British Accounting Review* 23 (3): 195-210.
- Martani, D., and A. Lestari. 2010. Local government financial statement disclosure in Indonesia. University of Indonesia. Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA), Bangkok, Thailand.
- Meek, G.K., C. B. Roberts, and S. J. Gray. 1995. Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European multinational corporations. *Journal of International Business Studies* 26 (3): 555-572.
- Meyer, J. W., and B. Rowan. 1977. Institutionalized organizations: Formal structures as myth and ceremony. *American Journal of Sociology* 83 (2): 310-363.
- Mobus, J. L. 2005. Mandatory environmental disclosures in a legitimacy theory context. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 18 (4): 492-517.
- Moran, D. D., M. Wackernagel, J. A. Kitzes, S. H. Goldfinger, and A. Boutaud. 2008. Measuring sustainable development -

- Nation by nation. *Ecological Economics* 64 (3): 470-474.
- Mucciarone, M. A. 2008. Accountability and performance measurement in Australian and Malaysian government department. Unpublished Doctoral Thesis. Curtin University. Perth Australia.
- Mulyani, S. 2010. *Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia memburuk*, Kompas, January 15.p.2.
- Nurhayati, R., A. M. Brown, and G. Tower. 2006. *Understanding the level of natural environmental disclosures by Indonesian listed companies*. *Journal of the Asia Pacific Centre for Environmental Accountability* 12 (3): 4-11.
- Palmer, I. and R. Dunford. 1993. Conflicting uses of metaphor: Reconceptualizing their uses in the field of organizational change. *Academy of Management Review* 21 (3): 691-712.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Retrieved: 1 Juni 2011, from http://hukum.unsrat.ac.id/men/permen-dagri_13_2006.pdf.
- Perera, H. 2007. The international and cultural aspects of social accounting. In *social accounting, mega accounting, and beyond: A festschrift in honor of M.R. Mathews*, ed. R. Gray and J. Guthrie, 91-99, St. Andrews: CSEAR Publishing.
- Perrow, C. 1985. Review Essay: overboard with myth and symbols. *American Journal of Sociology*. 91 (1): 151-155.
- Rahaman, A., Shiraz, S. Lawrence and J. Roper. 2004. Social and environmental reporting at the VRA: Institutionalized or legitimating crisis? *Critical Perspectives on Accounting* 15 (1): 35-56.
- Republik Indonesia. 2003. The Act. No 17, 2003. From http://www.dmo.or.id/dmodata/4Peraturan_dan_Ketentuan/Undang_undang/UU_17_2003_Keuangan_Negara.pdf.
- Robbins. W. A., and K. R. Austin. (1986). Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. *Journal of Accounting Research* 24 (2): 412-421.
- Ryan, C., and B. Purcell. 2004. Corporate governance disclosures by Local Government Authorities. *Working paper*, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Schon, W. 2006. Corporate disclosure in a competitive environment-the quest for a European framework on mandatory disclosure. *Journal of Corporate Law Studies* 6 (2): 259-298.
- Scott, W. R. 1987. The adolescence of institutional theory. *Administrative Science Quarterly* 32 (4): 493-511. JSTOR.<http://www.JSTOR.org/stable/2392880> (accessed May 9, 2014).
- Sejjaaka, S. 2004. A process based model for corporate mandatory disclosure. Accessed May 17, <http://cpa.ug/A%20Process%20Based%20Model%20of%20Corporate%20Mandatory%20Disclosure.pdf>.
- Silva, C. N. 2009. Local political leadership in Portugal: Excepcionalism or convergence towards a 'Mayoral Model'? *Journal of Local Self-Government* 7 (3): 243-256.
- Sloan, L. 2011. Measuring minor parties in English local government: Presence vs. vote share. *Local Politics Specialist Group*. Accessed May 5, 2015. http://www.psa.ac.uk/2011/UploadedPaperPDFs/719_270.pdf.

- Sotiropoulos, E. 2008. A reformed Senate as a check on prime ministerial power. *Canadian Parliamentary Review* 31(1): 28-33.
- Stalebrink, O. J. 2007. An investigation of discretionary accruals and surplus-deficit management: Evidence from Swedish municipalities. *Financial Accountability and Management* 23 (4): 441-458.
- Tagesson, T. 2008. Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipality accounting. *Scandinavian Journal of Management* 24 (3): 271-283.
- Taylor, D.W., and M. Rosair. 2000. The effect of participating parties, the public and size on government departments' accountability disclosures in annual reports. *Accounting, Accountability and Performance* 6 (2): 77-98.
- Tolbert, P. S., and L. G. Zucker. 1983. Institutional sources of change in the formal structure of organizations: The diffusion of civil service reform. *Administrative Science Quarterly* 28 (1): 22-39.
- Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1999, *Pemerintah Daerah*, Retrieved: 3 May 2011, from <http://www.esdm.go.id/.../uu/.../270-undang-undang-no22-tahun-1999.html>.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2009, *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Retrieved: 3 May 2011, from: http://www.id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_RepublikIndonesia_Nomor_27_Tahun_2009.
- Usman S. 2001. Indonesia's decentralization policy, initial experiences and emerging problems. This paper was prepared in *The Third EUROSEAS Conference Panel on Decentralization and Democratization in Southeast Asia*, London, September 2001.
- Velleman P. F., and R. E. Welsch. 1981. Efficient Computing of Regression Diagnostics. *The American Statistician* 35 (4): 234-242.
- Ying, Z. I., and L. Zhengfei 2006. The relationship between disclosure quality and cost of equity capital of listed companies in China. *Economic Research Journal* 2 (7): 2-17.
- Yoshikawa, T., L. S. Tsui, dan J. McGuire. 2007. Corporate governance reform as institutional innovation: The Case of Japan. *Organization Science* 18 (6): 973-988.

¹ The territory of Indonesia is divided into autonomous provinces, districts (kabupaten) and municipalities (kota). Districts and municipalities are technically the same level of government. This distinction is based on whether the government administration is located in a rural area (district) or an urban area (municipality). Within districts and municipalities there are sub-districts (kecamatan) which are smaller administrative government units. Each sub-district is further divided into villages. Villages in rural areas are called desa, while in an urban areas there are referred to as kelurahan (Usman, 2001). This study focuses on the district and municipality levels that are referred to in this study as 'local government'.

² Under Act No. 27 of 2009, In Indonesia, there are three levels of parliament; those are state parliament, provincial parliament, and local parliament. This study focuses on the local parliament level consisting of districts and municipalities members.

³ A method of sampling that involves the division of a population into smaller groups known as strata. In stratified random sampling, the strata are formed based on members' shared attributes or characteristics. A random sample from each stratum is taken in a number proportional to the stratum's size when compared to the population. These subsets of the strata are then pooled to form a type of random sample. In this study, the division of strata includes district-municipality, old-new age of local government, surplus-loss of local government, and Java and non-Java.

⁴ Financial independence is measured by the ratio of local government financial independence (RLGFI). According to Alicias et al. (2007) the local financial formula is local government revenue divided by local government revenue plus revenue from state and province entities.

⁵ Classical assumptions of multiple regressions (multicollinearity, normality, linearity, outliers, and homoscedasticity) have been checked with the conclusion that all of the assumptions were met (see Hair, Anderson, Tatham, and Black 1988). Multiple regression analyses can be severely and adversely affected by failures of the data to remain constant with the assumptions that customarily accompany regression models. Mahalanobis distance and Cook's distance as diagnostic methods are available to help identify certain kinds of failure as outlier data. Diagnostics are thus valuable adjuncts to regression analyses. Mahalanobis distance and Cook's distance are capable of producing partial plots in the SPSS program. This allows for the saving of residuals (Velleman and Welsch 1981). From the residual, Mahalanobis value should be < 26.52 (based on seven predictor variables), and Cook's value should be < 1 (Cook and Hawkins 1990). The analysis shows no concerns with outlier values. The results of this regression are summarized in Table 6.

PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND THEORY DALAM MENJELASKAN EARNINGS MANAGEMENT NON-GAAP PADA PERUSAHAAN TERPUBLIKASI DI INDONESIA

Bese Nur Amaliah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: besenuranaliah@gmail.com

Yeni Januarsi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: yenijanuarsi@gmail.com

Ewing Yufisa Ibrani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: ewing_ibrani@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the cause factors of non-GAAP earnings management from Fraud Diamond Theory (FDT) perspective. FDT is a theory, which widely used in auditing area to explain the cause factors of fraud in companies. Using four FDT indicators, which are stress, opportunity, rationalization, and capabilities, this research investigates 42 companies from non-banking and non-financing industries during 2010 and 2013. As the results of logistic regression analyses, we find that opportunity and capabilities influence managers to conduct non-GAAP earnings management. On the other hand, stress and rationalization have the different results. The findings show that in Indonesia, opportunity and capabilities are two aspects that should be given a strong attention from Indonesian regulator in order to reduce non-GAAP earnings management.

Keywords: *non-GAAP earnings management, Fraud Diamond Theory, restatement*
<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art5>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab manajemen laba non GAAP berdasarkan Fraud Diamond Theory (FDT). FDT merupakan teori yang banyak dipakai dalam bidang audit untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Dengan menggunakan indikator-indikator FDT, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan, penelitian ini menyelidiki 42 perusahaan bidang selain bank dan keuangan selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013. Sebagai hasil dari analisis regresi logistik, peneliti menemukan bahwa kesempatan dan kemampuan menjadi faktor penyebab terjadinya manajemen laba non-GAAP. Namun sebaliknya, tekanan dan rasionalisasi mempunyai hasil yang berbeda. Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, faktor kesempatan dan kemampuan perlu mendapat perhatian lebih dari pembuat regulasi untuk mengurangi terjadinya manajemen laba non-GAAP.

Kata Kunci: *non-GAAP earnings management, Fraud Diamond Theory, restatement*

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus manajemen laba yang terkuak ke permukaan serta rapuhnya sistem *corporate goovernance* menimbulkan keraguan

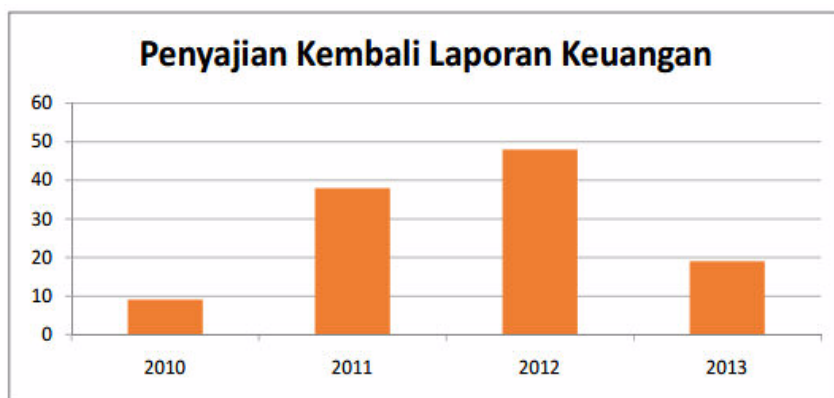
atas integritas informasi yang disajikan kepada para investor (Rezaee 2002). Manajemen laba, seperti telah dinyatakan pada banyak literatur manajemen laba, dapat berbentuk 3 tipe yaitu

(1) manajemen laba akrual, (2) manajemen laba riil, dan (3) manajemen laba non-GAAP. Tipe pertama dan kedua merupakan jenis *earnings management* yang masih dalam koridor prinsip akuntansi berterima umum (PABU), karena dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas aturan-aturan akuntansi sedangkan tipe ketiga telah melanggar PABU. Di Indonesia, beberapa kasus manajemen laba Non-GAAP banyak terjadi. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada Bakrie Grup tahun 2010 dimana *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kasus diberikannya sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada empat emiten yaitu PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan PT Benakat Petroleum Energi Tbk (BIPI). Sanksi berupa denda masing-masing senilai Rp. 500 juta karena empat emiten tersebut terbukti memoles laporan keuangan melalui penyajian laba supaya tampak menguntungkan, dan berharap publik tertarik membeli saham mereka untuk meningkatkan harga saham (Kompas 2010).

Berdasarkan pra-investigasi yang dilakukan peneliti, kami mendokumentasikan beberapa kasus manajemen laba Non-GAAP yang terjadi di Indonesia pada Gambar 1. Dalam Gambar 1 terlihat bahwa selama 4 tahun terdapat 89 perusahaan yang melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi

peningkatan yang sangat drastis atas kasus manajemen laba tipe ini. Maraknya kasus manajemen laba non-GAAP tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat dampak negatif yang mungkin terjadi akibat manajemen laba jenis ini sangat merugikan pihak perusahaan. Literatur manajemen laba telah mendokumentasikan banyak dampak negatif yang timbul akibat perilaku oportunistik ini, seperti kemunduran dalam bisnis, tekanan untuk memenuhi harapan, solusi akuntansi yang dicoba, risiko terhitung dari auditor, skeptisme yang tidak mencukupi para pemakai laporan keuangan, investigasi hukum, dan hilangnya reputasi secara besar-besaran (Stice, Stice, dan Skousen 2004). Kerugian lainnya yang ditimbulkan oleh tindakan kecurangan tersebut adalah merugikan hubungan eksternal bisnis, semangat kerja karyawan, reputasi perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan (PWC 2003), serta pada beberapa kasus dapat menghancurkan nilai perusahaan (Badertscher 2011).

Pada jenis manajemen laba non-GAAP, jenis manajemen laba ini dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran akuntansi yang paling buruk karena dapat mengarah pada kecurangan (*fraud*) laporan keuangan serta karena dilakukan di luar batas PABU dan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan nilai perusahaan (Badertscher 2011). Hearnly dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba Non GAAP merupakan manajemen laba dapat mengarah kepada tindakan kecurangan (*fraud*).



Gambar 1: Kasus Manajemen Laba Non-GAAP Berupa *Restatement* Laporan Keuangan

Sebagian besar riset terdahulu dalam area manajemen laba difokuskan pada jenis manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Walaupun demikian, tidak banyak penelitian dalam literatur manajemen laba yang difokuskan pada jenis manajemen laba non-GAAP, padahal jenis manajemen laba ini merupakan jenis manajemen laba yang paling buruk dan berpotensi melahirkan dampak buruk juga bagi kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu sangat penting dilakukan investigasi tentang penyebab manajemen laba jenis ini dapat terjadi.

Berbagai konsekuensi negatif potensial tersebut dan maraknya kasus manajemen laba Non-GAAP yang terjadi serta berdasarkan fakta yang telah kami sajikan sebelumnya menunjukkan bahwa sangat penting mengetahui penyebab mengapa manajemen laba non-GAAP dilakukan sehingga manajemen laba jenis ini dapat diminimalisir dan kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan penyebab terjadinya perilaku tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan manajemen laba non-GAAP dari perspektif *Fraud Diamond Theory* (FDT), yang pada awalnya digunakan dalam bidang pengauditan untuk menjelaskan mengapa kecurangan dalam laporan keuangan dapat terjadi yang dipadukan dengan motivasi manajemen laba yang kemukakan oleh Scott (2012). Scott (2012) menyebutkan bahwa motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba didasari oleh *the bonus plan hypothesis, other contracting motivations, earning expectations and maintain reputation, dan Initial Public Offering (IPO)*.

Kami berargumen bahwa FDT berpotensi untuk dapat menjelaskan mengapa manajemen laba non-GAAP dapat terjadi karena pada awalnya, dalam bidang pengauditan, FDT digunakan untuk menjelaskan motivasi-motivasi yang timbul atas tindakan kecurangan dalam laporan keuangan (*fraud of financial reporting*). Jika praktik manajemen laba non-GAAP secara konsep tidak diragukan lagi dapat *mengarah* kepada kecurangan laporan keuangan, berarti bahwa manajemen

laba non-GAAP sangat dekat dengan kecurangan atas laporan keuangan, sehingga setiap motivasi yang timbul untuk melakukan *fraud* secara potensial dapat juga memotivasi untuk dilakukannya manajemen laba non-GAAP.

Dalam perspektif FDT, terdapat empat elemen penting yang digunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba non-GAAP berpotensi terjadi. Keempat elemen tersebut adalah (1) tekanan/motif manajemen, (2) kesempatan, (3) rasionalisasi, dan (4) kapabilitas. Elemen pertama, tekanan merupakan situasi dimana manajemen merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan manajemen laba. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal, termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dalam hal keuangan, tekanan dapat terjadi saat manajemen sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya misalnya tekanan untuk biaya pengobatan, tekanan dari keluarga yang menuntut keberhasilan secara ekonomi, serta pola hidup mewah (Rustendi 2009). Sedangkan dalam hal non keuangan, tekanan dapat terjadi saat manajemen melakukan tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Moeller (2009) mengemukakan bahwa tekanan situasi berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen, dan terjadi kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya, baik yang berkenaan dengan akses terhadap penggunaan aktiva perusahaan, kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan, maupun jenjang karir manajemen yang tidak jelas.

Elemen kedua, kesempatan yaitu adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan manajemen laba atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Kesempatan akan timbul pada saat sistem pengelolaan yang masih rapuh pada badan usaha dan pengendalian internal perusahaan yang lemah serta melalui penggunaan posisi (Gagola 2011). Hal tersebut menimbulkan banyak celah yang menjadikan kesempatan bagi manajemen untuk

memanipulasi transaksinya dengan melakukan manajemen laba untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

Elemen ketiga, rasionalisasi dapat diartikan sebagai adanya atau munculnya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir dimana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan, sebagai contoh manajemen membenarkan untuk melakukan praktik manajemen laba Non GAAP. Penyimpangan yang dilakukan manajemen juga disebut dengan *moral hazard problem*. Moeller (2009) menyatakan bahwa banyaknya praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan menjadi salah satu pemicu manajemen untuk melakukan hal yang sama, contohnya melakukan praktik manajemen laba dan menganggapnya hal yang biasa dilakukan.

Elemen keempat, Kapabilitas yaitu seberapa besar daya dan kapabilitas dari seseorang itu melakukan kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan. Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan banyak kecurangan (*fraud*) yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan.

Berdasarkan FDT, kami berasumsi bahwa manajer dapat melakukan manajemen laba Non GAAP apabila terdapat kesempatan yang merupakan pintu masuk bagi dilakukannya manajemen laba tipe tersebut, mendapatkan tekanan dan munculnya sikap rasionalisasi yang mendorong untuk melakukan manajemen laba Non GAAP, serta memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mengotak-atik laba yang diinginkan, sehingga keempat situasi potensial (adanya kesempatan, tekanan, rasionalisasi, dan kapabilitas) tersebut dapat digunakan manajer untuk mengejar kepentingan pribadinya dan jika dibiarkan dalam jangka panjang akan memiliki dampak yang merugikan perusahaan dan seluruh pengguna laporan keuangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa hal. Pertama, penelitian ini

diharapkan dapat menunjukkan penyebab mengapa manajemen laba Non GAAP dilakukan oleh manajer berdasar pada suatu teori yang telah *establish*, yaitu *Fraud Diamond Theory (FDT)*. Penelitian yang menguji dan menghubungkan FDT dengan manajemen laba non GAAP, sepanjang pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, diharapkan penelitian ini dapat memetakan solusi potensial untuk mengurangi manajemen laba Non GAAP, sehingga kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur manajemen laba dengan menunjukkan bahwa teori yang berasal dari bidang lain (dalam hal ini bidang *auditing*) dapat dikolaborasikan dengan bidang akuntansi keuangan demi mendapatkan penjelasan yang memadai dan ilmiah mengapa perilaku oportunistik manajer, yaitu dilakukannya manajemen laba non GAAP dapat terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tekanan dan Manajemen Laba Non GAAP

Tekanan merupakan situasi dimana manajemen merasakan insentif atau termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Tekanan dapat terjadi pada manajemen mencakup hampir semua hal, termasuk hal keuangan dan non keuangan (Cressey 1953). Tekanan manajemen untuk memenuhi kebutuhan keuangan pribadinya menjadi faktor pemicu untuk melakukan manajemen laba Non GAAP yaitu dengan meningkatkan laba perusahaan sehingga porsi dividen yang akan dihasilkan juga cenderung lebih besar. Kinerja perusahaan yang buruk juga menjadi tekanan pada manajemen karena akan berdampak pada kurangnya aliran dana yang masuk ke dalam perusahaan, terutama dana yang didapatkan dari para investor potensial. Namun semakin banyak aliran dana yang masuk dalam perusahaan tentunya semakin banyak pula beban yang ditanggung manajemen untuk melunasi hutang perusahaan.

Achmad *et al.* (2007) menunjukkan

bahwa peningkatan motivasi perjanjian hutang (*debt covenant*) meningkatkan praktik manajemen laba. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, dimana hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivitya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba Non GAAP yang dilakukan diluar batas GAAP. Apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, berarti perusahaan itu memiliki hutang yang besar dan risiko kredit yang dimiliki juga tinggi. Perusahaan yang memiliki risiko kredit yang tinggi, cenderung tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman modal yang diberikan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyelamatkan diri dari kondisi yang demikian agar tetap dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini juga didukung oleh pendapat Skousen *et al.* (2009) yang berpendapat bahwa salah satu tekanan yang sering dialami manajemen perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal. Dechow *et al.* (1996) berpendapat bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan memotivasi tindakan manipulasi laba. Penelitian yang dilakukan Aghghaleh *et al.* (2014) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Widyaningdyah (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis pertama untuk proksi tekanan yang diajukan penulis adalah:

H1a: Leverage berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam ini dianggap dapat mengatasi permasalahan agensi yang selama ini sering terjadi, sebab dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham

(Rahmanti 2013). Kepentingan dari prinsipal adalah memperoleh deviden setinggi-tingginya yang dapat dilihat dari perolehan laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan kepentingan dari manajemen adalah mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya. Dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan akan mempengaruhi kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan. Dan dengan adanya kepemilikan ini, para manajer akan mendapat tekanan untuk bersikap hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan lebih bersemangat dalam meningkatkan nilai perusahaan serta dapat memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal. Para manajer juga akan merasa seperti memiliki perusahaan, sebab segala tindakan yang mereka lakukan diperusahaan dalam hal kebijakan manajerial, akan mempengaruhi deviden yang akan diterimanya. Dengan kata lain, perusahaan dengan komposisi pemilik saham sebageaian berasal dari orang dalam cenderung untuk tidak melakukan manajemen laba Non GAAP karena dalam beberapa kasus dapat menghancurkan nilai perusahaan (Badertscher 2011). Dalam penelitian Skousen *et al.* (2009) telah dibuktikan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki orang dalam, maka probabilitas terjadinya kecurangan. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis kedua untuk proksi tekanan yang diajukan penulis adalah:

H1b: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Dalam menjalankan kerjanya, manajer perusahaan dituntut untuk melakukan performa terbaik sehingga dapat mencapai target keuangan yang telah direncanakan. Perbandingan laba terhadap jumlah aktiva atau *Return on Asset* adalah ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa

efisien aktiva telah bekerja (Skousen *et al.* 2009). ROA sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain. *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang diperoleh, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya 2005). Oleh karena itu, semakin tinggi ROA yang ditargetkan perusahaan maka semakin rentan perusahaan akan melakukan manajemen laba. Semakin besar ROA juga akan mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal tersebut akan membuat manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba Non GAAP agar dapat menarik dan meningkatkan kepercayaan investor tersebut.

Penelitian Carlsn dan Bathala (1997) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang besar (diukur dengan profitabilitas atau ROA) lebih mungkin melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang memiliki laba yang kecil. Budiasih (2009) menyatakan profitabilitas yang diprosikan dengan variabel ROA berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis ketiga untuk proksi tekanan yang diajukan penulis adalah:

H1c: ROA berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Kesempatan dan Manajemen Laba Non GAAP

Kesempatan yaitu adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan manajemen laba atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen melakukan manajemen laba. Kesempatan akan timbul saat pengendalian internal perusahaan lemah (Gagola 2011). Kelemahan pengendalian internal memberi kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi

transaksi dengan melakukan manajemen laba Non GAAP dengan memperhitungkan pendapatan dilakukan di luar batas GAAP. Adanya informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan selaku prinsipal dan manajemen selaku agen juga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Agen bisa melakukan tindakan yang tidak menguntungkan prinsipal secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan dari perusahaan tersebut. Untuk menghindari tindak kecurangan adanya praktik manajemen laba Non GAAP yang dilakukan manajemen, dibutuhkan unit pengawas yang mampu memonitoring jalannya perusahaan.

Pamudji dan Trihartati (2008) membuktikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang independen cenderung tidak melakukan kecurangan dengan melakukan praktik manajemen laba, karena komite audit memiliki fungsi pengawasan untuk menjamin bahwa manajemen melakukan tugasnya dengan baik. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Sam'ani 2008).

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui; (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan prinsip akuntansi berterima umum; (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan (Wardhani 2006). Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (a) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat; (b) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas manajemen laba Non GAAP yang dampaknya dalam jangka

panjang dapat merugikan perusahaan dan seluruh pemakai laporan keuangan. Sehingga untuk menguji pengaruh kesempatan terhadap manajemen laba Non GAAP, maka kesempatan dalam penelitian ini menggunakan proxy yaitu presentase komite audit independen, jumlah komite audit, dan jumlah pertemuan antar anggota komite audit (Skousen *et al.* 2009).

Independensi merupakan karakteristik terpenting yang harus dimiliki oleh komite audit untuk memenuhi peran pengawasannya. Hal tersebut menjelaskan mengapa bursa efek mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan independensi komite audit. BRC (1999) merekomendasikan bahwa komite audit seharusnya hanya terdiri dari komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan yang mungkin akan merusak independensinya. Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) membuktikan bahwa proporsi anggota komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pamudji dan Trihartati (2008) membuktikan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis pertama untuk proksi kesempatan yang diajukan penulis adalah:

H2a : Komite Audit Independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Securities and Exchange Commission (SEC) menghendaki bahwa setiap komite audit harus terdiri dari minimal satu anggota yang merupakan ahli keuangan. Hal tersebut juga disyaratkan oleh Bapepam (2004). Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit Nomor IX.I.5 menurut BAPEPAM mengenai keanggotaan komite audit merekomendasikan adanya minimal satu anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dengan asumsi bahwa anggota tersebut dapat meningkatkan keefektifan kinerja. Keahlian di bidang keuangan sama pentingnya bagi komite audit karena

fungsi utama dari komite audit tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan (Rahman dan Ali 2006). Ahli finansial dengan pengetahuan dan keahlian tertentu, diharapkan dapat memandu anggota komite audit lainnya untuk mengidentifikasi pertanyaan yang dapat memberi tantangan pada manajemen dan audit eksternal, serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akan terjadi hubungan negatif antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan kecurangan laporan keuangan, dengan melakukan praktik manajemen laba Non GAAP yang dalam beberapa kasus dapat menghancurkan nilai perusahaan dan hilangnya reputasi perusahaan secara besar-besaran (Baderstcher 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) membuktikan bahwa keahlian keuangan yang dimiliki komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Xie *et al.* (2003) dan Choi *et al.* (2004) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang akuntansi merupakan efektif untuk mengurangi manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis kedua untuk proksi kesempatan yang diajukan penulis adalah:

H2b: Keahlian komite audit di bidang keuangan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan semakin meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga manajemen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan melakukan praktik manajemen laba Non GAAP yang dampaknya akan menghancurkan nilai perusahaan dan dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan serta seluruh pemakai laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Aghghaleh *et al.* (2014) membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit ber-

pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis ketiga untuk proksi kesempatan yang diajukan penulis adalah:

H2c: Jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh para komite audit maka semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan, sehingga kesempatan untuk melakukan manajemen laba Non GAAP yang dilakukan manajemen dapat diminimalisir. Abbot *et al.* (2004) membuktikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang mengadakan pertemuan minimal empat kali dalam setahun cenderung tidak melakukan manajemen laba Non GAAP laporan keuangan sehingga akan terjadi hubungan yang negative antara jumlah rapat tahunan komite audit dengan kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) membuktikan bahwa jumlah rapat tahunan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Xie *et al.* (2003) membuktikan bahwa jumlah pertemuan antar anggota komite audit berhubungan negative dengan tingkat manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis keempat untuk proksi kesempatan yang diajukan penulis adalah:

H2d : Jumlah pertemuan antar anggota komite audit berpengaruh negative terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Rasionalisasi dan Manajemen Laba Non GAAP

Rasionalisasi dapat diartikan sebagai adanya atau munculnya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Cressey, D. R (1953) menjelaskan rasionalisasi sebagai pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Rasionalisasi lebih sering dihubungkan dengan sikap dan karakter sese-

orang yang membenarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya tidak baik (Rustendi 2009). Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir dimana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan, dimana manajemen membenarkan untuk melakukan praktik manajemen laba Non GAAP. Penyimpangan yang dilakukan manajemen juga disebut dengan *moral hazard problem*. Moeller (2009) menyatakan bahwa banyaknya praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan menjadi salah satu pemicu manajemen untuk melakukan hal yang sama, contohnya melakukan praktik manajemen laba Non GAAP dan menganggapnya hal yang biasa dilakukan.

Keterkaitan antara integritas manajemen dengan risiko audit seperti yang diungkapkan Turner *et al.* (2003) memiliki hubungan terbalik. Manajemen yang memiliki integritas tinggi akan berdampak pada kecilnya risiko audit. Jika integritas yang dimiliki manajemen rendah maka risiko audit yang ditimbulkan akan besar. Semakin kecil integritas manajemen maka semakin besar pula tingkat rasionalisasi yang dimiliki manajemen. Francis and Krishnan (1999) menyimpulkan bahwa kelebihan dari penggunaan diskresionari akrual dari praktik manajemen laba akan menyebabkan opini audit tidak wajar. Tindakan manajemen laba tersebut tentunya karena manajemen merasionalisasikan perbuatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.*, (2009) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H3: Opini audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Kapabilitas dan Manajemen Laba Non GAAP

Kapabilitas adalah suatu faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson (2004) merupakan salah satu pelengkap dari model *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Kapabilitas yaitu seberapa besar daya

dan kemampuan dari seseorang itu melakukan kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan. Seperti contoh manajer dapat melakukan manajemen laba Non GAAP apabila memiliki kapabilitas, sehingga manajemen tersebut dapat melakukan apapun untuk kepentingan pribadinya tetapi dalam jangka panjang akan memiliki dampak yang merugikan perusahaan dan seluruh pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini digunakan perubahan direksi sebagai proksi dari kapabilitas.

Wolfe dan Hermanson (2004) meneliti tentang kapabilitas sebagai salah satu *fraud risk factor* yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan (*fraud*) dan menyimpulkan bahwa perubahan direksi dapat mengindikasikan terjadinya *fraud*. Perubahan direksi pada umumnya sarat dengan muatan politis dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memicu munculnya *conflict of interest*. Perubahan direksi tidak selamanya berdampak baik bagi perusahaan. Perubahan direksi bisa menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi yang baru yang dianggap lebih berkompeten dari direksi sebelumnya. Sementara disisi lain, pergantian direksi bisa jadi merupakan upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui *fraud* yang dilakukan perusahaan serta perubahan direksi dianggap akan membutuhkan waktu adaptasi sehingga kinerja awal tidak maksimal.

Kompleksitas dan ketidakstabilan struktur organisasi perusahaan ditandai dengan tingginya perputaran posisi manajer senior, konsultan, dan jajaran direksi (Skousen *et al.* 2009). Adanya pergantian struktur jajaran direksi biasanya diikuti dengan praktik manajemen laba karena mendekati masa jabatannya manajemen akan memaksimalkan bonus akhir tahun. Manajemen laba khususnya manajemen laba Non GAAP merupakan cara akhir yang dilakukan manajemen pada saat manajemen tidak bisa mencapai target perusahaan yang berdampak pada pergeseran jabatan. Penelitian yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa peru-

bahan direksi dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan (*fraud*). Skousen *et al.* (2009) membuktikan bahwa perubahan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dengan melakukan praktik manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas kapabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi perubahan direksi, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H4: Perubahan direksi berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba Non GAAP

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-2013 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi peningkatan berbagai skandal dan kecurangan akuntansi terkait kasus-kasus manipulasi manajemen laba Non GAAP dan juga agar dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kasus manipulasi yang dialami perusahaan publik di Indonesia saat ini.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan dan non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 sampai 2013 dengan kriteria tertentu. Metode pengambilan sample yang akan digunakan adalah metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut: Perusahaan yang menyajikan laporan tahunannya dalam website perusahaan atau website BEI selama periode 2010-2013; Perusahaan yang menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan sebagai proksi indikasi terjadinya manajemen laba Non GAAP selama periode 2010-2013; Perusahaan yang melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan disebabkan karena kesalahan mendasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Laporan tahunan perusahaan memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan variabel penelitian; dan laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba Non GAAP. Dalam penelitian ini, manajemen laba Non GAAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kategori 1 untuk perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangan (*restatement*) pada periode 2010-2013, dan kategori 0 untuk sebaliknya (Badertscher 2011). Perusahaan yang dikategorikan melakukan penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) adalah perusahaan yang melakukan *restatement* yang diakibatkan karena kesalahan mendasar, bukan disebabkan karena penggabungan bisnis (merger atau akuisisi), perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi akibat konvergensi atau penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Penyajian kembali adalah hasil dari manajemen laba dimana terjadi pendapatan yang meningkat dikarenakan kesalahan pelaporan akuntansi (Badertscher 2011).

Tekanan

Tekanan merupakan situasi dimana manajemen merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan manajemen laba. Tekanan dalam penelitian ini diproksikan oleh *Leverage (LEV)*, Kepemilikan Manajerial (*OSHIP*), dan *Return On Asset (ROA)* (Skousen *et al.*, 2009).

Leverage (LEV) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dari luar perusahaan serta kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut dianggap sebagai tekanan yang bersumber dari faktor eksternal. *Leverage* sebagai proxy tekanan eksternal di mana *leverage* yang tinggi akan menimbulkan tekanan pada manajemen sehingga menyebabkan manajemen melakukan manajemen laba. *Leverage* dihitung dengan membagi total hutang dengan total (Skousen *et al.* 2009).

Kepemilikan Manajerial (*OSHIP*) yaitu komposisi saham yang dimiliki manajemen di dalam perusahaan. Skousen *et al.* (2009)

mengindiskan saat eksekutif memiliki porsi kepemilikan di dalam perusahaan, maka situasi keuangan pribadi mereka juga akan dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Tekanan manajemen untuk memenuhi kebutuhan keuangan pribadinya menjadi faktor pemicu untuk melakukan kecurangan dengan meningkatkan atau memanipulasi laba perusahaan sehingga porsi deviden yang akan dihasilkan juga cenderung lebih besar. *OSHIP* dihitung dengan membagi total saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham biasa yang beredar (Skousen *et al.* 2009).

Return On Asset (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. *ROA* sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Penelitian Carlsn dan Bathala (1997) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laba besar (diukur dengan profitabilitas atau *ROA*) lebih mungkin melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang memiliki laba yang kecil. *ROA* dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asset (Skousen *et al.* 2009)

Kesempatan

Kesempatan merupakan adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan manajemen laba atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Kesempatan dalam penelitian ini diproksikan oleh komite audit independen (*AUDCIND*), jumlah komite audit (*AUDSIZE*), dan jumlah rapat tahunan komite audit (*AUDCMEET*) (Skousen *et al.* 2009). *AUDCIND* dihitung dengan membagi jumlah anggota komite, *AUDCSIZE* diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit, (Skousen *et al.* 2009) sedangkan *AUDCMEET* diukur dengan menggunakan Jumlah pertemuan antar anggota komite audit yang dilakukan dalam satu tahun (Skousen *et al.* 2009).

Rasionalisasi

Rasionalisasi dapat diartikan sebagai adanya atau munculnya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Cressey (1953) menjelaskan rasionalisasi sebagai pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat normal. Rasionalisasi dalam penelitian ini diproksikan oleh opini audit (AUDREPORT). Francis and Krishnan (1999) menyimpulkan bahwa kelebihan dari penggunaan diskresionari akrual yaitu merupakan salah satu praktik manajemen laba menyebabkan opini audit tidak wajar. Tindakan manajemen laba tersebut dikarenakan manajemen merasionalkan perbuatannya. AUDREPORT diukur dengan menggunakan variabel dummy (Skousen *et al.* 2009). AUDREPORT: Kategori 1 jika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian (*qualified*) dan kategori 0 jika perusahaan menerima opini lain selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*)

Kapabilitas

Kapabilitas artinya seberapa besar daya dan kapabilitas dari seseorang itu melakukan kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan. Kapabilitas dalam penelitian ini diproksikan oleh keahlian anggota komite audit di bidang keuangan (AUDCEXP). Keahlian anggota komite audit di bidang keuangan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan anggota komite audit di bidang akuntansi atau keuangan atau pernah menduduki posisi penting dibidang keuangan dalam suatu organisasi. AUDCEXP diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu jika jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan anggota komite audit di bidang akuntansi atau keuangan atau pernah menduduki posisi penting dibidang keuangan dalam suatu organisasi, diberi nilai 1. Jika tidak memenuhi syarat tersebut diberi nilai nol (Skousen *et al.* 2009).

Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono 2013). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur dari jumlah total asset yang dimiliki oleh perusahaan, *Return on Equity* (ROE) yang diukur dari perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal sendiri atau total ekuitas, dan auditor type (BIG 4) yang diukur dengan menggunakan variabel dummy jika perusahaan diaudit oleh Big 4 auditor diberi katagori 1, dan kategori 0 jika sebaliknya yang digunakan oleh (Baderstscher 2011).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik. Model ini dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non metrik pada variabel dependen (NGEM), sedangkan variabel independen (LEV, OSHIP, ROA, AUDCIND, AUDCEXP, AUDCSIZE, AUDCMEET, AUDCREPORT, dan DCHANGE) merupakan campuran antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi, dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik dan tidak membutuhkan asumsi normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (independen) (Ghozali 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Manajemen Laba Non GAAP dan Pengujian Hipotesis

Statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan uji regresi logistik. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu

dilakukan uji Binary Logistic untuk menilai kelayakan model (*Goodness Of Fit Test*). Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 2.

Nilai sig yang dihasilkan adalah sebesar $0,473 > 0,05$, dalam hal ini tidak terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi yang diprediksi atau dengan kata lain model *binary logistic* cocok untuk dipakai pada analisis selanjutnya. Berdasarkan tabel Hosmer dan Lemeshow Test, terdapat nilai signifikan sebesar 0,473 yang artinya 47,3% variabel dependen dipengaruhi variabel independen dan 52,7% variabel independen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Untuk menilai kelayakan keseluruhan model, dilakukan uji *Overall Fit Model Test* dengan hasil yang tertera pada tabel 4.4. Uji regresi logistik yang selanjutnya menggunakan uji *-2 Log Likelihood*. Uji ini digunakan untuk menilai model regresi logistik layak dipakai atau tidak. Tampilan output SPSS memberikan dua nilai *-2 Log Likelihood* yaitu untuk model yang hanya memasukkan konstanta dan untuk model dengan konstanta dan variabel independen ke dalam model regresi logistik. Hasil pengolahan data SPSS uji *-2 Log Likelihood* dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
NGEM	168	0	1	0,21	0,412
LEV	168	0,006	1,086	0,45683	0,231495
OSHIP	168	0	13,33	1,014	2,632
ROA	168	-1,1	0,956	0,04123	0,150419
AUDCIND	168	0	1	0,51	0,501
AUDCEXP	168	0	1	0,79	0,412
AUDCSIZE	168	0	1	0,95	0,226
AUDCMEET	168	0	1	0,74	0,438
AUDREPORT	168	0	1	0,93	0,248
DCHANGE	168	0	1	0,22	0,416
BTD	168	-0,1	0,19	0,01592	0,023781
BIG 4	168	0	1	0,36	0,481
LN_SIZE	168	23,39	33	28,431	2,04412
Valid N (listwise)	168				

Tabel 2: Goodness Of Fit Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	7,608	8	0,473

Tabel 3: Iteration History

Iteration	-2 Log Likelihood		Coefficients
			Constant
Step 0	1	175,292	-1,143
	2	174,58	-1,293
	3	174,579	-1,299
	4	174,579	-1,299

Tabel 4: Model Summary

Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R square	Nagelkerke R Square
1	157,628a	0,096	0,149

Tabel 5: Variables In The Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
	LEV	-0,377	0,958	0,155	1	0,694	0,686
	OSHIP	-0,09	0,09	0,985	1	0,321	0,914
	ROA	0,625	1,368	0,209	1	0,648	1,867
	AUDCIND	-1,241	0,471	6,934	1	0,008	0,289
	AUDCEXP	-0,105	0,518	0,041	1	0,839	0,9
	AUDCSIZE	0,87	1,145	0,577	1	0,447	2,387
ep 1a	AUDCMEET	0,689	0,535	1,66	1	0,198	1,992
	AUDREPORT	-0,61	0,73	0,699	1	0,403	0,543
	DCHANGE	0,899	0,447	4,033	1	0,045	2,456
	BTD	0,956	8,989	0,011	1	0,915	2,602
	BIG4	-0,471	0,516	0,834	1	0,361	0,624
	LN_SIZE	0,063	0,136	0,214	1	0,644	1,065
	Constant	-3,114	3,856	0,652	1	0,419	0,044

Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa model fit dengan data yang artinya model tersebut merupakan model regresi yang baik dan melalui penambahan variable independen ke dalam model memperbaiki model fit. Setelah pengujian *-2 Log Likelihood* selesai, selanjutnya akan diuji dengan uji *Nagelkerke R Square*. Uji ini dilakukan untuk menilai seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variable independen (Ghozali 2011). Dasar pengambilan hasil dalam uji *Nagelkerke R Square* dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square* dalam Tabel 4. Terdapat nilai *Nagelkerke R Square* senilai 0,149 atau 14,9% yang artinya variabel dependen (manajemen laba Non GAAP) pada penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 14,9%. Sisanya yaitu sebesar 85,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Analisis Binary Logistic

Pengujian hipotesis dalam regresi logistik dilakukan dengan memasukkan seluruh variabel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *leverage*, kepemilikan manajerial, ROA, komite audit independen, keahlian komite audit di bidang keuangan, jumlah anggota komite audit, jumlah pertemuan antar anggota komite audit, opini audit, dan perubahan direksi terhadap manajemen laba Non GAAP. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan enter dengan tingkat signifikan sebesar 5%.

Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima (Ghozali 2011). Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan Sig *leverage* sebesar $0,694 > 0,05$ yang artinya *leverage* tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H1a ditolak**. Nilai Sig kepemilikan manajerial sebesar $0,321 > 0,05$ artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H1b ditolak**. Nilai Sig ROA sebesar $0,648 > 0,05$ artinya ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H1c ditolak**. Nilai Sig komite audit independen sebesar $0,008 < 0,05$ artinya komite audit independen memiliki pengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H2a diterima**. Nilai Sig keahlian komite audit di bidang keuangan sebesar $0,839 > 0,05$ artinya keahlian komite audit di bidang keuangan tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H2b ditolak**. Nilai Sig ukuran komite audit sebesar $0,447 > 0,05$ artinya jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H2c ditolak**. Nilai Sig jumlah pertemuan antar anggota komite audit sebesar $0,198 > 0,05$ artinya jumlah pertemuan antar anggota komite audit tidak berpengaruh secara

statistic terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H2d ditolak**. Nilai Sig opini audit sebesar $0,403 > 0,05$ artinya opini audit tidak berpengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H3 ditolak**. Nilai Sig perubahan direksi sebesar $0,045 < 0,05$ artinya perubahan direksi memiliki pengaruh secara statistik terhadap manajemen laba Non GAAP, maka **H4 diterima**.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tekanan dan Manajemen Laba Non GAAP

Variabel tekanan dalam penelitian ini diproksikan dengan *leverage*, kepemilikan manajerial dan ROA. *Leverage*, kepemilikan manajerial dan ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Non GAAP pada perusahaan yang menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan. Sehingga (H1a, H1b, dan H1c) ditolak. Dari hasil uji Statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan yang menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan memiliki *leverage* yang aman dalam arti perusahaan mampu membayar hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, kepemilikan manajerial juga sangat kecil dengan rata-rata di bawah 5%, dan ROA yang dihasilkan perusahaan relative rendah. Sehingga manajer tidak termotivasi dan merasa tertekan untuk melakukan praktik manajemen laba Non GAAP.

Kesempatan Terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Variabel kesempatan dalam penelitian ini diproksikan dengan komite audit independen, keahlian komite audit di bidang keuangan, jumlah anggota komite audit, dan jumlah pertemuan antar komite audit. Pada penelitian ini variabel kesempatan yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Non GAAP. Sehingga (H1a) diterima, sedangkan hipotesis lainnya untuk variabel kesempatan ditolak. Independensi komite audit merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Kinerja komite audit menjadi

efektif jika para anggotanya memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan pendapatnya. Hal ini juga dapat dijelaskan karena semakin banyak jumlah komite audit independen dalam perusahaan, maka akan semakin kecil potensi terjadinya manajemen laba Non-GAAP karena pengawasan dari pihak yang independen dapat menjamin manajemen melakukan tugasnya dengan baik.

Rasionalisasi Terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Variabel rasionalisasi dalam penelitian ini diproksikan dengan opini audit. Opini audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Non GAAP. Sehingga H3 ditolak. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai macam peristiwa atau kejadian yang menyebabkan opini audit mendapatkan opini selain *unqualified* sehingga bukan hanya karena terjadinya manajemen laba Non GAAP dimana manajemen merasionalisasikan perbuatannya yang menyebabkan opini audit mendapatkan opini selain *unqualified*.

Kapabilitas Terhadap Manajemen Laba Non GAAP

Variabel kapabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan perubahan direksi. Perubahan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba Non GAAP. Sehingga (H4) diterima. Hal ini disebabkan karena perubahan direksi umumnya sarat dengan muatan politis dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memicu munculnya *conflict of interest*. *Conflict of interest* terjadi karena timbulnya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara agen (manajer) dengan pihak prinsipal. Sehingga semakin tingginya *asymmetric information* antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik), mendorong meningkatnya tindakan manajemen laba Non GAAP oleh manajemen.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan manajemen laba non-GAAP dari perspektif *Fraud Diamond Theory (FDT)*, yang

pada awalnya digunakan dalam bidang pengauditan untuk menjelaskan mengapa kecurangan dalam laporan keuangan dapat terjadi yang dilihat dari empat elemen yaitu (1) tekanan/motif manajemen, (2) kesempatan, (3) rasionalisasi, dan (4) kapabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dan rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik sedangkan kesempatan dan kapabilitas memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Berpengaruhnya kesempatan dan kapabilitas ini menunjukkan bahwa pentingnya peran dari komite audit independen dalam memastikan bahwa pengendalian internal di perusahaan berjalan baik sehingga manajemen laba non-GAAP dapat diminimalisir. Hal yang sama juga sejalan dengan kapabilitas. Ketika terbuka kesempatan untuk melakukan manajemen laba non GAAP, maka situasi ini akan memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena itu, kesempatan berupa pergantian atau perubahan direksi harus diwaspadai oleh semua pihak dan regulator. Regulasi yang ketat atas perubahan susunan dewan direksi pada perusahaan perlu dibuat demi mencegahnya muncul kesempatan dilakukannya perilaku *opportunistic*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi dari *fraud diamond* agar cakupan variabel penelitian menjadi lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan proksi yang tepat untuk tekanan dan rasionalisasi pada *fraud diamond* yang dapat menyebabkan manajemen laba Non GAAP terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Abbott, L. J., S. Parker, dan G. F. Peters. 2004. Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 23 (1): 69-87.
- Achmad, K., I. Subekti, dan S. Atmini. 2007. Investigasi motivasi dan strategi manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Aghghaleh, S. F., Z. M. Mohamed, dan A. Ahmad. 2014. The effect of personal and organizational factors and role ambiguity amongst internal auditors. *International Journal of Auditing* 18 (2): 105-114.
- Agustia, D. 2013. Pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15 (1): 27-42.
- Badertscher, B. A. 2011. Overvaluation and the choice of alternative earnings management mechanisms. *The Accounting Review*. 86 (5): 1491-1518.
- Budiasih, I. G. A. N. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 4 (1): 44-50.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and recommendations of the Blue Ribbon Committee on improving the effectiveness of corporate audit committees*. http://www.chugachelectric.com/pdfs/agenda/fcagenda_051403_ixd.pdf (diakses 7 Januari 2015).
- Carlsn, S., dan C. Bathala. 1997. Ownership differences and firm's income smoothing behaviour. *Journal of Business and Accounting* 24 (2): 179-196.
- Choi, J., K. Jeon, dan J. Park. 2004. The role of audit committees in decreasing earnings management: Korean evidence. *International Journal of Accounting, Auditing, and Performance Evaluation* 1 (1): 37-60.
- Cressey, D. 1953. *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. Glancoe: Free Press.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1996. Causes and consequences of earnings manipulations: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting*

- Research* 13 (1): 1–36.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Francis, J. R., dan J. Krishnan. 1999. Accounting accruals and auditor reporting conservatism. *Contemporary Accounting Research* 16 (1): 135-165.
- Gagola, K. 2011. Analisis faktor risiko yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IMB SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Healy, P. M., dan J.M. Wahlen. 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons* 13 (4): 365-383.
- Kompas.com. dipublikasi 23 Juli 2010.
- Moeller. 2009. *Brink's modern internal auditing, 7th edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Pamudji, S., dan A. Trihartati. 2008). Pengaruh independen dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 6 (1).
- Price Water House Coopers (PWC). 2003. Building a strategic internal audit function. <https://www.pwc.be/en/systems-process-assurance/pwc-strategic-internal-audit.pdf> (diakses 10 Januari 2015).
- Rahman, R. A., dan F. H. M. Ali. 2006. Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence. *Managerial Auditing Journal* 21 (7): 783-804.
- Rahmanti, M. M. 2013. Pendektesian kecurangan laporan keuangan melalui faktor risiko tekanan dan peluang (Studi kasus pada perusahaan yang mendapat sanksi dari Bapepam periode 2002–2006). Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Rezaee, Z. 2002. *Financial statement fraud: Prevention and detection*. New York: John Wiley & Sons.
- Rustendi, T. 2009. Analisis terhadap faktor pemicu terjadinya fraud (Suatu kajian teoritis bagi kepentingan audit internal. *Jurnal Akuntansi* 4 (2): 705-714.
- Sam'ani. (2008). Pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2007. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Scott, W. R. 2012. *Financial accounting theory*, 6th Edition. Prentice Hall.
- Skousen, C. J., K. R. Smith, dan C. J. Wright. 200). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economic* 13: 53-81.
- Stice, E. K., J. D. Stice, dan K. F. Skousen. 2004. *Akuntansi intermediate*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, J. L., T. J. Mock, dan R. P. Sripastava. 2003. *An analysis of the fraud triangle*. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=4D3ADAE4C3472FD1BD2D2AC2818DFDF4?doi=10.1.1.101.4380&rep=rep1&type=pdf> (diakses 2 Februari 2015).

- Ujiyanho, M.A., dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Wardhani, R. 2006. Mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (Financially distressed firms). *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Widyaningsih. A. U. 2001. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap earnings management pada perusahaan go public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3 (2): 89-101.
- Wolfe, D. T., dan D R. Hermanson. 2004. The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*: 38-42.
- Xie, B., W. N. Davidson, dan P. J. DaDalt. 2003. Earnings management and corporate governance: The role of board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9 (3): 295-316.